



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1  
TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH (RPJPD) KOTA SOLOK TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SOLOK TAHUN 2005-2025.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, angka 7 dan angka 8 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1A, angka 5, angka 11 dan angka 14 dihapus serta setelah angka 14 ditambah satu angka yaitu angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
  - 1A. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Solok.
5. Dihapus.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Dihapus.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Dihapus.
15. Sasaran Pokok adalah Kondisi kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang diharapkan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Walikota.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2005-2025.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin kesinambungan perencanaan, sasaran pokok RPJPD periode berkenaan menjadi pedoman dalam merumuskan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pelaksanaan RPJPD dengan tetap memperhatikan dan mempedomani rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 22 Agustus 2019

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 22 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



RUSDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA  
BARAT:  
(2/76/2019)

## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	I-1
	I.1 Latar Belakang	I-1
	I.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
	I.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-6
	I.4 Maksud dan Tujuan	I-9
	I.5 Sistematika Penulisan	I-10
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
	II.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	II.1.1 Geografis	II-1
	II.1.2 Demografis	II-8
	II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-10
	II.3 Aspek Pelayanan Umum	II-24
	II.4 Aspek Daya Saing	II-61
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH</b>	
	III.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
	III.2 Isu Strategis	III-20
	III.2.1 Isu Internasional	III-20
	III.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional	III-24
	III.2.3 Isu atau Kebijakan Daerah	III-26
	III.2.4 Isu Strategis Kota Solok	III-28
<b>BAB IV</b>	<b>VISI DAN MISI DAERAH</b>	
	IV.1 Visi RPJPD Kota Solok 2005-2025	IV-1
	IV.2 Misi RPJPD Kota Solok 2005-2025	IV-3
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK</b>	V-1
	V.1 Arah Kebijakan Daerah	V-1
	V.2 Sasaran Pokok RPJPD Daerah	V-21
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	VI-1

## DAFTAR TABEL

		<b>HAL</b>
Tabel 1.1	Rincian Perubahan RPJPD Kota Solok	I-4
Tabel 2.1	Luas Wilayah di Kota Solok Menurut Kecamatan	II-3
Tabel 2.2	Klasifikasi Lereng di Kota Solok	II-4
Tabel 2.3	Jenis Tanah di Kota Solok	II-4
Tabel 2.4	Nama dan Panjang Sungai di Kota Solok	II-5
Tabel 2.5	Luas Lahan Sawah Basah dan Sawah Kering di Kota Solok Tahun 2017	II-7
Tabel 2.6	Distribusi, Sex Ratio, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Solok Tahun 2017	II-8
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kota Solok Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017	II-9
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Kota Solok Tahun 2013-2017	II-11
Tabel 2.9	Perbandingan IPM dan Komponen Penyusunnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	II-12
Tabel 2.10	PDRB Sektoral Kota Solok Tahun 2013-2017	II-14
Tabel 2.11	Nilai Location Quotient (LQ) Kota Solok Tahun 2013-2017	II-17
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Solok Tahun 2013-2017	II-19
Tabel 2.13	Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	II-21
Tabel 2.14	Kesempatan Kerja Kota Solok Tahun 2013-2017	II-23
Tabel 2.15	Perkembangan Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-24
Tabel 2.16	Angka Kelulusan Kota Solok Tahun 2013-2017	II-26
Tabel 2.17	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP Kota Solok Tahun 2015-2017	II-26
Tabel 2.18	Angka Putus Sekolah di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-27
Tabel 2.19	Perkembangan AKB dan AKHB Kota Solok Tahun 2014-2017	II-28
Tabel 2.20	Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/U dan BB/TB di Kota Solok Tahun 2014-2017	II-29
Tabel 2.21	Capaian Program dan Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Kota Solok Tahun 2013-2017	II-30
Tabel 2.22	Capaian Program dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan Kota Solok Tahun 2013-2017	II-31
Tabel 2.23	Target dan Capaian Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Kota Solok Kumulatif Tahun 2015-2017	II-32
Tabel 2.24	Capaian Program dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia Kota Solok Tahun 2013-2017	II-33

Tabel 2.25	Cakupan Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kota Solok Tahun 2013-2017	II-34
Tabel 2.26	Rasio Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Solok Tahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.27	Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kota Solok Tahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.28	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status di Kota Solok Tahun 2009 dan 2017	II-36
Tabel 2.29	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 2.30	Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Solok Tahun 2014	II-38
Tabel 2.31	Persentase Pekerjaan Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Solok Tahun 2017	II-39
Tabel 2.32	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Solok Tahun 2017	II-40
Tabel 2.33	Ketersediaan Pangan Tahun 2013-2017	II-41
Tabel 2.34	Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2017	II-42
Tabel 2.35	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Solok Tahun 2013-2017	II-43
Tabel 2.36	Perkembangan Koperasi Kota Solok Tahun 2013-2017	II-43
Tabel 2.37	Perkembangan UKM di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-44
Tabel 2.38	Pertumbuhan Nilai Investasi di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-45
Tabel 2.39	Perkembangan Seni Budaya Kota Solok Tahun 2013-2017	II-46
Tabel 2.40	Prasarana, Sarana dan Fasilitas Keagamaan di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.42	Angka Kunjungan Wisata di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-48
Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Capaian Pembangunan Pertanian di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-49
Tabel 2.44	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kota Solok Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.45	Perkembangan Industri Kota Solok Tahun 2013-2017	II-52
Tabel 2.46	Perkembangan IKM di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.47	Aspek Manajemen Pemerintahan	II-54
Tabel 2.48	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Kota Solok Tahun	II-55
Tabel 2.49	Kualifikasi Pengawas Intern Kota Solok Tahun 2013-2017	II-60
Tabel 2.50	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota Solok Tahun 2010-2014	II-62
Tabel 2.51	Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-63
Tabel 2.52	Rasio Ketergantungan Kota Solok Tahun 2013-2017	II-65

Tabel 3.1	UMKM Kota Solok Tahun 2013-2017	III-6
Tabel 3.2	Objek Wisata di Kota Solok dan Jarak dari Pusat Kota Tahun 2017	III -7
Tabel 3.3	IPM Kabupaten Kota Se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	III-10
Tabel 3.4	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	III-12
Tabel 3.5	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	III-13
Tabel 3.6	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	III-14
Tabel 3.7	Tahap dan Skala Prioritas RPJPN Tahun 2005-2025	III-25
Tabel 5.1	Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Kota Solok	V-18
Tabel 5.2	Visi, Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025	V-23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antara RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Solok	II-2
Gambar 2.2	Rata-rata Curah Hujan di Kota Solok Tahun 2017	II-6
Gambar 2.3	Perbandingan IPM Kota Solok dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	II-11
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Tahun 2013-2017	II-13
Gambar 2.5	Rata-rata Kontribusi Sektoral PDRB Kota Solok Tahun 2013-2017	II-15
Gambar 2.6	Rata-rata Pertumbuhan Sektor Tahun 2013-2017	II-16
Gambar 2.7	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Solok Tahun 2013-2017	II-18
Gambar 2.8	Indeks Gini Kota Solok Tahun 2013-2017	II-18
Gambar 2.9	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Solok terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	II-20
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Solok Tahun 2013-2017	II-22
Gambar 2.11	Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	II-51
Gambar 2.12	Perkembangan Industri di Kota Solok Tahun 2010-2015 (Dalam unit)	II-52
Gambar 3.1	Mata Rantai Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Solok	III-2
Gambar 3.2	Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Reparasi, Transportasi, dan Pergudangan	III-4
Gambar 3.3	Pertumbuhan Investasi Tahun 2013-2017	III-9
Gambar 3.4	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Solok Tahun 2013-2017	III-16

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Posisi Kota Solok sangat strategis, merupakan *etalase* Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada persimpangan jalur darat antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Untuk itu konsentrasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Kota Solok lebih diutamakan kepada perdagangan, pendidikan, kesehatan dan penyempurnaan fasilitas kota lainnya. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahapan pelaksanaan RPJPD dan pada saat ini perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaannya.

Pembangunan jangka panjang Kota Solok yang telah dilaksanakan, mulai sejak tahun 2005 telah memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Kota Solok berkurang. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Kota Solok kini dan masa akan datang, lalu merangkainya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus dan konsisten melalui perencanaan pembangunan jangka panjang dalam kurun waktu yang masih tersisa.

Sejak ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2010, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok telah dilaksanakan oleh 3 (tiga) Walikota yaitu Walikota periode I (2005-2010) Syamsu Rahim-Irzal Ilyas; Walikota periode II (2010-2015) Irzal Ilyas – Zul Elfian; dan periode III (2016-2021) Zul Elfian – Reinier. RPJPD Kota Solok akan memasuki periode IV yang merupakan tahapan terakhir dan akan dilaksanakan melalui RPJMD 2021-2025 untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah. Pada tahun 2017 telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD dengan rekomendasi bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Visi Kota Solok yaitu Mewujudkan “Solok Menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa dan Pendidikan di Sumatera Bagian Tengah Tahun 2025” perlu dilakukan rasionalisasi agar lebih *visible* sesuai dengan kondisi dan tantangan serta

kemampuan kapasitas riil kondisi daerah saat ini. Hal ini disebabkan pelaksanaan Visi dan Misi pada tiga periode RPJMD belum menekankan pada pencapaian **Kota Solok Sebagai Sentra di Sumatera Bagian Tengah**. Walaupun secara substansi visi dan misi RPJPD sudah dijabarkan dan selaras dengan visi dan misi pada tiga periode RPJMD.

- b. Secara sistematis dan substansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Solok 2005-2025, belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana RPJPD belum memuat sasaran pokok dan indikator kinerja yang akan menjadi benang merah pembangunan hingga Tahun 2025 dan akan menyulitkan dalam mengukur keberhasilan pembangunan di akhir periode perencanaan. Hal ini disebabkan pada saat penyusunan RPJPD Kota Solok belum ada aturan pelaksanaan atau petunjuk teknis tentang penyusunan RPJPD, hanya mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Beberapa arah pembangunan ekonomi, sosial dan sumberdaya manusia, agama dan budaya, hukum dan tata pemerintahan, sarana dan prasarana perkotaan, tata ruang dan lingkungan hidup, masih perlu dilakukan penguatan dan diakomodir dalam dokumen perubahan RPJPD. Berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Solok dalam pelaksanaan RPJPD seperti masih rendahnya kualitas daya saing potensi unggulan daerah dan ancaman krisis global mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Solok. Di samping itu adanya isu strategis yang harus diakomodir dalam dokumen perubahan RPJPD seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*, globalisasi ekonomi dunia dan kemajuan teknologi dan komunikasi.

Tahapan penyusunan Perubahan RPJPD sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;  
Pada tahapan ini dilakukan pembentukan Tim Penyusunan Perubahan RPJPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Solok; orientasi mengenai RPJPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- b. Penyusunan Rancangan Awal;  
Dalam penyusunan rancangan awal Perubahan RPJPD dilakukan analisis terhadap gambaran umum kondisi Daerah; analisis terhadap permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan lainnya; analisis terhadap isu strategis pembangunan jangka panjang; perumusan visi dan misi Daerah; perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; Forum Konsultasi Publik; konsultasi rancangan awal dengan gubernur dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- c. Penyusunan Rancangan;  
Rancangan perubahan RPJPD merupakan penyempurnaan dari rancangan awal perubahan RPJPD yang akan dibahas dalam Musrenbang.
- d. Pelaksanaan Musrenbang;  
Musrenbang rancangan perubahan RPJPD, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- e. Perumusan Rancangan Akhir;  
Perumusan rancangan akhir merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.
- f. Penetapan.  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan ditetapkan oleh Walikota Solok menjadi Peraturan Daerah.

Pendekatan dalam Penyusunan Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 melalui pendekatan teknokratik dan partisipasi masyarakat. Pendekatan teknokratik dilaksanakan melalui hasil evaluasi RPJPD dan perubahan mendasar perturan perundang-undangan terkait tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui analisis sektoral, penjangkauan aspirasi masyarakat, dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan, yang dirumuskan secara transparan, akuntabel, partisipatif, terukur dan berkelanjutan. Dokumen ini merupakan komitmen dan kehendak bersama dari seluruh pemangku kepentingan pelaksana pembangunan di Kota Solok.

Perubahan RPJPD Kota Solok dilakukan dengan perbaikan perumusan dan penyajian dokumen sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Rincian Perubahan RPJPD Kota Solok**

<b>BAB RPJPD</b>	<b>PERUBAHAN RPJPD KOTA SOLOK 2005-2025</b>
<b>BAB I</b>	• Penajaman latar belakang dan penyebutan alasan perubahan
	• Melengkapi dasar hukum dengan peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk
<b>BAB II</b>	• Memperbaharui data kinerja sampai dengan tahun 2017
<b>BAB III</b>	• Memperbaharui permasalahan pembangunan daerah
	• Memperbaharui isu strategis
<b>BAB IV</b>	• Memperbaharui pernyataan visi dan misi agar relevan dengan tantangan dan kondisi saat ini
	• Merumuskan indikator makro daerah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi Kota Solok
<b>BAB V</b>	• Merumuskan sasaran pokok dan indikator kinerja keberhasilan pada sasaran pokok RPJPD
	• Menyelaraskan kebijakan periode I, II dan III RPJPD dengan RPJMD yang sudah dan/atau sedang berjalan serta menyesuaikan kebijakan pada periode IV RPJPD
<b>BAB VI</b>	• Memperbaharui kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi

Berdasarkan paparan sebagaimana tersebut di atas, dirasa perlu bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Kota Solok kini dan masa yang akan datang, lalu merangkainya dalam perencanaan pembangunan secara baik, fokus dan konsisten pada sisa RPJPD. Perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien. Perubahan RPJPD ini dilakukan pada tahun 2018, dengan fokus perubahan adalah untuk menentukan agenda pembangunan periode IV RPJPD (RPJMD 2021-2025) sebagai landasan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Solok pada akhir pembangunan jangka panjang.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok Tahun 2005-2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13).

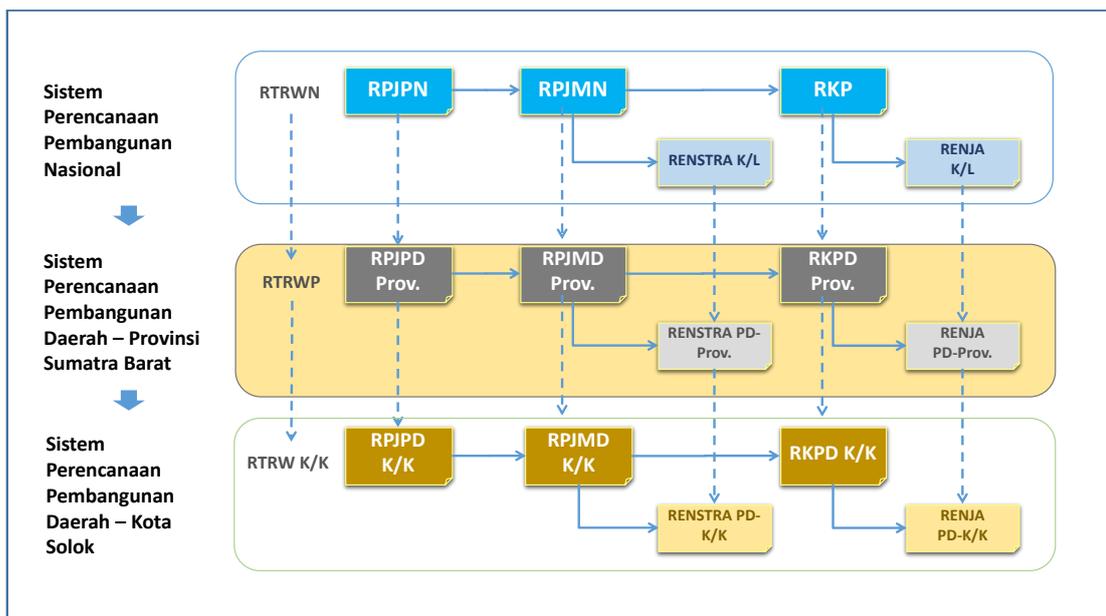
### **1.3 HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Penyusun perencanaan pembangunan daerah, dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing untuk

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan pembangunan daerah, dan dilaksanakan sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki daerah.

Secara hirarki perencanaan pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang 20 tahunan (RPJPD) perencanaan jangka menengah 5 tahunan (RPJMD) dan perencanaan jangka pendek tahunan (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang di susun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Selain itu, RPJPD bukan hanya berdasarkan kepentingan saja, namun harus di selaraskan dengan kemampuan sumberdaya daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. RPJPD Kota Solok merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi. Diagramatika keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat di gambarkan sebagai berikut:

**Gambar. 1.1**  
**Hubungan Antara RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan lainnya**



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017 (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa RPJPN dan RPJPD Provinsi menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kota Solok. Selaian itu RPJPD Kota Solok juga harus mengacu pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kota Solok. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan

perencanaan pembangunan pemerintah pusat sehingga RPJPD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu.

a. Hubungan Antara RPJPD Kota Solok dengan RPJPN.

RPJPD Kota Solok mempedomani RPJPN untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja di tingkat *impact* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran pokok RPJPD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJPN. Prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu dan permasalahan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

b. Hubungan Antara RPJPD Kota Solok dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

RPJPD Kota Solok mempedomani RPJPD Provinsi Sumatera Barat, untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja *impact* pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Kota Solok. Sinergitas *impact* indikator kinerja sasaran pokok RPJPD harus memperhatikan apa yang ingin di capai dalam sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Barat, sehingga prioritas pembangunan daerah Kota Solok memperhatikan isu strategis dan kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

c. Hubungan Antara RPJPD Kota Solok dengan RTRW Kota Solok.

Implementasi RPJPD didasarkan pada RTRW Kota Solok, baik pada aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan struktur dan pola ruang pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Kota Solok. Dengan kata lain, pendekatan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

d. Hubungan Antara RPJPD Kota Solok dengan RPJPD Kabupaten/Kota sekitar.

Penelaahan RPJPD Kota Solok dengan RPJPD kabupaten/kota di sekitar Kota Solok, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan Kota Solok dengan kabupaten/kota sekitarnya.

e. Hubungan Antara RPJPD Kota Solok dengan RPJMD Kota Solok.

RPJPD Kota Solok dilaksanakan setiap periode lima tahunan melalui RPJMD. Arah kebijakan RPJPD harus di pedomani dalam menentukan visi dan misi Kepala

Daerah. RPJPD sudah dilaksanakan oleh 3 (tiga) Walikota yaitu Walikota periode I (2005-2010) Syamsu Rahim – Irzal Ilyas; Walikota periode II (2010-2015) Irzal Ilyas – Zul Elfian; dan periode III (2016-2021) Zul Elfian – Reinier yang termuat dalam RPJMD masing-masing Walikota. Arah kebijakan tahap ke IV (2021-2025) menjadi pedoman masyarakat yang ingin menjadi Walikota dan Wakil Walikota dalam penyusunan visi, misi dan program yang nanti tertuang dalam RPJMD tahap IV. Arah kebijakan pembangunan daerah yang sejatinya adalah prioritas daerah dalam mencapai visi dan misi daerah harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari setiap Walikota dan Wakil Walikota yang menjabat dan terjabarkan dalam RPJMD sertiap lima tahunan. Perangkat daerah menyusun program dan kegiatan prioritas lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah, dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi antar RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok adalah untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kota Solok dengan peraturan perundangan yang berlaku, fenomena pembangunan dan permasalahan atau isu strategis pembangunan saat ini. Dokumen hasil perubahan RPJPD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Kota Solok secara berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan perubahan RPJPD Kota Solok adalah:

- a. Memperbaiki sistematika dan substansi RPJPD Kota Solok;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program bagi masyarakat yang ingin mencalonkan menjadi Walikota periode 2021-2025;
- c. Sebagai pedoman penyusunan RPJMD teknokratik dan RPJMD tahun 2021-2025;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok dan kabupaten/kota sekitar;
- e. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa datang; dan
- f. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan perubahan RPJPD Kota Solok mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan dasar hukum penyusunan Perubahan RPJPD. Selain itu juga dijelaskan Hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Perubahan RPJPD.

### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah Kota Solok yang berkaitan dengan analisis data/informasi yang dianggap relevan, selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, serta kebutuhan perumusan arah kebijakan.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang analisis permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun.

### **BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi daerah yang ingin dicapai selama 20 (dua puluh) tahun.

### **BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan hubungan antara sasaran pokok dengan arah kebijakan dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

### **BAB VI. PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

#### **2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

##### **2.1.1. Geografis**

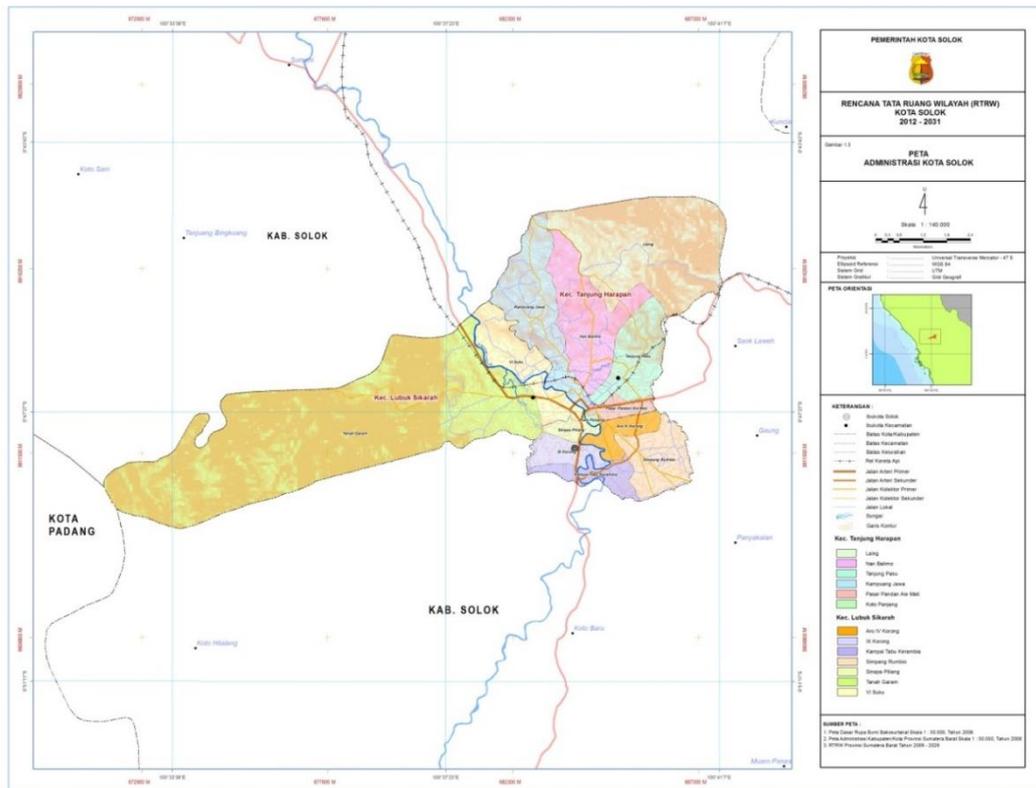
Secara geografis Kota Solok berada pada posisi 0°44'28" LS sampai 0°49'12" LS dan 100°32' 42"BT sampai 100°41'12" BT, terdiri dari daerah datar, bergelombang, curam, sangat curam dan berbukit dengan ketinggian rata-rata mencapai 390 meter di atas permukaan laut (dpl). Suhu udara maksimal mencapai 28,9°C dan minimal 26,1°C.

Kota Solok mempunyai posisi yang strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Provinsi Jambi, serta dari Jakarta menuju Bukittinggi dan terus ke Pekanbaru atau ke Medan.

Secara administrasi wilayah Kota Solok berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kab. Solok (Nagari Tanjung Bingkung dan Nagari Kuncir)
- Sebelah Selatan : Kab. Solok (Nagari Gaung, Koto Hilalang, Koto Baru dan Nagari Selayo)
- Sebelah Timur : Kab. Solok (Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai dan Nagari Gaung)
- Sebelah Barat : Kota Padang (Kecamatan Pauh dan Koto Tengah).

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kota Solok**



Sumber: Perda RTRW Kota Solok 2012-2031

Secara administratif, Kota Solok dengan luas 57,64 Km<sup>2</sup> terdiri dari 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Sikarah dengan luas wilayah 35 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan dan Kecamatan Tanjung Harapan dengan luas wilayah 22,64 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas 6 (enam) kelurahan. Dari keseluruhan kelurahan, Tanah Garam merupakan yang paling luas wilayahnya mencapai 42,26% dari keseluruhan Kota Solok. Luasan masing-masing kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah di Kota Solok Menurut Kecamatan**

No	KECAMATAN	LUAS (km <sup>2</sup> )	%
<b>A</b>	<b>LUBUK SIKARAH:</b>	<b>35,00</b>	<b>60,72</b>
1	Tanah Garam	24,36	42,26
2	VI Suku	3,6	6,25
3	Sinapa Piliang	0,64	1,11
4	IX Korong	1,5	2,60
5	Kampai Tabu Kerambil	1,35	2,34
6	Aro IV Korong	1,25	2,17
7	Simpang Rumbio	2,3	3,99
<b>B</b>	<b>TANJUNG HARAPAN:</b>	<b>22,64</b>	<b>39,28</b>
1	Koto Panjang	0,21	0,36
2	Pasar Pandan Air Mati	0,69	1,20
3	Tanjung Paku	2,35	4,08
4	Nan Balimo	7,59	13,17
5	Kampung Jawa	3,65	6,33
6	Laing	8,15	14,14
<b>Kota Solok</b>		<b>57,64</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kota Solok Dalam Angka 2018

Kondisi alam wilayah Kota Solok bervariasi antara dataran dan perbukitan dengan ketinggian 390 meter di atas permukaan laut (mdpl). Selengkapnya, kondisi lereng Kota Solok dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Lereng di Kota Solok**

No	Klasifikasi Lereng	Kelerengan (%)	Lubuk Sikarah		Tanjung Harapan		Jumlah	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Datar	0-2	561,36	16,04	223,15	9,86	784,51	13,61
2	Datar	2-8	890,86	25,45	984,52	43,49	1.875,38	32,54
3	Berbukit	8-15	440,16	12,58	621,97	27,47	1.062,13	18,43
4	Curam	15-25	730,77	20,88	249,73	11,03	980,50	17,01
5	Sangat Curam	25-40	776,79	22,19	178,23	7,87	955,01	16,57
4	Sangat Curam, Terjal	>40	100,28	2,87	6,18	0,27	106,46	1,85
<b>Kota Solok</b>			<b>3.500</b>	<b>100,00</b>	<b>2.264</b>	<b>100,00</b>	<b>5.764</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Perda RTRW Kota Solok 2012-2031

Jenis tanah yang terdapat di Kota Solok meliputi jenis tanah glei humus, latosol, dan jenis tanah podsolik. Jenis tanah di Kota Solok didominasi oleh tanah glei humus dengan luas 5.350,50 Ha (92,83%), dan yang terkecil jenis tanah latosol yaitu hanya seluas 7,82 Ha (0,14%). Selengkapnya mengenai jenis tanah di Kota Solok dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Jenis Tanah Kota Solok**

Nama Kecamatan	Jenis Tanah			Total
	Glei Humus	Latosol	Podsolik	
Lubuk Sikarah	3.371,04	-	129,09	3.500,13
Tanjung Harapan	1.979,47	7,82	276,58	2.263,87
<b>Luas (Ha)</b>	<b>5.350,50</b>	<b>7,82</b>	<b>405,68</b>	<b>5.764,00</b>
<b>Persentase (%)</b>	<b>92,83</b>	<b>0,14</b>	<b>7,04</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Perda RTRW Kota Solok 2012-2031

Sungai utama yang mengalir di Kota Solok adalah Batang Lembang. Sungai ini mempunyai mata air di Bukit Barisan di bagian tenggara Kota Solok dan mengalir ke arah utara di bagian tengah Kota Solok sampai akhirnya bermuara di danau Singkarak. Kondisi morfologi yang berkelok, adanya penyempitan dan sedimentasi di beberapa tempat, serta besarnya debit yang mengalir menyebabkan sungai Batang Lembang ini sering meluap dan menyebabkan banjir hampir di sebagian besar wilayah Kota Solok.

Dari arah utara mengalir sungai Batang Binguang yang bermata air di Bukit Bais dan terus mengalir ke arah Kota Solok dan bertemu dengan sungai Batang Lembang tepat di Kelurahan IV Suku. Sungai Batang Binguang ini mempunyai kemiringan yang relatif tajam karena melalui daerah-daerah yang berbukit di bagian utara Kota Solok. Ketika elevasi muka air di Batang Lembang cukup tinggi aliran dari Batang Binguang seringkali terhambat karena adanya aliran balik (*back water*) dari Batang Lembang menuju Batang Binguang, sehingga menyebabkan terjadinya luapan di sekitar Batang Binguang di Kelurahan Nan Balimo dan Kampung Jawa.

Dari sebelah timur mengalir sungai Banda Simo dan sungai Banda Payo yang bermata air di Gunung Talang. Sungai ini mengalir ke arah barat dan bertemu dengan sungai Batang Binguang di bagian timur Kota Solok. Kapasitas penampang kedua sungai ini relatif kecil dan tidak dapat menampung debit yang mengalir dari wilayah perbatasan Kota Solok bagian timur sehingga seringkali menyebabkan terjadinya luapan di Kelurahan Simpang Rumbio dan Pasar Pandan Air Mati.

Selain itu di bagian selatan Kota Solok juga mengalir sungai Batang Gawan dan anak sungainya, yaitu sungai Taratak. Kemiringan dasar sungai yang sangat landai menyebabkan ke dua sungai ini tidak dapat menampung debit air yang berasal dari lahan pertanian di bagian selatan serta meluap dan menggenangi wilayah-wilayah di sekitarnya. Beberapa wilayah yang sering terendam antara lain adalah Tanah Garam yang terletak di antara sungai Batang Gawan dan sungai Taratak.

**Tabel 2.4**  
**Nama dan Panjang Sungai di Kota Solok**

No	Sungai Utama	Panjang (m) *)
1	Batang Lembang	9.868
2	Batang Buluh	1.432
3	Batang Binguang	7.740
4	Batang Simo	900
5	Banda Payo	2.536
6	Batang Gawan	3.165
7	Batang Taratak	2.376
8	Banda Imang Payo	4.035

Keterangan: \*) panjang sungai yang masuk wilayah Kota Solok  
Sumber : SI dan DD Drainase Kota Solok

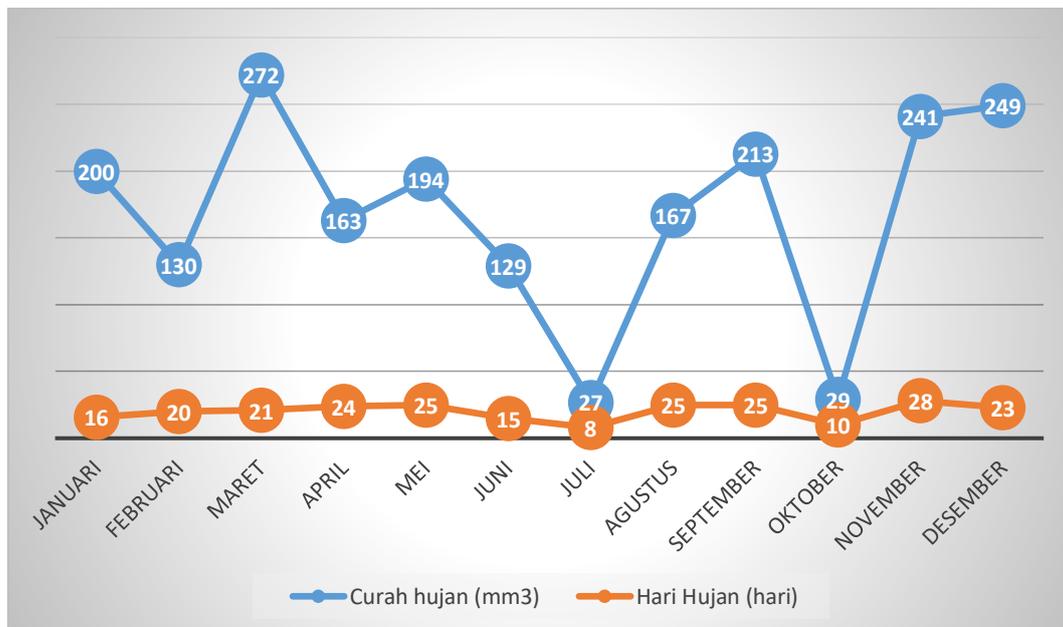
Kota Solok memiliki sumberdaya alam yang terbatas terutama sumberdaya alam non hayati yang dapat dieksplorasi seperti bahan tambang/mineral. Saat ini Kota Solok hanya mempunyai bahan galian tambang tipe C seperti deposit pasir, batu dan kerikil yang diambil dari daerah aliran sungai yang telah banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan.

Meskipun potensi sumber daya alamnya sangat kecil, namun bila dikelola dengan baik, potensi yang ada dapat dikembangkan seperti:

- Lahan yang kurang produktif yang terdiri dari semak, alang-alang, tegalan/ladang seluas 1.034,77 Ha dapat dijadikan areal perkebunan.
- Cadangan tanah liat mencapai 27.250.000 m<sup>3</sup> yang dapat digunakan untuk bahan baku genteng dan gerabah.
- Objek wisata alam Pulau Belibis, Sarasah Batimpo dan Kawasan Batu Patah Payo dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional.
- Letak Kota Solok yang sangat strategis pada kawasan andalan Solok dan sekitarnya (Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto) dapat dikembangkan sebagai kota pengumpul dan distribusi produk dari daerah *Interland*.

**Gambar 2.2**

**Rata-Rata Curah Hujan Di Kota Solok Tahun 2017**



Sumber: Kota Solok Dalam Angka 2018

Untuk rata-rata curah hujan Kota Solok terendah pada tahun 2017 terjadi di bulan Juli sebesar 27 mm<sup>3</sup>/hari dan Oktober sebesar 29 mm<sup>3</sup>/hari. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi di bulan Maret, November dan Desember dimana besaran curah hujan berturut-turut 272 mm<sup>3</sup>/hari, 249 mm<sup>3</sup>/hari, dan 241 mm<sup>3</sup>/hari. Fluktuasi curah hujan dalam satu tahun dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Besaran curah hujan sangat mempengaruhi aktifitas pertanian di suatu wilayah. Jika dilihat rata-rata besaran curah hujan di Kota Solok yang tergolong tinggi, maka kondisi hujan di Kota Solok sangat mendukung aktifitas pertanian sawah kering. Berdasarkan tabel 2.5, luasan sawah di Kota Solok didominasi oleh sawah kering seluas 4.256,60 ha atau sebesar 82,95% dari luas keseluruhan lahan sawah. Sawah kering terluas di Kota Solok terdapat di Kelurahan Tanah Garam mencapai luas 1,811,80 ha atau 35,31% dari keseluruhan luas sawah yang ada di Kota Solok.

**Tabel 2.5**  
**Luas Lahan Sawah Basah dan Sawah Kering di Kota Solok Tahun 2017**

No	KECAMATAN	Sawah Basah		Sawah Kering		Jumlah
		ha	%	ha	%	
<b>A</b>	<b>LUBUK SIKARAH:</b>	<b>685,50</b>	<b>13,36</b>	<b>2298,60</b>	<b>44,79</b>	<b>2.984,10</b>
1	Tanah Garam	312,60	6,09	1811,80	35,31	2.124,40
2	VI Suku	80,60	1,57	207,50	4,04	288,10
3	Sinapa Piliang	24,00	0,47	29,50	0,57	53,50
4	IX Korong	93,00	1,81	45,00	0,88	138,00
5	Kampai Tabu Kerambil	34,50	0,67	69,00	1,34	103,50
6	Aro IV Korong	49,00	0,95	55,80	1,09	104,80
7	Simpang Rumbio	91,80	1,79	80,00	1,56	171,80
<b>B</b>	<b>TANJUNG HARAPAN:</b>	<b>189,3</b>	<b>3,69</b>	<b>1958</b>	<b>38,16</b>	<b>2.147,30</b>
1	Koto Panjang	0,00	0,00	21,00	0,41	21,00
2	Pasar Pandan Air Mati	0,00	0,00	64,00	1,25	64,00
3	Tanjung Paku	66,20	1,29	116,00	2,26	182,20
4	Nan Balimo	60,80	1,18	643,00	12,53	703,80
5	Kampung Jawa	20,10	0,39	350,00	6,82	370,10
6	Laing	42,20	0,82	764,00	14,89	806,20
<b>Kota Solok</b>		<b>874,80</b>	<b>17,05</b>	<b>4.256,60</b>	<b>82,95</b>	<b>5.131,40</b>

Sumber: Kota Solok Dalam Angka 2018

### 2.1.2. Demografis

Jumlah penduduk di Kota Solok tahun 2017 mencapai 72.927 jiwa. Sebagian besar penduduk bermukim di Kelurahan Tanah Garam sejumlah 15.202 jiwa. Meskipun jumlah penduduk terbanyak berada di Kelurahan Tanah Garam, namun kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> justru terdapat di Kelurahan Koto Panjang mencapai 103.05 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk kepadatan penduduk keseluruhan di Kota Solok mencapai 12.65 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk sex ratio, jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah Perempuan. Sex ratio mencapai 101,37% yang berarti terdapat 100-101 laki-laki diantara 100 perempuan.

Berdasarkan pertumbuhan penduduknya, maka rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Solok dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 1,92% yang bisa dikatakan masih relatif rendah. Jika dirinci per kelurahan maka pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kelurahan Laing yang mencapai 0,24%.

**Tabel 2.6**  
**Disribusi, Sex Ratio, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk**  
**di Kota Solok Tahun 2017**

No	KECAMATAN	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk per Km2	Laju Pertumbuhan Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
<b>A</b>	<b>LUBUK SIKARAH</b>	<b>20,198</b>	<b>19,737</b>	<b>39,935</b>	<b>102.34</b>	<b>11.41</b>	<b>0.08</b>
1	Tanah Garam	7,736	7,470	15,206	103.56	6.24	0.12
2	VI Suku	3,397	3,338	6,735	101.77	18.71	0.01
3	Sinapa Piliang	861	762	1,623	112.99	25.36	0.09
4	IX Korong	968	964	1,932	100.41	12.88	0.05
5	Kampai Tabu Kerambil	1,367	1,295	2,662	105.56	19.72	0.05
6	Aro IV Korong	1,588	1,626	3,214	97.66	25.71	0.05
7	Simpang Rumbio	4,281	4,282	8,563	99.98	37.23	0.06
<b>B</b>	<b>TANJUNG HARAPAN</b>	<b>16,513</b>	<b>16,479</b>	<b>32,992</b>	<b>100.21</b>	<b>14.57</b>	<b>0.09</b>
1	Koto Panjang	1,084	1,080	2,164	100.37	103.05	(0.06)
2	Pasar Pandan Air Mati	3,131	3,069	6,200	102.02	89.86	0.04
3	Tanjung Paku	3,027	3,123	6,150	96.93	26.17	(0.01)
4	Nan Balimo	4,488	4,382	8,870	102.42	11.69	0.14
5	Kampung Jawa	4,018	4,073	8,091	98.65	22.17	0.21
6	Laing	765	752	1,517	101.73	1.86	0.24
<b>Kota Solok</b>		<b>36,711</b>	<b>36,216</b>	<b>72,927</b>	<b>101.37</b>	<b>12.65</b>	<b>0.08</b>

Sumber: Disduk Capil Kota Solok, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelurahan dengan kepadatan paling tinggi adalah kelurahan Koto Panjang dengan kepadatan 103 jiwa/Ha. Hal ini disebabkan karena Koto Panjang merupakan wilayah pusat kota dan pusat perdagangan (Pasar Raya) sehingga kepadatan perumahan di kelurahan ini juga sangat tinggi. Di samping itu, Kelurahan Koto Panjang merupakan kelurahan dengan luas paling kecil di Kota Solok sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk per-hektar semakin tinggi. Sedangkan kelurahan dengan kepadatan penduduk paling kecil adalah Kelurahan Laing dengan kepadatan 2 jiwa/Ha. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah kelurahan Laing berupa hutan dan perumahan kepadatan rendah.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk Kota Solok Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	3.179	2.983	6.162
5-9	3.742	3.493	7.235
10-14	3.541	3.468	7.009
15-19	3.610	3.298	6.908
20-24	3.239	3.096	6.335
25-29	2.743	2.890	5.633
30-34	3.031	3.035	6.066
35-39	2.944	2.890	5.834
40-44	2.598	2.470	5.068
45-49	2.127	2.090	4.217
50-54	1.761	1.937	3.698
55-59	1.544	1.506	3.050
60-64	1.207	1.220	2.421
65-69	673	697	1.370
70-74	323	452	775
75-80	286	413	699
>80	169	278	447
<b>Jumlah/Total</b>	<b>36.711</b>	<b>36.216</b>	<b>72.927</b>
<b>Usia Produktif</b>	<b>24.798</b>	<b>24.432</b>	<b>49.230</b>
<b>(15-64)</b>	<b>67,54</b>	<b>67,46</b>	<b>67,50</b>

Sumber: Disduk Capil Kota Solok, 2018

Berdasarkan tabel 2.7 jika dilihat berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) mencapai 49.230 jiwa atau sebesar 67,50% dari total jumlah penduduk. Angka ketergantungan (dependency ratio) tahun 2017 Kota Solok memiliki angka ketergantungan sebesar 48,13%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan tidak produktif.

## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan yang dilaksanakan setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan yang penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Solok.

### **A. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Berikut tabel perkembangan IPM Kota Solok tahun 2013-2017 dengan metode baru:

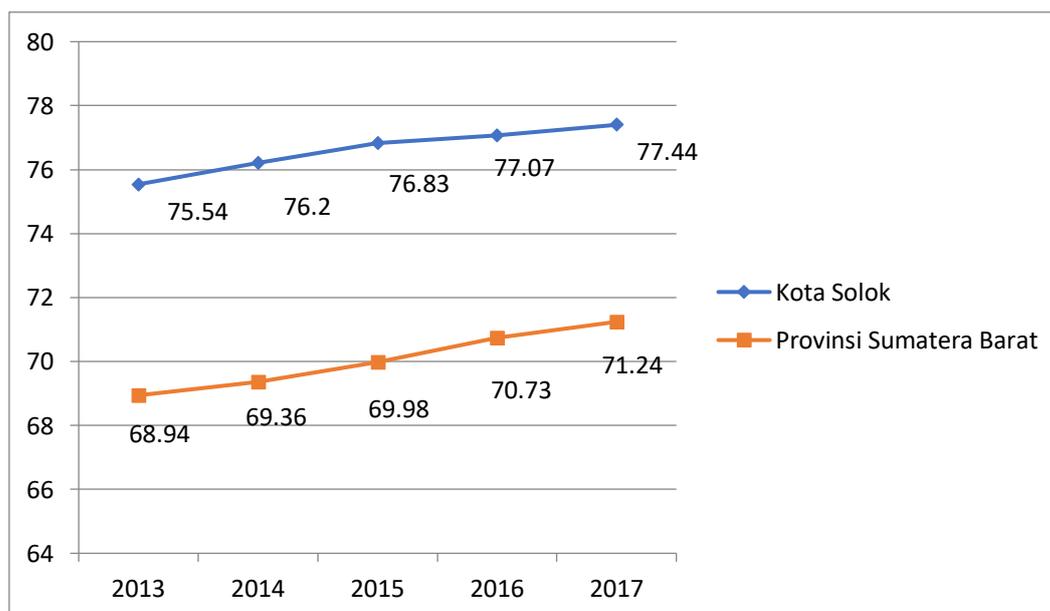
**Tabel 2.8**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Solok Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1	Angka Harapan Hidup	72.33	72.34	72.74	72,83	72,92	Tahun
2	Harapan Lama Sekolah	13.75	14.26	14.27	14,28	14,29	Tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah	10.72	10.75	10.76	10,79	10,95	Tahun
4	Pengeluaran per kapita	10.784	10.972	11.350	11.519	11,673	Rp./hari
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		<b>75,54</b>	<b>76,2</b>	<b>76,83</b>	<b>77,07</b>	<b>77,44</b>	

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Secara umum pembangunan manusia di Kota Solok selama kurun waktu 2013-2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, IPM Kota Solok adalah sebesar 75,54 dan secara perlahan naik mencapai 77,44 di tahun 2017. Dengan nilai IPM sebesar 77,44 maka Kota Solok termasuk dalam klasifikasi menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat.

**Gambar 2.3**  
**Perbandingan IPM Kota Solok dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan gambar 2.3 di atas dapat dilihat bahwa IPM Kota Solok secara umum berada di atas Provinsi Sumatera Barat pada semua komponen penyusun IPM. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, IPM Kota Solok berada pada posisi nomor 4 setelah Kota Padang (81,06), Kota Bukittinggi (79,11), dan Kota Payakumbuh (77,56). Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah:

**Tabel 2.9**  
**Perbandingan IPM dan Komponen Penyusunnya**  
**di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017**

Wilayah	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita (000/thn)	IPM
Kepulauan Mentawai	64.37	12.07	6.69	6010	59.25
Pesisir Selatan	70.23	13.06	8.13	8819	68.74
Kab.Solok	67.65	13,01	7.6	9743	67.86
Sijunjung	65.44	12.34	7.72	10.093	66.6
Tanah Datar	69.11	13.59	8.14	10.331	70.37
Padang Pariaman	67.96	13.56	7,21	10.579	68.9
Agam	71.57	13.94	8.39	9.388	71.1
Lima Puluh Kota	69.31	13.26	7.96	9.151	68.69
Pasaman	66.54	12.72	7.65	7.882	64.94
Solok Selatan	66.92	12.68	8	9.891	67.81
Dharmasraya	70.44	12.4	8.24	10.851	70.4
Pasaman Barat	67.15	13.06	7.85	8.704	66.83
Padang	73.2	16.15	11.32	13.957	81.58
<b>Kota Solok</b>	<b>72.9</b>	<b>14.3</b>	<b>11</b>	<b>11.673</b>	<b>77.4</b>
Sawahlunto	69.39	13.14	9.93	9.343	71.13
Padang Panjang	72.46	15.03	11.43	10.240	77.01
Bukittinggi	73.69	14.94	11,3	12.816	79.8
Payakumbuh	73.13	14.23	10.45	12.858	77.91
Pariaman	69.67	14.51	10.1	12.425	75.71
<b>SUMATERA BARAT (Provinsi)</b>	<b>68.78</b>	<b>13.94</b>	<b>8.59</b>	<b>10.306</b>	<b>71.24</b>

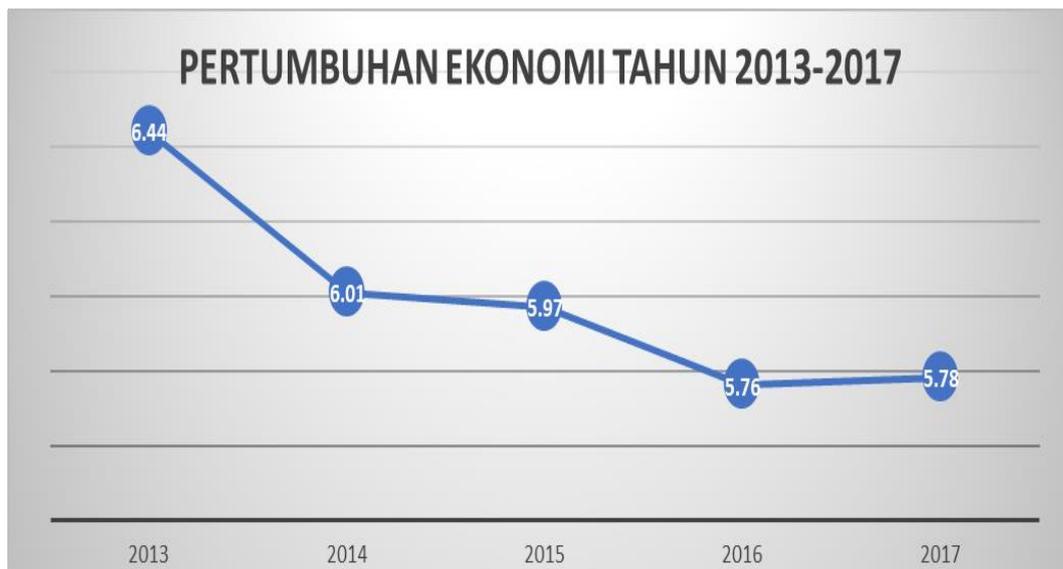
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (diolah)

## B. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan, bila seluruh balas jasa *riil* terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar, daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, jika pendapatan *riil* masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan *riil* masyarakat pada tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha. Berikut ini dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok selama kurun waktu 2013-2017;

**Gambar 2.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Tahun 2013 - 2017**



Sumber : BPS Kota Solok (Data diolah)

Sebagaimana terlihat pada gambar 2.4 bahwa kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok dalam kurun waktu 2013 - 2016 mengalami perlambatan, dan mulai meningkat pada tahun 2017. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kecenderungan perkembangan ekonomi regional maupun global yang juga sedang mengalami perlambatan, seiring dengan adanya penurunan tingkat konsumsi swasta, akibat masih lemahnya daya beli, terbatasnya realisasi investasi sebagai akibat perilaku *wait and see* pelaku usaha, serta minimnya realisasi belanja pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan sektor-sektor pembentuk PDRB itu sendiri. Perkembangan sektor-sektor Pembentuk PDRB Kota Solok dari tahun 2013-2017 dapat kita lihat dari tabel 2.10 berikut:

**Tabel 2.10**  
**PDRB Sektoral Kota Solok Tahun 2013-2017**

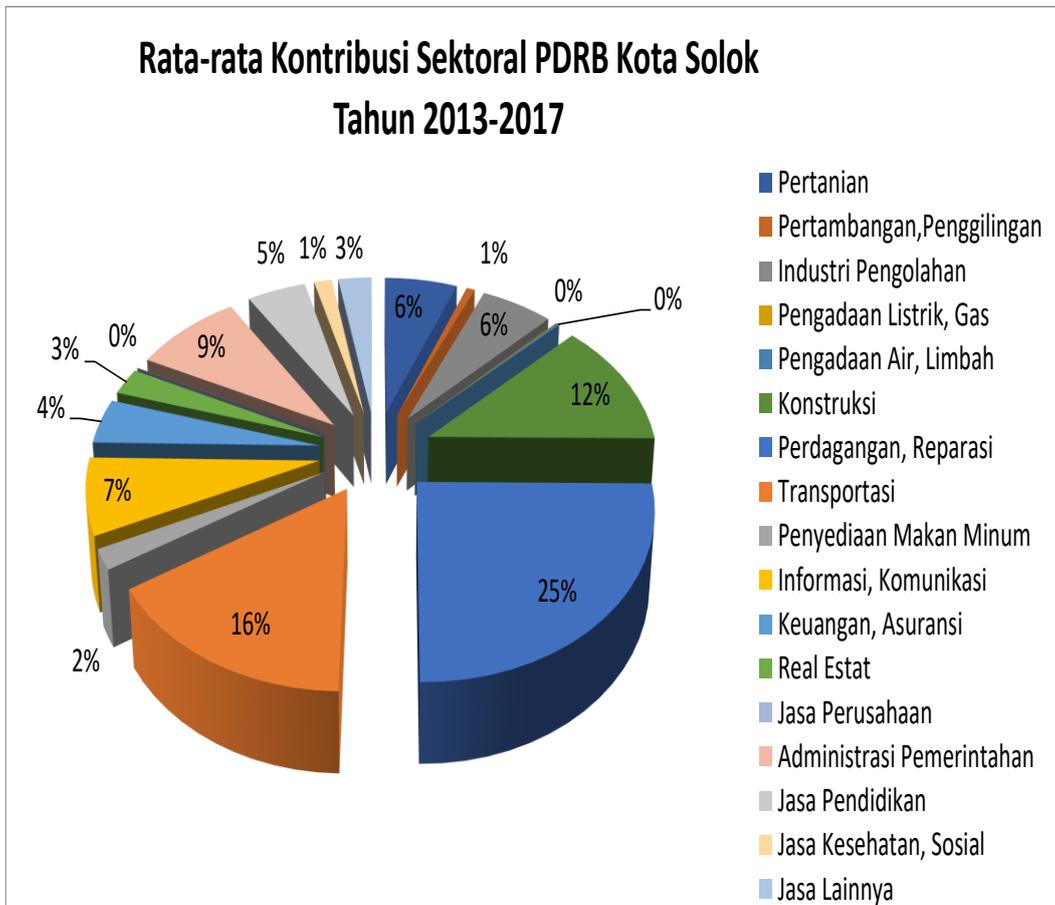
Lapangan Usaha PDRB	2013		2014		2015		2016		2017	
	PDRB	(%)								
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	130.238,76	6,34	133.745,14	6,14	137.437,43	5,96	140.487,95	6,09	142.810,98	5,53
Pertambangan, Penggalian	13.944,59	0,68	14.830,95	0,68	15.741,89	0,68	16.455,16	0,71	16.606,92	0,64
Industri Pengolahan	125.582,58	6,11	130.453,04	5,99	134.941,39	5,85	142.853,86	6,19	144.262,97	5,59
Pengadaan Listrik dan Gas	1.053,61	0,05	1.207,49	0,06	1.257,67	0,05	1.384,67	0,06	1.442,92	0,06
Pengadaan Air, Daur Ulang	4.421,78	0,22	4.537,12	0,21	4.708,98	0,20	4.889,19	0,21	5.078,07	0,20
Konstruksi	255.675,27	12,45	270.684,60	12,43	284.913,96	12,35	299.535,33	12,98	320.111,17	12,40
Perdagangan, Reparasi	513.802,32	25,02	547.955,25	25,17	579.405,08	25,11	611.879,73	26,52	646.186,81	25,03
Transportasi, Pergudangan	310.676,59	15,13	337.075,62	15,48	365.719,15	15,85	393.689,04	17,06	424.207,18	16,43
Akomodasi, Makan Minum	39.013,56	1,90	41.626,74	1,91	44.515,61	1,93	47.721,26	2,07	50.996,79	1,98
Informasi, Komunikasi	141.650,29	6,90	154.595,38	7,10	169.929,29	7,37	184.365,76	7,99	201.183,69	7,79
Keuangan, Asuransi	89.807,31	4,37	94.974,01	4,36	100.644,77	4,36	108.077,72	4,68	110.289,60	4,27
Real Estat	55.311,90	2,69	58.283,14	2,68	60.382,09	2,62	62.580,54	2,71	65.539,31	2,54
Jasa Perusahaan	340,70	0,02	352,70	0,02	375,58	0,02	398,66	0,02	421,33	0,02
Pemerintahan, Jaminan Sosial	189.736,32	9,24	193.472,83	8,89	199.901,86	8,66	205.772,19	8,92	214.396,67	8,31
Jasa Pendidikan	97.178,52	4,73	102.612,07	4,71	109.983,05	4,77	117.422,31	5,09	128.206,28	4,97
Jasa Kesehatan, Keg Sosial	29.643,24	1,44	31.872,29	1,46	34.253,62	1,48	35.523,19	1,54	37.982,79	1,47
Jasa Lainnya	55.822,69	2,72	59.090,17	2,71	63.141,95	2,74	67.162,31	2,91	71.468,18	2,77
<b>PDRB</b>	<b>2.053.900,00</b>	<b>100</b>	<b>2.177.368,50</b>	<b>100</b>	<b>2.307.253,40</b>	<b>100</b>	<b>2.440.198,90</b>	<b>100</b>	<b>2.581.191,70</b>	<b>100</b>

Sumber data: BPS Kota Solok (Data diolah)

Dari 17 kategori atau sektor-sektor pembentuk PDRB Kota Solok tahun 2013-2017 dapat dilihat bahwa sektor yang dominan berkontribusi adalah sektor perdagangan dan reparasi lebih kurang 25%. Selanjutnya adalah sektor transportasi dengan kontribusi lebih kurang 15% dan sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 12%. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi relatif kecil, dibawah 1% adalah sektor pertambangan, sektor pengadaan listrik, sektor pengadaan air dan sektor jasa perusahaan.

Rata-rata Kontribusi setiap sektor pembentuk PDRB Kota Solok Tahun 2013-2017 dapat kita lihat pada gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.5



Sumber Data: BPS Kota Solok (Data diolah)

Berdasarkan rata-rata kontribusi PDRB Kota Solok tahun 2017, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan cukup dominan terhadap pembentukan PDRB. Jika dilihat pertumbuhan masing-masing sektor bahwa pada kurun waktu 2013-2017, sektor perdagangan sebagai sektor utama yang membangun PDRB, pertumbuhannya masih relatif kecil (6,11%). Perbandingan pertumbuhan rata-rata masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB Kota Solok tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut:

Gambar 2.6



Sumber Data: BPS Kota Solok (Data diolah)

Dari gambar 2.6 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB Tahun 2013-2017 sebesar 5,99% yang didominasi oleh sektor perdagangan, reparasi; sektor transportasi, pergudangan dan sektor konstruksi. Terdapat delapan sektor yang kurang dominan berpengaruh terhadap rata-rata pertumbuhan sektor PDRB yang masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhannya.

Upaya untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota adalah dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor yang dominan dalam membentuk PDRB. Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ), didapat hasil bahwa sektor perdagangan merupakan sektor basis Kota Solok dengan nilai LQ >1. Pada tabel 2.11 dapat dilihat nilai LQ sektor perdagangan Kota Solok.

**Tabel 2.11**  
**Nilai Location Quotient (LQ) Kota Solok Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai LQ	1.88	1.89	1.88	1.85	1.81

*Sumber Data: BPS Kota Solok (Data diolah)*

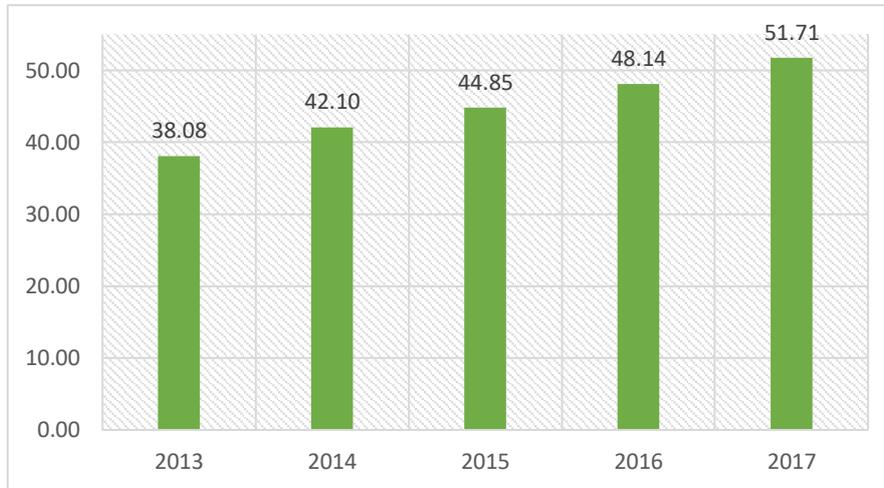
*Location* Quotient (LQ) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis sektor potensial atau basis dalam perekonomian di suatu daerah. Sektor unggulan yang berkembang dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Hasil perhitungan LQ ini hanya digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi suatu daerah. Nilai LQ besar dari 1 menyatakan bahwa sektor tersebut dapat dijadikan sektor basis dalam mendorong pertumbuhan suatu daerah.

Strategi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi memberikan penekanan pada sektor-sektor yang dianggap penting untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan formulasi LQ, untuk Kota Solok yang berpengaruh kuat adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan ini nantinya diharapkan dapat menjadi pendorong sektor lainnya. Melalui penerapan strategi ini, tercipta penekanan produksi di Kota Solok yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahterannya. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka secara langsung akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk kebutuhannya akan barang dan jasa.

### **C. PDRB per Kapita**

Pendapatan per kapita atau PDRB per kapita atas dasar harga berlaku merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro di Kota Solok, yang pada kurun waktu 2013-2017 memperlihatkan kecenderungan peningkatan, berkisar Rp 38,08 juta pada tahun 2013 menjadi Rp 51,71 juta pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan yang ada di Kota Solok memberikan efek positif terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakatnya. Secara lengkap terlihat pada gambar 2.7 :

**Gambar 2.7**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Solok Tahun 2013 - 2017**  
**(dalam Juta Rupiah)**

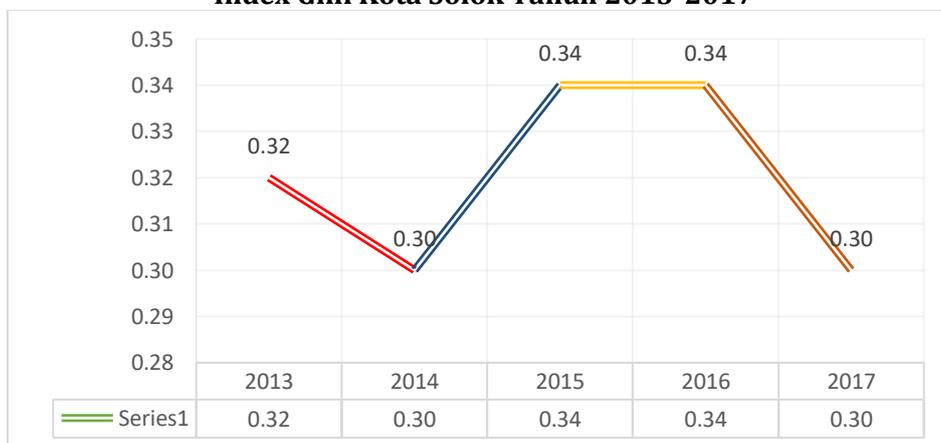


Sumber : BPS Kota Solok

#### D. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan suatu ukuran untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Gambar di bawah memperlihatkan perkembangan index gini Kota Solok dari tahun 2013-2017.

**Gambar 2.8**  
**Index Gini Kota Solok Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan gambar di atas, bahwa selama kurun waktu 2013-2017, indeks gini Kota Solok memiliki kecenderungan menurun walaupun distribusinya berfluktuasi. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi peningkatan ketimpangan pada tahun 2015 dimana meningkat dari 0,3 pada tahun 2014 menjadi 0,34 pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2017 terjadi penurunan Indeks Gini Kota Solok menjadi 0,30. Secara umum Indeks Gini Kota Solok berada dibawah 0,4 ( $GR < 0,4$ ), hal ini menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kota Solok dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.

#### E. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin di Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

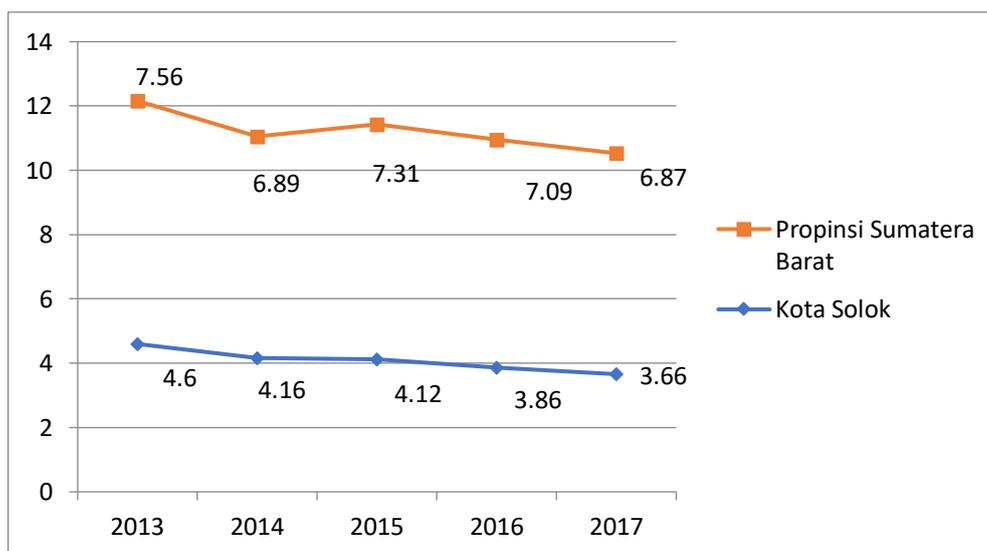
**Tabel 2.12**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Solok**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu jiwa)	Persentase
2013	342.001,-	2,90	4,60
2014	356.078,-	2,71	4,16
2015	370.229,-	2,72	4,12
2016	385.781,-	2,59	3,86
2017	413.297,-	2,50	3,66

Sumber : BPS Kota Solok

Berdasarkan tabel 2.12 di atas, jumlah penduduk miskin di Kota Solok cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2017. Jika pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin ada 2,90 ribu jiwa, menurun di tahun 2017 jadi 2,50 ribu jiwa penduduk miskin. Hal ini menunjukkan *trend* yang baik didukung dengan garis kemiskinan di Kota Solok yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 pada Rp342.001/kapita/bulan, menjadi Rp413.297,-/kapita/bulan di tahun 2017. Informasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran yang harus dikeluarkan penduduk baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan yang bisa disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga bahan pokok tertentu. Pengeluaran yang meningkat namun jumlah penduduk miskin semakin rendah mengindikasikan tingkat kemampuan daya beli penduduk di Kota Solok yang membaik. Garis kemiskinan di Kota Solok mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sesuai dengan laju inflasi.

**Gambar 2.9**  
**Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Solok**  
**Terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017**



Sumber : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2018 (diolah)

Jika dibandingkan dengan perkembangan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Solok dari tahun 2013-2017 berada di bawah angka kemiskinan Provinsi. Hal ini menunjukkan kinerja pengentasan kemiskinan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, dimana pada tahun 2017 posisi Kota Solok nomor dua setelah Kota Sawahlunto dengan angka kemiskinan terendah.

**Tabel 2.13**  
**Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017**

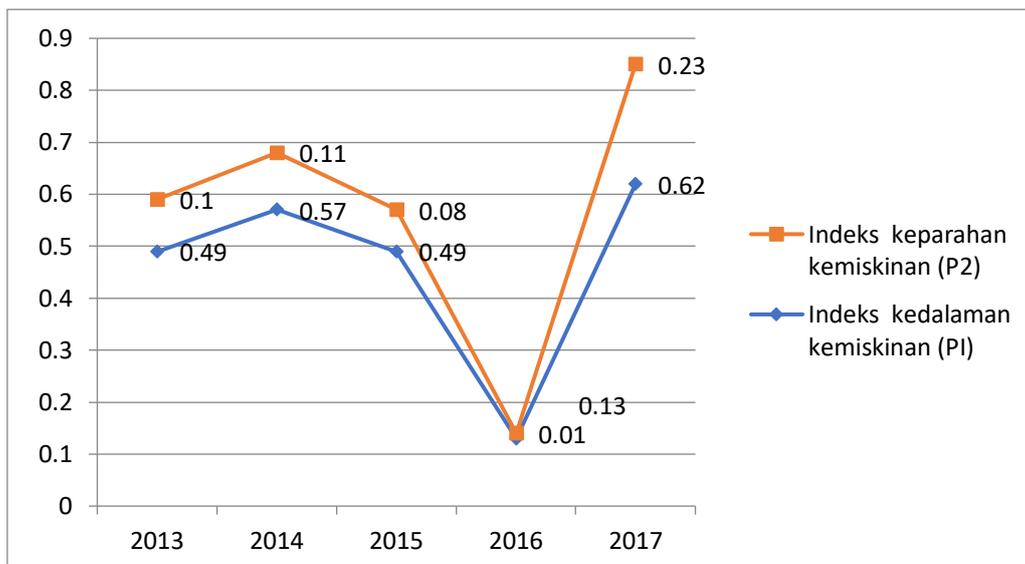
Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kepulauan Mentawai	16.12	14.96	15.52	15.12	14.67
Pesisir Selatan	8.64	7.82	8.46	7.92	7.79
Kab.Solok	10.26	9.53	10	9.32	9.06
Sijunjung	8.53	7.74	7.87	7.60	7.35
Tanah Datar	5.77	5.29	5.82	5.68	5.56
Padang Pariaman	9.17	8.39	8.86	8.91	8.46
Agam	7.68	7.02	7.58	7.83	7.59
Lima Puluh Kota	8.26	7.48	7.65	7.59	7.15
Pasaman	8.37	7.60	8.14	7.65	7.41
Solok Selatan	8.12	7.33	7.52	7.35	7.21
Dharmasraya	7.74	6.97	7.17	7.16	6.68
Pasaman Barat	7.86	7.08	7.93	7.40	7.26
Padang	5.02	4.56	4.93	4.68	4.74
<b>Kota Solok</b>	<b>4.60</b>	<b>4.16</b>	<b>4.12</b>	<b>3.86</b>	<b>3.66</b>
Sawahlunto	2.28	2.25	2.22	2.21	2.01
Padang Panjang	6.66	6.40	6.74	6.75	6.17
Bukittinggi	5.36	4.96	5.36	5.48	5.35
Payakumbuh	7.81	7.01	6.67	6.46	5.88
Pariaman	5.35	5.12	5.42	5.23	5.20
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>7.56</b>	<b>6.89</b>	<b>7.31</b>	<b>7.09</b>	<b>6.87</b>

*Sumber Data : badan Pusat Statistik*

Kota Solok terletak di perlintasan jalan ke kabupaten/kota lain dan memiliki pasar yang menjadi tujuan daerah-daerah sekitarnya, dimana terjadi penambahan penduduk yang signifikan terjadi setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan pengentasan masalah kependudukan menjadi lebih kompleks. Walaupun persentase penduduk miskin Kota Solok masih lebih tinggi dari Sawahlunto, namun capaian persentase penurunan angka kemiskinan Kota Solok setiap tahunnya lebih banyak/signifikan dibandingkan Kota Sawahlunto.

Selain garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan, tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan juga perlu menjadi perhatian dalam program pengentasan kemiskinan. Pada gambar berikut ini dapat dilihat perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kota Solok dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

**Gambar 2.10**  
**Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan**  
**Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kota Solok Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Kota Solok (data diolah)

Berdasarkan gambar 2.10 di atas dapat dijelaskan bahwa indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Atau dengan kata lain P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin atau Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini memberikan informasi yang saling melengkapi dalam tingkat pembahasan kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai tingkat kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Dari gambar 2.10 di atas terlihat adanya penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan jika nilai indeks semakin tinggi, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Di Kota Solok dapat dijelaskan bahwa nilai indeks P1 tahun 2013 sebesar 1,49 dan pada tahun 2017 sebesar 0,1. Berdasarkan nilai indeks ini dapat disimpulkan bahwa Kota Solok dalam mengelola kemiskinan masih harus berupaya maksimal untuk meningkatkan tingkat pendapatan penduduk miskin.

#### F. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan kemampuan penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan terbukanya lapangan kerja. Pada saat ini di Kota Solok penduduk yang bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut:

**Tabel 2.14**  
**Kesempatan Kerja Kota Solok Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk yang bekerja	24.990	26.440	29.277	-	30.226
Pengangguran Terbuka	1.483	1.834	1.449	-	1.889
Jumlah Angkatan Kerja	26.473	28.274	30.726	-	32.115
Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)	94,40	93,51	95,28	-	94,12
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,60	6,49	4,72	-	5,88

Sumber : data Sakernas 2013 – 2017 (diolah) BPS

Dari tabel 2.14 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, 94,12% dari angkatan kerja yang ada di Kota Solok telah memperoleh kesempatan kerja, sedangkan 5,88% nya masih belum bekerja (pengangguran terbuka). Hal ini tentu perlu menjadi perhatian dalam menciptakan peluang-peluang lapangan kerja atau kesempatan kerja baru sehingga dapat berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di Kota Solok.

### 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

#### 1. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai jenjang SLTA bagi semua masyarakat daerah, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan.

Pembangunan pendidikan mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan di Kota Solok. Hal ini ditunjukkan oleh penyediaan anggaran pembangunan bidang pendidikan selama kurun waktu (2010-2015) yang mencapai lebih dari 20% dari keseluruhan belanja daerah. Ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam alokasi anggaran pendidikan dari APBN/APBD. Melalui komitmen ini juga diwujudkan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah gratis tanpa memungut biaya.

Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi. Berikut data perkembangan tingkat partisipasi masyarakat.

**Tabel 2.15**  
**Perkembangan Tingkat Partisipasi Masyarakat**  
**di Kota Solok Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1	<b>APS</b>						
	SD	98.84	99.11	99.54	100	100	%
	SMP	89.73	97.50	97.10	98.49	96.8	%
2	<b>APK</b>						
	SD	99.02	99.11	95,25	110,1	108,8	%
	SMP	107.1	109,5	110,10	101,3	103,4	%

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
3	APM						
	SD	75,37	79,15	83,58	95,3	94,6	%
	SMP	85,79	95,96	101,29	83,6	81,2	%

Sumber data : Badan Pusat Statistik dan Neraca Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Berdasarkan tabel 2.15 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi dapat dilihat dari APS, APK dan APM yang memperlihatkan *trend* peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan tingkat SMP/MTS di Kota Solok dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan. Di tingkat SD/MI tahun 2016 dan 2017 telah mencapai 100%. Hal ini menggambarkan semua penduduk Kota Solok usia 7-12 tahun telah bersekolah di tingkatan SD/MI, pencapaian ini didukung dengan pelaksanaan pendidikan non formal (Paket A) karena sejak tahun 2009 pendidikan non formal (paket A, Paket B dan Paket C) telah menjadi perhitungan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan Angka Partisipasi sekolah tingkat SMP/MTS usia 13-15 tahun kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, kecenderungan persentase APS meningkat sampai tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya anak sekolah yang masih berusia 13-15 yang berhenti sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tetapi angka tersebut hanya memperhitungkan jumlah murid yang ditampung di setiap jenjang sekolah. Oleh karena itu untuk melihat lebih detailnya gambaran tingkat partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Berdasarkan tabel 2.15 di atas terlihat pada dua tahun terakhir nilai APK SD dan SMP sudah diatas 100%. Hal ini menggambarkan jumlah murid yang bersekolah di jenjang SD dan SMP/MTS/Sederajat lebih besar dari jumlah penduduk Kota Solok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Hal ini dapat diartikan masih terdapat siswa yang bersekolah di jenjang SD dan SMP/MTS yang tidak sesuai dengan Umur (7-12 tahun dan 13-15 tahun), terlihat dengan Angka Partisipasi Murni APM tingkat SD yang rata-rata berkisar 94 -95 % dan ditingkat SMP yang rata - rata berkisar dari 81 – 84 %, serta faktor- faktor lain seperti penduduk Kota Solok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah diluar Kota Solok dan tidak bersekolah.

Untuk melihat gambaran mutu pendidikan Kota Solok dapat kita lihat dari angka kelulusan siswa setiap tahun dan juga dari hasil Ujian Nasional yang dilaksanakan untuk tingkat SMP, seperti terlihat pada tabel 2.16 di bawah ini :

**Tabel 2.16**  
**Angka Kelulusan Kota Solok Tahun 2013- 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	99,9	100	%
2	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,77	99,6	100	100	100	%

Sumber : Neraca Pendidikan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan RI dan Dinas Pendidikan Kota Solok

**Tabel 2.17**  
**Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP Kota Solok Tahun 2015-2017**

NO	Nama Sekolah	Status	Jumlah Peserta	Rata-Rata UN		
				2015	2016	2017
1	SMP Negeri 1 Solok	Negeri	410	63,37	60.02	58.84
2	SMP Negeri 2 Solok	Negeri	361	56,28	55.37	53.72
3	SMP Negeri 3 Solok	Negeri	148	50,63	50.41	48.40
4	SMP Negeri 4 Solok	Negeri	177	52,24	53.24	51.73
5	SMP Negeri 5 Solok	Negeri	172	52,5	50.32	50.19
6	SMP Negeri 6 Solok	Negeri	138	48,57	49.75	49.51
7	MTS Negeri Solok	Negeri	255	52,53	52.24	49.23
8	MTS Muhammadiyah Solok	Swasta	80	56,98	52.78	54.56
9	SMP IT Iqra Kota Solok	Swasta	26	-	-	51.88
<b>Rata-Rata Nilai UN SMP</b>				<b>55.35</b>	<b>54.31</b>	<b>52.96</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa angka kelulusan di jenjang pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS dari tahun 2013 sampai 2017 cukup stabil dengan capaian angka kelulusan sangat baik yaitu rata-rata hampir mencapai 100% di tiap jenjang pendidikan dasar. Jika dilihat rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMP terlihat *trend* penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai UN pada tahun 2017 adalah meningkatnya standar nilai dan faktor perubahan model ujian dari UN berbasis kertas pensil ke UN berbasis

komputer (UNBK). Hal ini mengindikasikan bahwa ke depan pendidikan Kota Solok harus fokus kepada program peningkatan mutu pembelajaran.

### 1) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Angka putus sekolah menunjukkan persentase siswa untuk setiap tingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang tidak menyelesaikan pendidikannya.

Perkembangan angka putus sekolah di Kota Solok kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.18 di bawah :

**Tabel 2.18**  
**Angka Putus Sekolah Di Kota Solok Tahun 2013 - 2017**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1	SD/MI	NA	0,01	0,05	0,09	0,08	%
2	SMP/MTs	0,45	0,08	0,07	0,51	0,17	%
3	SMA/MA/SMK	0,89	1,50	1,24	1,84	-	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok dan Neraca Pendidikan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dari tabel 2.18 di atas terlihat bahwa perkembangan angka putus sekolah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup rendah. Pada tingkat SD/MI angka putus sekolah meningkat dari tahun ketahun. Sementara data 2 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang sama namun telah menunjukkan kondisi positif dengan angka putus sekolah yang relatif sedikit.

### 2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Berikut beberapa capaian pembangunan bidang kesehatan di Kota Solok.

### a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Penilaian terhadap angka kelangsungan hidup bayi adalah berdasarkan rumus  $AKHB = 1 - AKB$  (AKB=Angka Kematian Bayi) dimana 1 = per 1000 kelahiran. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi berumur dibawah 1 tahun selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat/ tingkat kesehatan dan kesejahteraan dimana angka kematian itu dihitung.

**Tabel 2.19**  
**Perkembangan AKB dan AKHB Kota Solok Tahun 2014 - 2017**

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
AKB (Per 1000 Kh)	10	7	9	7
Realisasi AKHB	990	993	991	993

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel 2.19 di atas terlihat bahwa AKHB di Kota Solok selama periode 2014–2017 berfluktuasi. Pada tahun 2014 realisasi AKHB 990 jiwa dan naik pada tahun 2015 menjadi 993 jiwa, pada tahun 2016 terjadi penurunan lagi sebesar 991 sedangkan pada tahun 2017 naik lagi menjadi 993 AKHB. Meskipun angka tersebut masih dibawah rata-rata nasional, tetapi untuk wilayah kota yang kecil seperti Kota Solok, angka ini masih cukup tinggi, sehingga perlu ditekan melalui berbagai upaya program kesehatan seperti melalui program-program imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak serta penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas.

### b. Persentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya (BB/TB) dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Masalah gizi umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya ketersediaan pangan, kurang baiknya sanitasi, kurangnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa faktor sosio-budaya sangat berperan dalam proses konsumsi pangan dan terjadinya masalah gizi. Kebiasaan makan keluarga dan susunan hidangannya merupakan salah satu manifestasi budaya keluarga, yang disebut gaya hidup. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi.

**Tabel 2.20**  
**Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/U dan BB/TB**  
**di Kota Solok Tahun 2014 - 2017**

Uraian		Tahun			
		2014	2015	2016	2017
Jumlah Balita Gizi Buruk (Jiwa)	BB/U	24	54	54	20
	BB/TB	2	6	6	12
jumlah Balita (jiwa)		5.801	5.687	5.687	7171
Prev Balita Gizi Buruk (%)	BB/U	0,41	0,95	0,95	0,29
	BB/TB	0,03	0,11	0,10	0,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel 2.20 di atas prevalensi gizi buruk pada kategori BB/U mengalami penurunan dari 0,95% pada tahun 2015 menjadi 0,29% pada tahun 2017, sedangkan pravalensi balita gizi buruk pada kategori BB/TB mengalami kenaikan dari 0,11% pada tahun 2015 menjadi 0,17% pada tahun 2017. Berkaitan dengan perolehan nilai angka prevalensi gizi buruk pada tahun 2017, Kota Solok termasuk daerah yang telah mengelola persoalan kesehatan khususnya yang menyangkut gizi buruk dengan baik. Hal ini terlihat dari angka prevalensi balita gizi buruk yang berada di bawah 10%.

### c. Pengendalian Penyakit Menular

Sebagai Kota yang berada di persimpangan, Kota Solok sangat rentan terhadap penyebaran penyakit menular baik penyakit menular langsung dan tidak langsung. Kondisi capaian upaya penanganan penyakit menular di Kota Solok dari tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel 2.21 sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Capaian Program dan Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular**  
**Kota Solok Tahun 2013 - 2017**

Indikator	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Cakupan Kelurahan UCI (%)	100	100	84,62	100	100	%
Penemuan penderita pneumonia Balita	40,68	71,79	41	39	33,6	%
Penanganan penderita diare	95	93,54	113	72	76	%
Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TB BTA +	43	45	35	42,30	44	%
Penemuan Kasus HIV/AIDS	4	2	4	3	8	kasus
Jumlah kasus DBD Yang Ditemukan dan Ditangani	26	50	96	84	44	kasus

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok*

Berdasarkan capaian program kesehatan dari tahun 2013 sampai 2017 yang terdapat pada tabel 2.21 di atas terlihat bahwa upaya kesehatan melalui penanggulangan penyakit menular terus mengalami perbaikan, tetapi karena dewasa ini banyaknya pengaruh media elektronik, menyebabkan terjadinya kerentanan dalam pola berpikir masyarakat terhadap persepsi kebutuhan imunisasi anak. Kota Solok yang juga berada dipersimpangan dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan pola hidup masyarakat yang sudah mulai bergeser pada sifat individual, menjadikan masyarakat rawan terhadap perkembangan penyakit menular. Perlu dilakukan terus upaya pembinaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi dan menekan kasus penyakit menular ini.

#### **d. Penyehatan Lingkungan**

Upaya penyehatan lingkungan terus menunjukkan peningkatan dengan terus berkembangnya akses sanitasi. Peningkatan akses air minum layak juga mengalami kenaikan, yaitu mencapai angka 94 %. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama yang baik dari semua sektor, tidak hanya dari kesehatan saja tapi juga oleh sektor PU, PDAM dan lain-lain. Berikut capaian program penyehatan lingkungan:

**Tabel 2.22**  
**Capaian Program dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan**  
**Kota Solok Tahun 2013 - 2017**

Indikator	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Cakupan air minum yang memenuhi syarat kesehatan	87,7	84,09	91,58	91,58	97,34	%
Akses jamban sehat	86,4	81,27	82,5	86,5	94,25	%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Meskipun capaian program dalam rangka perbaikan sanitasi ini terus mengalami perbaikan, tetapi belum mencapai target nasional akses terhadap air bersih dan jamban sehat sebesar 100%. Sehingga masih perlu dilakukan kajian dan upaya kesehatan bersama pihak terkait untuk mencapai target tersebut.

**e. Pengendalian Penyakit Tidak Menular( PPTM)**

Dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, terjadi pula perubahan gaya hidup, pola hidup dan mobilisasi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kecenderungan peningkatan kajadian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes dan lain-lain. Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular berdasarkan amanat dari UU 36/2009 tentang Kesehatan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untukmewujudkan derajat kesehatan masyarakatan yang menjadi investasi bagi pembangunan, RPJMN 2015-2019 yang dikenal sasaran pembangunan berupa NAWA CITA NO.5 yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia dan RENSTRA KEMENKES 2015-2019 yaitu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM).

Kota Solok dalam hasil Riset Kesehatan dasar (Riskesdas ) Tahun 2013 tingkat Provinsi Sumatera Barat termasuk pada rangking ke :

- 3 tertinggi prevalensi hipertensi 10,4 % ( Dibawah 50 Kota (14,5%) dan Kota Sawah Lunto (11,5%).
- 1 tertinggi prevalensi Asma 5,1%
- 6 tertinggi PPOK 3,7%.
- 4 tertinggi DM 1,6%
- 1 tertinggi Kanker 0,34%
- 7 tertinggi untuk PJK 0,6%
- 2 tertinggi prevalensi strock 1.27%
- 1 tertinggi prevalensi penyakit ginjal 0,4%

Kegiatan PPTM yang dilakukan adalah untuk pengendalian terhadap penyakit Hipertensi, Diabetes Melitus, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), Asma, Penyakit jantung Koroner (PJK), Stroke, Kanker Leher rahim dan Kanker Serviks. Hasil Pelayanan Penyakit Tidak Menular Di Kota Solok antara lain terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.23**  
**Target Dan Capaian Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Kota Solok Komulatif 2015 - 2017**

No	Puskesmas	2015	2016	2017	Satuan
1	Tanah Garam	191	176	702	jiwa
2	Tanjung Paku	131	154	609	jiwa
3	KTK	203	223	320	jiwa
4	Nan Balimo	80	94	248	jiwa
5	RSU Solok	50	-	-	jiwa
	<b>Kota Solok</b>	<b>655</b>	<b>647</b>	<b>1.879</b>	<b>jiwa</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Secara bertahap, Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan untuk penyakit tidak menular di kab/kota. Kementerian kesehatan menetapkan upaya gerakan bersama pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan penetapan Indikatornya yaitu tidak merokok, peningkatan konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik setiap hari, Cek kesehatan secara teratur. Bahkan kementerian kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan memberi perhatian besar terhadap penanggulangan penyakit tidak menular ini yaitu melalui penetapan indikator persentase masyarakat usia 15 – 59 tahun mendapatkan *screening* kesehatan, persentase penderita Hipertensi dan DM mendapatkan pengobatan sesuai standar dimana keseluruhan targetnya adalah 100%.

Kota Solok. Juga melakukan berbagai upaya, melalui melakukan pendeteksian faktor resiko penyakit tidak menular di pos binaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM), pemenuhan sarana prasarana pelayanan dan pendirian klinik berhenti merokok akhir tahun 2015.

Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah Posbindu PTM di Kota Solok dari 16 pada tahun 2014 menjadi 30 pada tahun 2017. Posbindu tidak saja dilakukan di masyarakat, tetapi juga dikembangkan di perkantoran, sekolah, di terminal dan untuk calon jemaah haji.

Diharapkan dengan berjalannya fungsi Posbindu dan memasyarakatnya Germas di hati masyarakat, penyakit tidak menular ini semakin bisa dikendalikan di Kota Solok.

**f. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia dan Perbaikan Gizi Masyarakat**

Upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, anak, remaja lansia dan perbaikan gizi masyarakat selama tahun 2011-2017 menunjukkan kinerja yang baik. Hampir semua ibu hamil, anak, remaja dan lansia tersentuh oleh pelayanan kesehatan. Semua kasus gizi buruk yang ditemukan juga tertangani hal ini tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.24**  
**Capaian Program dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak Remaja dan Lansia Kota Solok Tahun 2013 - 2017**

Indikator	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Angka Kematian Bayi	10	15	7	9	7	Per 1000 KH
Angka Kematian Ibu	-	81	75	146	0	Per 100.000 KH
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan	92,36	89,97	86,90	88,60	92,9	%
Cakupan kunjungan bayi	96,3	95,5	93,92	87	95	%
Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100	%
Cakupan pelayanan anak balita	87,5	91	91	77,2	98	%

Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kota Solok

Berbagai upaya kesehatan untuk mencapai program kesehatan tersebut telah dilakukan, tetapi perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga AKI dan AKB bisa terus ditekan dan tidak berfluktuasi setiap tahun.

#### g. Penyediaan Sumberdaya Manusia, Sarana Dan Prasarana Kesehatan

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2017 terus dilakukan pembenahan terhadap puskesmas dan jaringannya. Perluasan Puskesmas Tanah Garam dan Pelayanan Tumbuh Kembang Dan Laktasi, perluasan Instalasi Farmasi (Tahun 2011), pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel), penyediaan kendaraan roda 2 untuk operasional Poskeskel sebanyak 12 Unit (Tahun 2010), Sanitarian Kit, peralatan Puskesmas PONED Puskesmas Tanah Garam sehingga pada tahun 2013 Puskesmas Kota Solok memperoleh sertifikat ISO MM 9001: 2008 untuk 2 puskesmas yaitu Puskesmas KTK dan Tanah Garam (LKPJ AMJ Tahun 2014).

**Tabel 2.25**  
**Cakupan Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar**  
**Kota Solok Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Cakupan Puskesmas (%)					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Ketersediaan Puskesmas dibandingkan jumlah kecamatan	200	200	200	200	200	%
Cakupan Puskesmas pembantu berdasarkan jumlah kelurahan	130,769	130,769	130,769	130,769	130,769	%
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	1: 17.006	1:16.164	1:16.312	1:16.934	1:17.150	Unit/ jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, terhadap ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar, Kota Solok telah mencapai target. Untuk selanjutnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana sarana pelayanan tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu indikator pelayanan yang berkualitas adalah terakreditasinya sarana pelayanan tersebut. Kota Solok mencapai Akreditasi Dasar untuk Puskesmas Tanah Garam (tahun 2016) dan Puskesmas KTK (tahun 2017) dan serta Akreditasi Madya untuk Puskesmas Tanjung Paku (tahun 2016) dan Nan Balimo (tahun 2017). Untuk menunjukkan pelayanan yang maksimal, kementerian kesehatan menetapkan akreditasi paripurna adalah target tertinggi akreditasi puskesmas. Selain itu,

sarana pelayanan kesehatan milik swasta juga harus terakreditasi guna menjamin kualitas pelayanan yang diberikan. Semua sarana pelayanan kesehatan milik swasta di Kota Solok belum terakreditasi.

**Tabel 2.26**  
**Rasio Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan**  
**Kota Solok Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jumlah Rumah Sakit (RS Umum Pemerintah dan RS Khusus)	6	6	6	6	6	Unit
Jumlah Penduduk	67.936	64.573	65.157	67.736	68.602	jiwa
<b>Ratio</b>	<b>1:11.323</b>	<b>1:10.762</b>	<b>1:10.860</b>	<b>1:11.286</b>	<b>1:11.433</b>	<b>Unit/jiwa</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Pelayanan rujukan untuk masyarakat Kota Solok dapat dilayani langsung oleh RS tipe B yaitu RSUD Solok. Pada saat ini fungsi RSUD Solok merupakan Rumah Sakit untuk target rujukan bagi beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Maka untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan diperlukan adanya Rumah Sakit penyangga milik Pemerintah Daerah, swasta maupun lembaga lainnya.

Sumber daya manusia bidang kesehatan digambarkan dari rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Adapun target indikator Indonesia Sehat disyaratkan rasio dokter dengan penduduk 40 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio perawat adalah 117 per 100.000 penduduk dan rasio bidan adalah 100 per 100.000 penduduk. Jumlah dokter dan tenaga medis ini berimplikasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan, sehingga berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak. Berikut rasio ketersediaan dokter dan tenaga medis di Kota Solok.

**Tabel 2.27**  
**Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kota Solok Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jumlah Dokter	13	14	16	15	23	Dokter
Jumlah tenaga medis (Bidan + Perawat)	122	116	121	169	220	Bidan+ Perawat
Jumlah Penduduk	67.936	64.573	65.157	67.736	68.602	Jiwa
Rasio Dokter per satuan penduduk	1: 3.088	1: 4.305	1: 4.072	1:4.515	1: 2.982	Dokter/ jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Ketersediaan dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Kota Solok sampai tahun 2017 adalah 1 : 2.982, Dibandingkan dengan standar Nasional, satu orang dokter melayani 2.500 penduduk atau dalam 100.000 penduduk dilayani oleh 40 dokter. Dapat disimpulkan bahwa jumlah dokter di Kota Solok belum memenuhi standar nasional.

Untuk ketersediaan bidan dan perawat di Kota Solok sudah mencapai standar nasional. Namun dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan perlu adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan uji kompetensi untuk menjawab tantangan tersedianya sumberdaya kesehatan yang memadai sesuai tuntutan akreditasi tenaga kesehatan di Kota Solok.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan merupakan faktor penunjang utama pembangunan, baik pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun infrastruktur lain. Sampai dengan tahun 2016 panjang jalan di Kota Solok adalah sepanjang 200,54 km sesuai dengan SK Walikota Solok Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Kota Solok yang terdiri dari jalan negara 12,08 km, jalan propinsi 2,60 km dan jalan kota 185,86 km. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45 Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Dalam Kota Solok maka terjadi perubahan panjang jalan di Kota Solok dimana berubah menjadi 236,35 km yang terdiri dari jalan negara 12,08 km, jalan propinsi 2,60 km dan jalan kota 221,7 km sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 2.28**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status Di Kota Solok**  
**Tahun 2009 dan 2017**

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)	
		(SK Walikota Solok Tahun 2009)	(SK Walikota Solok Tahun 2017)
1	Jalan Nasional	12,08	12,08
2	Jalan Propinsi	2,60	2,60
3	Jalan Kota	185,86	221,70
	<b>Panjang Jalan Keseluruhan</b>	<b>200,54</b>	<b>236,38</b>

Sumber : Dinas PUPR Kota Solok

Berdasarkan tabel 2.29, panjang jaringan jalan nasional dan provinsi tidak mengalami penambahan, selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2017. Sedangkan panjang jaringan jalan kota meningkat sebesar 19,28% atau sepanjang 35,84 Km.

Berdasarkan status jaringan jalan di Kota Solok dapat dilihat proporsi panjang jaringan jalan tahun 2013 s/d 2017 sebagai berikut:

**Tabel 2.29**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Di Kota Solok**  
**Tahun 2013-2017**

No	Keadaan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Baik	Km	116,98	115,44	166,04	170,7	172,34
2	Kondisi Sedang	Km	32,90	37,04	10,42	11,86	11,86
3	Kondisi Rusak Ringan	Km	15,67	12,72	7,97	4,02	10,00
4	Kondisi Rusak Berat	Km	34,99	35,34	16,11	13,96	42,60
5	Jalan secara keseluruhan	Km	200,54	200,54	200,54	200,54	236,38
6	Jalan Kondisi Mantap (1+2)	Km	149,88	152,48	176,46	182,56	184,20
7	Kondisi Jalan Mantap	%	74,74	76,03	87,99	91	77,80

Sumber : Kota Solok Dalam Angka tahun 2013-2017 dan Dinas PUPR Kota Solok

Dari tabel 2.29 dapat dilihat bahwa perkembangan jalan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 kondisi mantap 149,88 km (74,74 %) meningkat menjadi 184,20 Km (77,80 %) pada tahun 2017. Berdasarkan data tersebut sampai dengan akhir tahun 2017 terjadi peningkatan kondisi jalan mantap 34,32 Km.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan terkait dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan di Kota Solok. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya terus diupayakan agar semakin banyak lapisan masyarakat dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi. Pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri. Walaupun demikian dalam hubungan ini, pemerintah tetap berkewajiban memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh

dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat, serta membina agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung dengan tertib.

Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas juga merupakan bagian dari pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Prasarana, sarana dan utilitas yang dimaksud disini berupa jalan lingkungan, saluran lingkungan, prasarana dan sarana pemerintah daerah, prasarana dan sarana publik serta pembangunan sarana sanitasi dan sarana air bersih.

Penanganan kawasan permukiman dilaksanakan dalam rangka meniadakan kawasan kumuh di Kota Solok. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-653 Tahun 2014 kawasan kumuh yang ada di Kota Solok adalah seluas 168,03 Ha dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.30 di bawah ini:

**Tabel 2.30**  
**Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Solok Tahun 2014**

No	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1.	Padang Galundi, Pincuran Makmur, dan Sawah Piai	Tanah Garam	Lubuk Sikarah	35,02	Kumuh Berat
2.	Kandang Aur	Simpang Rumbio	Lubuk Sikarah	8,44	Kumuh Sedang
3.	Permukiman Rawan Banjir	Aro IV Korong, Sinapa Piliang, KTK, IX Korong, IV Suku	Lubuk Sikarah	49,18	Kumuh Sedang
4.	Permukiman Pusat Kota	PPA, Koto Panjang	Tanjung Harapan	18,34	Kumuh Berat
5.	Permukiman Sepanjang Rel Kereta Api	Tanjung Paku, Nan Balimo	Tanjung Harapan	57,05	Kumuh Berat
<b>Jumlah</b>				<b>168,03</b>	

Sumber : SK Walikota Nomor 188.45-653 Tahun 2014

Dari tabel 2.30 dapat dilihat bahwa Kota Solok masih memiliki kawasan kumuh seluas 168,03 ha tersebar di 11 kelurahan. Hal ini berarti dari 5.764 hektar luas wilayah Kota Solok, 2,92% merupakan kawasan kumuh. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang ada sehingga menjadi bebas dari kumuh, sesuai dengan RPJMN, dalam rangka pencapaian *universal access* pada tahun 2019 ditargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Indonesia.

## 5. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang dianggap dapat atau sanggup bekerja walaupun tidak ada permintaan kerja. Contoh bukan tenaga kerja adalah pensiunan, lansia dan anak-anak. Tenaga Kerja dibedakan menjadi usia kerja (15-64 tahun) dan bukan usia kerja (65 tahun ke atas). Usia Kerja tersebut dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Penduduk usia kerja di Kota Solok sebesar 41,39 % berada pada lapangan usaha Sektor Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel. Sedangkan pada sektor jasa kemasyarakatan sebesar 29,65% dan sektor lainnya masing-masing di bawah 10%, sebagaimana terdapat pada tabel 2.31.

**Tabel 2.31**  
**Persentase Pekerjaan Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Solok Tahun 2017**

No	Lapangan Pekerjaan Utama	%
1	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	5,56
2	Pertambangan dan penggalian	0,02
3	Industri Pengolahan	7,99
4	Listrik, gas dan air	0,58
5	Bangunan	6,55
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	41,39
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	5,94
8	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	2,32
9	Jasa kemasyarakatan	29,65
<b>Total</b>		<b>100,00</b>

Sumber : Kota Solok dalam Angka 2018

Sebagian besar tenaga kerja di Kota Solok pada tahun 2017 berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 47,48% dan berusaha sendiri sebesar 22,46%. Dan jika dipilah berdasarkan jenis kelamin akan terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang berstatus usaha sendiri sebagian besar adalah perempuan, dan yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai justru sebagian besar adalah laki-laki. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.32:

**Tabel 2.32**  
**Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**  
**di Kota Solok Tahun 2017**

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	22,36	22,61	22,46
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	9,29	10,93	9,98
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	9,66	2,91	6,82
4	Buruh/karyawan/pegawai	48,81	45,64	47,48
5	Pekerja bebas di sektor pertanian	1,94	2,26	2,08
6	Pekerja bebas di sektor non pertanian	4,13	1,47	3,01
7	Pekerja keluarga/tak dibayar	3,81	14,18	8,18
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2018

## 6. Pangan

Pembangunan ketahanan pangan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis ketahanan pangan digambarkan melalui kontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, distribusi dan konsumsi pangan. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan perspektif kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan harus mengutamakan produksi wilayah serta memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah:

- a. Ketersediaan pangan
- b. Distribusi pangan serta
- c. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Perkembangan tingkat ketersediaan pangan di Kota Solok dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel 2.33.

**Tabel 2.33**  
**Ketersediaan Pangan Tahun 2013 - 2017**

No	Tahun	Ketersediaan Pangan (Ton/tahun)
1	2013	8.346
2	2014	10.741
3	2015	10.184
4	2016	10.369
5	2017	7.092

*Sumber: Dinas Pangan Kota Solok*

Perkembangan ketersediaan pangan di Kota Solok setiap tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 2017 terjadi penurunan ketersediaan pangan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan jumlah produksi beras di Kota Solok mengalami penurunan, demikian juga dengan jumlah pasokan bahan pangan (beras) yang masuk ke Kota Solok relatif berkurang. Kondisi ini tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Solok, tetapi jumlah ketersediaan untuk stok pangan berkurang.

## **7. Lingkungan Hidup**

Kualitas air sungai merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dan air permukaan (IKA) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dengan parameter dan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk kelas II. Sampai tahun 2016 belum ada data tentang Indeks Kualitas Air (IKA) karena pengukuran kualitas air belum berdasarkan pada parameter yang dipersyaratkan untuk perhitungan IKA.

Kondisi geografis Kota Solok dilewati oleh 3 sungai yaitu Sungai Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Bingung. Batang Lembang merupakan sungai utama yang berhulu di Kabupaten Solok. Dari hasil pemantauan kualitas air sungai Batang Lembang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terjadi kecenderungan

penurunan kualitas air. Hal ini disebabkan oleh adanya air buangan akibat aktifitas rumah tangga dan aktivitas usaha/kegiatan pertanian, perternakan, industri, tanpa proses pengolahan dibuang ke badan sungai. Berikut Indeks Kualitas Air tahun 2017 beberapa sungai utama di Sumatera Barat.

**Tabel 2.34**  
**Indeks Kualitas Air (IKA) Beberapa Sungai Utama**  
**di Sumatera Barat Tahun 2017**

No.	Sungai	Indeks Kualitas Air (IKA)
1.	Batang Agam	50
2.	Batang Anai	50
3.	<b>Batang Lembang</b>	<b>44</b>
4.	Batang Ombilin	54
5.	Batang Pangian	44
6.	Batang Lampasi	53
7.	Batang Mangor	55
8.	Batang Sinamar	51
9.	Batang Masang Gadang	52
10.	Batanghari	51
11.	Batang Kuantan	56
	<b>Rata-rata</b>	<b>51</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Selain kualitas air, kualitas lingkungan hidup juga ditentukan oleh kualitas udara. Pemantauan kualitas udara ambien Kota Solok selama 5 tahun terakhir dilakukan di Terminal Bareh Solok. Lokasi ini merupakan jalur padat transportasi karena merupakan jalur lintas Sumatera. Baku mutu udara ambien ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Berdasarkan parameter yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, Indeks Kualitas Udara Kota Solok tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.35**  
**Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Solok Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Keterangan
1.	2013	80,75	Baik
2.	2014	93,48	Sangat baik
3.	2015	81,92	Baik
4.	2016	99,96	Sangat baik
5.	2017	91,54	Sangat baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) ditambah dengan Indeks Tutupan Hutan/lahan, merupakan indikator yang digunakan dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## 8. Koperasi dan UKM

### a. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami penurunan pada tahun 2016 jika dilihat dari persentase koperasi aktif. Penurunan jumlah persentase koperasi aktif ini disebabkan masih belum selesainya pembubaran beberapa koperasi yang tidak aktif lagi. Berikut perkembangan koperasi tahun 2013-2017:

**Tabel 2.36**  
**Perkembangan Koperasi Kota Solok Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1	Jumlah Koperasi	64	64	57	57	55	Buah
2	Jumlah Koperasi Aktif	49	49	49	42	43	Buah
3	Jumlah Koperasi tidak Aktif	15	15	8	15	12	Buah
4	Persentase koperasi Aktif	76,6	76,6	85,96	73,68	76	%
5	Jumlah Anggota	10.750	10.236	10.198	9.310	8.815	Orang
6	Modal Sendiri	40.272.572	43.688.901	43.262.252	52.868.255	62.949.142	Rp000
7	Hutang	47.052.059	51.318.665	48.107.210	41.634.506	35.839.187	Rp000
8	Total Asset	87.325.167	95.007.566	91.369.463	94.502.761	92.331.383	Rp000

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
9	Volume Usaha	70.724.219	61.278.352	65.715.019	60.645.419	58.953.065	Rp000
10	SHU	4.562.571	4.729.376	4.956.980	5.286.660	5.901.566	Rp000
11	Klasifikasi Koperasi						
	- A	17	16	17	16	16	Buah
	- B	7	21	24	10	10	Buah
	- C	25	9	8	17	7	Buah
	- D	15	15	8	5	5	Buah
12	Tkt. Kesehatan KSP/USP Koperasi						
	- Sehat	10	19	15	8	9	Buah
	- Cukup Sehat	24	21	20	22	21	Buah
	- Kurang Sehat	-	-	1	0	2	Buah
13	Pelaksanaan RAT	34	38	37	32	32	Buah

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok

#### b. Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah UKM pada tahun 2017 mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu 2.246 UKM bila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan pada penghitungan tahun 2016, UKM yang ada di Pasar Raya Solok belum dimasukkan ke dalam data base UKM, baru tercatat dalam data base pada pendataan tahun 2017. Bila dilihat dari total omzet dan tenaga kerja secara keseluruhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan *trend* meningkat. Berikut dapat dilihat perkembangan UKM Kota Solok pada tabel 2.37.

**Tabel 2.37**  
**Perkembangan UKM di Kota Solok 2013-2017**

Jenis Usaha	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jumlah UKM	1.297	1.410	1.551	1.165	3.411	Unit
Modal Sendiri	86.016.810	93.758.322	103.134.154	104.147.560	124.977.072	Rp000
Modal Luar	57.170.520	62.315.866	68.547.452	75.402.198	90.482.454	Rp000
Total Assets	56.435.437	59.257.200	65.182.920	71.701.212	86.041.454	Rp000
Omzet	296.223.372	331.770.176	364.947.190	401.441.909	481.730.290	Rp000
Tenaga Kerja	4.028	4.148	4.562	5.018	5.018	Orang

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok

## 9. Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal di daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai investasi. Meningkatnya jumlah investasi memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan sektor ekonomi di Kota Solok secara keseluruhan. Pertumbuhan nilai investasi dapat dilihat pada tabel 2.38:

**Tabel 2.38**  
**Pertumbuhan Nilai Investasi di Kota Solok Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Nilai Investasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2013	262.972.292.240	5,00
2	2014	270.166.498.804	2,74
3	2015	284.435.248.524	5,28
4	2016	319.415.653.938	12,30
5	2017	338.580.000.000	6,00
<b>Pertumbuhan Rata-rata (%)</b>			<b>6,26</b>

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Solok

Dari tabel 2.38 di atas terlihat bahwa realisasi nilai investasi di Kota Solok cenderung naik dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 6,26%. Pada tahun 2016 nilai investasi lebih tinggi dari rata-rata yaitu sebesar 12.30% dikarenakan adanya kenaikan investasi pemerintah di bidang konstruksi diantaranya pembangunan gelanggang olahraga dan sarana lainnya. Peningkatan nilai investasi sangat diperlukan sekali di masa yang akan datang sebagai variabel penggerak meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat secara nominalnya, nilai investasi di Kota Solok cenderung rendah dibandingkan dengan jumlah PDRB Kota Solok dalam jangka waktu 2013-2017. Investasi akan menambah nilai modal pada struktur perekonomian. Peningkatan nilai modal akan meningkatkan produksi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

## 10. Kebudayaan

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam suatu proses pembangunan, karena kebudayaan sangat terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat

semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah dilakukan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Solok, dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebanyak tiga kali dalam setahun. Disamping penyelenggaraan festival seni dan budaya, juga dilakukan pelestarian terhadap 8 (delapan) benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdiri dari Lasuang Inyik Gulambai, Lasuang Jawi Orok, Makam Syech Sialahan, Lasuang Baiduang, Batu Laweh, Batu Nan Tujuh, Surau Latiah dan Rumah Gadang Gajah Maaram semuanya telah dituangkan dalam buku Benda Cagar Budaya.

Pembangunan di bidang seni budaya bertujuan untuk menjaga dan melestarikan peninggalan seni dan budaya serta benda-benda cagar budaya yang terdapat di Kota Solok. Disamping itu pembangunan di bidang seni budaya dapat bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang seni budaya. Adapun capaian indikator budaya sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 2.39**  
**Perkembangan Seni Budaya Kota Solok Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1	Grup Kesenian	20	20	20	20	20	unit
2	Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	unit

Sumber: Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda Olahraga Kota Solok

Sebagaimana dilihat dari tabel 2.39 pelestarian budaya melalui pembinaan grup kesenian tradisional melalui panggung pidato adat, kelembagaan bundo kanduang dan LKAAM. Adapun dalam rangka penguatan ketahanan budaya perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan kelompok-kelompok budaya untuk mengantisipasi terjadinya pergeseran nilai budaya itu sendiri, mengingat semakin pesatnya ekspansi seni dan budaya global yang mempengaruhi kelestarian seni dan budaya daerah.

Kebijakan lokal Kota Solok mengusung tema "Solok Kota Beras Serambi Madinah", sehingga kehidupan berbudaya erat kaitannya dengan agama. Untuk menyemarakkan kehidupan beragama, Pemerintah Kota Solok secara bertahap melakukan pengembangan terhadap prasarana, sarana dan fasilitas keagamaan, sebagaimana terdapat pada tabel 2.40.

**Tabel 2.40**  
**Prasarana, Sarana dan Fasilitas Keagamaan di Kota Solok**  
**Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1	Jumlah Mesjid/ Mushala yang dibantu	48	50	50	57	58	Mesjid/ Mushala
2	Lembaga Zakat	1	1	1	1	1	Baznas

*Sumber data : Bagian Kesra Setda Kota Solok*

Bentuk fasilitasi peningkatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok seperti memberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana ibadah; tunjangan untuk Garin Mesjid dan MDA. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2013. Selain itu, program pengembangan kehidupan beragama ini juga memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah. Serta memberdayakan lembaga sosial keagamaan seperti jemaah keagamaan, majelis taklim, organisasi remaja dan pemuda masjid. Khusus Baitul Mal Tamwil (BMT) di berdayakan untuk meningkatkan ekonomi umat.

Sementara itu pembinaan lembaga zakat dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan, peningkatan penyediaan informasi publik, konsultasi zakat dan pembinaan unit pengumpul zakat pada perangkat daerah, BUMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada satu lembaga BAZNAS Kota Solok.

## **11. Kelautan dan Perikanan**

Sektor perikanan cukup strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pengembangan disektor ini. Salah satu usaha yang telah dilakukan dalam pengembangan sektor perikanan adalah budidaya ikan air tawar. Pengembangan kinerja sektor perikanan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.41.

**Tabel 2.41**  
**Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1	Produksi Ikan	130.67	168.93	130.60	191.36	175,39	Ton

*Sumber : Dinas Pertanian Kota Solok*

Dari tabel 2.41 diatas terlihat bahwa produksi perikanan masih berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan petani perikanan masih mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam melaksanakan budidaya ikan.

## 12. Pariwisata

Perkembangan urusan pilihan pariwisata memperlihatkan kinerja semakin baik selama periode 2013-2017. Jumlah kunjungan wisata mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2013-2017 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.42**  
**Angka Kunjungan Wisata di Kota Solok Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
Jumlah kunjungan wisata	74.500	91.082	112.358	141.910	170.000	Orang
Pertumbuhan kunjungan wisata	77,3	22,26	23,36	22,30	19,79	%
Tingkat hunian hotel	18.247	23.096	35.276	55.129	105.558	Kamar

*Sumber : Dinas Pariwisata Kota Solok*

Berdasarkan tabel 2.42 diatas dapat dilihat bahwa secara umum terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Solok sejak tahun 2013. Demikian juga halnya dengan tingkat hunian hotel. Jumlah wisatawan asing juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun peningkatan hunian hotel sangat besar dipengaruhi pengadaan beberapa event pariwisata yang telah dilaksanakan di Kota Solok.

Perkembangan pariwisata di Kota Solok secara umum masih belum memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan, disebabkan oleh minimnya fasilitas dan prasarana wisata yang ada pada objek wisata. Saat ini di Kota Solok terdapat 3 objek wisata alam (Pulau Belibis, Sarasah Batimpo dan Laing Park).

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pemerintah Kota Solok melakukan pembenahan terhadap beberapa destinasi wisata, kesiapan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung dan promosi. Selain itu pemerintah daerah juga mendukung beberapa event tahunan pariwisata. Upaya yang dilakukan ini masih tahap awal dan belum maksimal. Oleh sebab itu upaya-upaya yang telah dilakukan perlu lebih diintensifkan untuk masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kota Solok.

### 13. Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor strategis bagi perekonomian Kota Solok. Selain memberikan kontribusi pada PDRB, sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Pada tabel 2.44 dibawah dapat dilihat perkembangan hasil pembangunan pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir.

**Tabel 2.43**  
**Perkembangan Indikator Capaian Pembangunan Pertanian di Kota Solok**  
**Tahun 2013-2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1	Tingkat produksi tanaman - Padi - Ubi kayu	15.255 1.390	15.656.76 663.86	15.187 196.80	16.170 299.20	17.387 225.00	Ton/th Ton/th
2	Tingkat produktivitas Pertanian/Perkebunan - Padi - Cacao - Tanaman atsiri	6.90 0.89 13.00	6.54 0.90 14.00	6.60 0.90 15.00	6.62 0.97 19.00	6.67	Ton/ha Ton/ha Ton/ha
3	Klasifikasi Kelompok tani - Poktan utama - Poktan Madya	- 4	- 9	- 9	- 10	- 12	Klp Klp
4	Pelaku Usaha Agribisnis	65	68	70	78	80	Klp
5	Tingkat Populasi Ternak - Sapi - Unggas - Daging	1.945 187.206 612.733	2.129 171.409 720.936.77	2.086 205.719 708.688.24	2.042 238.856	2.220 239.898	Ekor Ekor Kg
6	Pencegahan dan pengobatan penyakit hewan	950	823	798	1.205	1.223	Ekor/ Tahun

Sumber : BPS dan Dinas Pertanian Kota Solok

Dari Tabel 2.43 diatas dapat dilihat bahwa capaian yang diperoleh dari tahun 2013 sampai 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data produktivitas yang diperoleh relatif lebih tinggi. Hal ini disebabkan lokasi pengambilan ubinan pada lokasi yang produktivitasnya memang lebih baik. Tahun 2014 dan tahun 2015 pengambilan ubinan dilakukan bersama-sama dengan BPS karena data yang diakui secara nasional adalah data yang dikeluarkan oleh BPS.
2. Sedangkan untuk Produksi padi mengalami peningkatan dalam periode 2016 sampai 2017, yang dipengaruhi faktor produktivitas dan luas panennya.

3. Populasi sapi tahun 2016 sebanyak 2.042 ekor dan tahun 2017 meningkat menjadi 2.220 ekor. Peningkatan produksi ini diperoleh dengan optimalisasi pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan bantuan ternak kepada kelompok tani.
4. Populasi unggas tahun 2016 sebanyak 238.856 ekor dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 239.898 ekor. Peningkatan populasi ini didorong oleh adanya program bantuan pemerintah berupa pengembangan unggas lokal.
5. Jumlah pelaku usaha agribisnis pada tahun 2016 sebanyak 78 kelompok dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 80 kelompok. Peningkatan ini berkat adanya program pemerintah berupa Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

#### 14. Perdagangan

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Solok adalah dengan memacu sektor-sektor yang dominan dalam membentuk PDRB. Sektor perdagangan memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian di Kota Solok, dengan menyumbang 25% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka ini jauh lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan data tersebut di atas, setelah dilakukan analisa dengan menggunakan Metode *Location Quotient (LQ)*, ternyata sektor perdagangan merupakan sektor basis Kota Solok dengan nilai  $LQ > 1$ .

Sektor perdagangan ini nantinya diharapkan dapat menjadi pendorong sektor lainnya. Untuk melihat Pertumbuhan sektor perdagangan kurun waktu 2013-2017 di Kota Solok dapat kita lihat pada tabel 2.44 berikut:

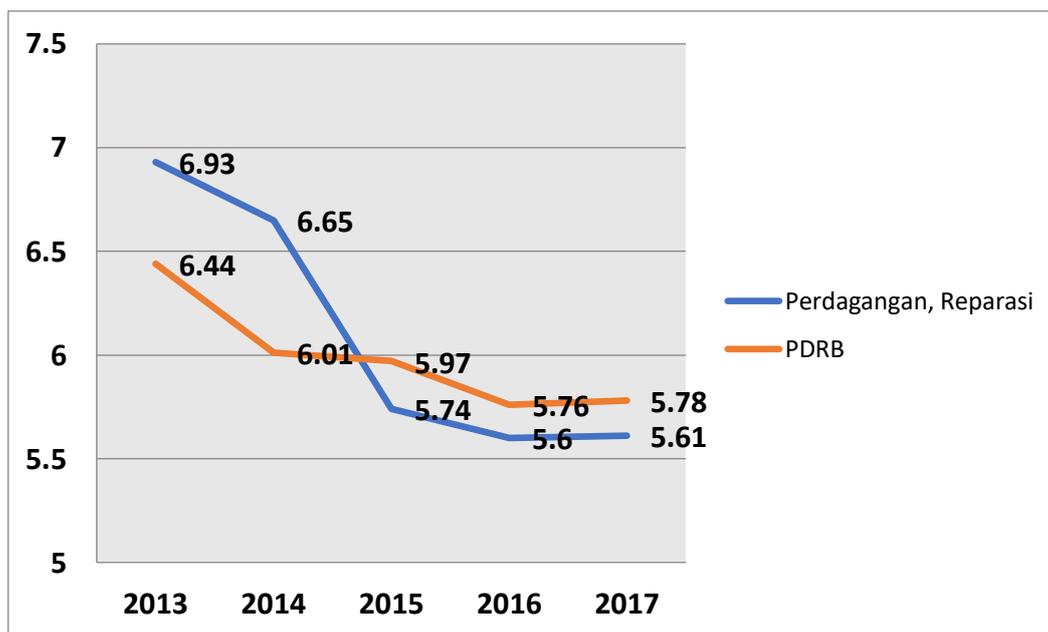
**Tabel 2.44**  
**Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kota Solok Tahun 2013-2017**

No	Tahun	ADHK	Pertumbuhan (%)
1	2012	480.521,84	
2	2013	513.802,32	6,93
3	2014	547.955,25	6,65
4	2015	579.405,08	5,74
5	2016	611.879,73	5,6
6	2017	646.186,81	5,61

Sumber data: BPS Kota Solok (Data diolah)

Berdasarkan tabel 2.44 di atas dapat dilihat bahwa nilai sektor perdagangan terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 513,8 milyar menjadi 646,2 milyar pada tahun 2017. Pertumbuhan sektor perdagangan cenderung melambat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 sektor ini tumbuh sebesar 6,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pada tahun 2017 sektor ini hanya tumbuh sebesar 5,61%, pada grafik di bawah ini dapat dilihat pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Solok tahun 2013 s/d 2017.

**Gambar 2.11**  
**Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan**



Sumber data: BPS Kota Solok (Data diolah)

Dari gambar 2.11 diatas dapat dilihat sektor perdagangan sebagai sektor yang dominan pembentuk PDRB mengalami perlambatan pertumbuhan dalam kurun waktu 2013-2017 di Kota Solok, bahkan 3 tahun terakhir pertumbuhannya berada dibawah pertumbuhan ekonomi. Sebagai sektor dengan kotribusi terbatas terhadap PDRB, perlambatan pertumbuhan sektor ini berakibat pada perlambatan pertumbuhan PDRB. Untuk itu perlu adanya dukungan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan peran sektor perdagangan terhadap percepatan pertumbuhan PDRB di Kota Solok

## 15. Perindustrian

Sektor industri kecil dan menengah di Kota Solok, didominasi oleh industri mikro dan kecil yang perkembangannya selama periode 2013 – 2017 menunjukkan kondisi menurun. Berikut perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut:

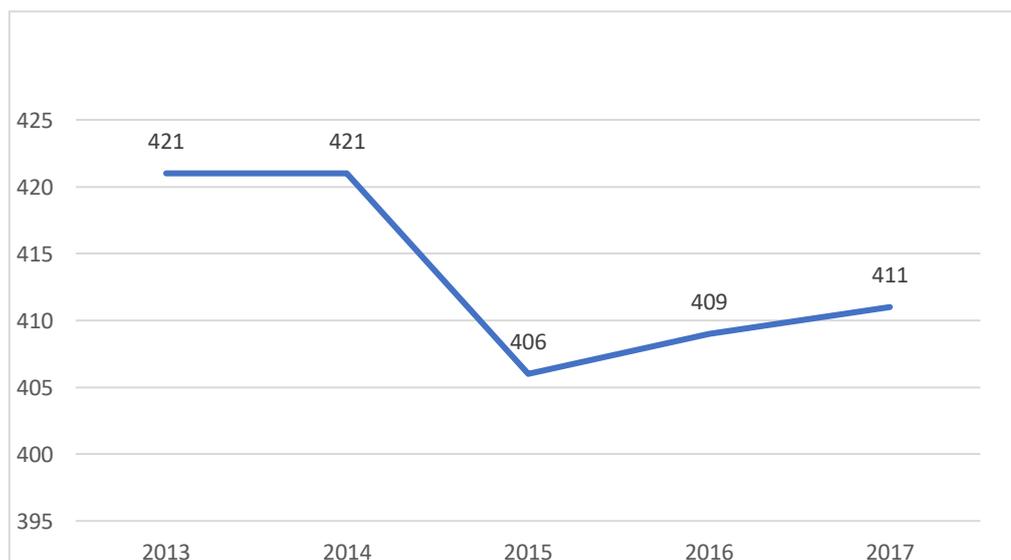
**Tabel 2.45**  
**Perkembangan Industri Kota Solok Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6.11	5.99	5.85	5.85	5.59	%
2.	Jumlah industri	421	421	406	409	411	Unit
3.	Jumlah tenaga kerja sektor industri	1.780	2.078	2.023	2.093	2.138	Orang

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM

Berdasarkan tabel 2.45 dapat dilihat bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Solok mengalami *trend* penurunan sejak tahun 2013 sampai tahun 2017. Hal ini merupakan dampak dari pertumbuhan sektor lain yang cukup tinggi. Penurunan ini juga sejalan dengan perkembangan jumlah IKM yang mengalami penurunan dari 421 IKM pada tahun 2013 menjadi 411 IKM pada tahun 2017, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.12.

**Gambar 2.12**  
**Perkembangan Industri di Kota Solok Tahun 2013 – 2017**  
**(Dalam unit)**



Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM

Untuk periode pembangunan yang akan datang, jumlah industri yang ada diharapkan dapat mendorong terjadinya peningkatan jumlah produksi yang akan berimplikasi pada kenaikan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah industri merupakan salah satu indikator yang memiliki peran dalam memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Solok. Walaupun terjadi stagnansi pada tahun 2014 dengan tidak bertambahnya jumlah industri kecil dan menengah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah industri kecil dan menengah yang tidak lagi memproduksi (mati) pada tahun 2014 sama besarnya dengan jumlah industri kecil dan menengah yang tumbuh di tahun yang sama. Selama lima tahun terakhir industri di Kota Solok didominasi oleh industri pangan dan industri kimia dan bahan bangunan.

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok 2013-2017. dapat dilihat pada tabel 2.46 berikut:

**Tabel 2.46**  
**Perkembangan IKM di Kota Solok 2013-2017**

No.	Kelompok Industri	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Industri Pangan					
	a. Unit Usaha	165	157	188	189	189
	b. Tenaga Kerja	670	852	721	756	760
2	Industri Sandang					
	a. Unit Usaha	39	40	50	52	54
	b. Tenaga Kerja	179	182	195	230	271
3	Industri Kimia dan Bahan bangunan					
	a. Unit Usaha	90	94	111	111	111
	b. Tenaga kerja	406	514	984	984	984
4	Industri mesin. logam dan elektronika					
	a. Unit Usaha	35	36	33	33	33
	b. Tenaga Kerja	128	130	75	75	75
5	Industri Kerajinan					
	a. Unit Usaha	92	94	24	24	24
	b. Tenaga Kerja	397	400	48	48	48
	<b>Unit Usaha</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>406</b>	<b>409</b>	<b>411</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM

Berdasarkan table 2.46 dapat dilihat bahwa industri di Kota Solok didominasi oleh industri pangan yang sampai tahun 2017 berjumlah 189 unit usaha, dengan jumlah tenaga kerja 760 orang. Disamping itu sektor industri kimia dan bahan bangunan juga cukup banyak, jumlah unit usaha sektor industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 111 unit dengan jumlah tenaga kerja 984 orang.

## 16. Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi adalah membangun kembali kondisi birokrasi ke arah perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan. Tujuan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan berpegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Sedangkan sasaran yang diinginkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi ini yaitu :

- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi ini dilakukan melalui seluruh aspek manajemen pemerintahan yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

**Tabel 2.47**  
**Aspek Manajemen Pemerintahan**

No	Area	Hasil yang diharapkan
1	Organisasi	Organisasi/kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2	Tata laksana	Sistem, prosedur dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
3	Peraturan perundangan-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4	Sumber daya manusia aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera

No	Area	Hasil yang diharapkan
5	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
6	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7	Pelayanan public	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8	Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Sumber : Peraturan Walikota Solok Nomor 105 Tahun 2017

Pemerintah Kota Solok sudah menyusun *roadmap* Reformasi Birokrasi tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Solok Nomor :105 Tahun 2017 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi di Kota Solok dapat dilihat pada tabel 2.48.

**Tabel 2.48**  
**Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Di Kota Solok**

No.	Komponen	Tahun							
		2014		2015		2016		2017	
		Skor	%	Skor	%	Skor	%	Skor	%
<b>A</b>	<b>Proses</b>	<b>37.56</b>	<b>62.59</b>	<b>40.01</b>	<b>66.68</b>	<b>43.92</b>	<b>73.2</b>	<b>41.34</b>	<b>68.91</b>
1	Manajemen perubahan	3.09	61,84	3.79	75.85	3.86	77.2	3.98	79.67
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5	100	5	100	5	100	3.34	66.75
3	Penataan dan penguatan organisasi	4.68	77.94	4.68	77.94	6	100	3.99	66.5
4	Penataan tata laksana	3.51	70.2	3.67	73.43	4.34	86.75	4.17	83.33
5	Penataan sistem manajemen SDM	7.27	48.45	7.52	50.14	11.16	74.41	13.15	87.66
6	Penguatan akuntabilitas	3.8	63.33	3.8	63.33	3.8	63.33	5.54	92.27
7	Penguatan pengawasan	5.86	48.87	7.07	58.94	5.22	43.5	3.75	31.8
8	Peningkatan kualitas pelayanan public	4.34	72.39	4.48	74.62	4.54	75.72	3.43	57.12

No.	Komponen	Tahun							
		2014		2015		2016		2017	
		Skor	%	Skor	%	Skor	%	Skor	%
<b>B</b>	<b>Hasil</b>	<b>17.53</b>	<b>58.43</b>	<b>17.39</b>	<b>57.95</b>	<b>18.08</b>	<b>60.27</b>	<b>19.72</b>	<b>66.75</b>
1	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi	7.46	37.28	7.71	38.56	8.41	42.04	9.05	45.25
2	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	2	20	2	20	2	20	3	30
3	Kualitas pelayanan publik	8.08	80.75	7.68	76.75	7.68	76.75	7.68	76.75
<b>C</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>55.09</b>		<b>57.4</b>		<b>62</b>		<b>61.07</b>	

Sumber : Inspektorat Kota Solok

Manajemen perubahan diarahkan terhadap terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, dengan keikutsertaan seluruh jajaran pimpinan tinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, secara umum manajemen perubahan mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan 2017.

Terhadap penataan peraturan perundang-undangan terjadi penurunan pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya, hal ini disebabkan identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron baru sebagian dilakukan dan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Penataan dan penguatan organisasi dilaksanakan tahun 2016, karena pada tahun 2016 sudah dilaksanakan evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi. Hasil evaluasi ini pun telah ditindaklanjuti dengan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok. Kondisi ini mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 66,5%. Hal ini disebabkan karena hasil evaluasi terhadap struktur organisasi beberapa UPTD di lingkungan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dan Dinas Perhubungan belum ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan organisasi.

Penataan tata laksana memiliki indikator antara lain proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP), e-government dan keterbukaan informasi publik. Secara umum, capaian kinerja pada komponen penataan tata laksana ini mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 dengan nilai, 70,2%, 73,43%, 86,75%. Namun pada tahun 2017, capaian kinerja untuk komponen penataan tata laksana mengalami penurunan menjadi 83,33%. Hal ini disebabkan karena salah satu penilaian yang berhubungan dengan peta proses bisnis dan prosedur operasional belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana SOP yang telah direvisi baru disahkan pada tahun 2017, sehingga belum dilakukan evaluasi terhadap SOP tersebut.

Penataan sistem manajemen SDM memiliki beberapa indikator antara lain perencanaan kebutuhan pegawai, proses penerimaan pegawai, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, promosi jabatan dilakukan secara terbuka, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, pelaksanaan evaluasi jabatan dan Sistem Informasi Kepegawaian. Secara umum, capaian kinerja pada komponen penataan sistem manajemen SDM ini mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dengan nilai, 48,45%, 50,14%, 74,41% dan 87,66%. Peningkatan capaian kinerja ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam penataan sistem manajemen SDM antara lain dalam proses perencanaan kebutuhan pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai sudah secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN. Demikian juga dengan pelaksanaan promosi jabatan juga telah dilakukan secara terbuka dengan dibentuknya panitia seleksi yang independen, pengumuman dilakukan melalui koran dan website serta hasil pelaksanaan seleksi diumumkan secara terbuka. Dalam hal mengukur kinerja individu juga telah diterapkan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Sedangkan dalam penegakan aturan disiplin telah diterapkannya Peraturan Daerah tentang Etika Pemerintah Kota Solok dan Peraturan Walikota tentang hari dan jam kerja serta pakaian seragam kerja bagi PNS.

Komponen proses penguatan akuntabilitas pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 capaian kinerja komponen ini sebesar 63,33% meningkat menjadi 92,27% pada tahun 2017. Hal ini dapat dicapai karena adanya keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan Renstra dan Penetapan Kinerja serta pemantauan pencapaian kinerja

secara berkala. Di samping itu, sejak tahun 2017 Kota Solok telah memiliki e-SAKIP yaitu sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik. Walaupun belum terintegrasi, e-SAKIP ini telah dapat diakses oleh seluruh unit organisasi sehingga penutakhiran data kinerja dapat dilakukan secara berkala. Untuk tahap awal ini penutakhiran data kinerja ini dilakukan secara triwulanan, dan untuk selanjutnya diupayakan untuk memutakhirkan data kinerja secara bulanan.

Berdasarkan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, pada komponen penguatan pengawasan masih sangat rendah, hanya 31,8 % pada tahun 2017. Rendahnya hasil penilaian komponen pengawasan ini disebabkan karena belum maksimalnya pelaksanaan tugas UPG (Unit Pelaksana Gratifikasi), belum adanya kebijakan tentang *whistle-blowing system*, belum adanya penanganan benturan kepentingan dan belum adanya pembangunan zona Integritas. Dari tabel 2.50 diatas juga dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja komponen pengawasan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dari 58,94% menjadi 31,8%. Penurunan pencapaian kinerja penguatan pengawasan ini disebabkan oleh pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat yang tidak maksimal, dimana tahun 2017 tidak dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat yang sudah dilakukan pada tahun 2015 dan 2016. Penurunan penilaian juga disebabkan karena persepsi terhadap pelaksanaan kebijakan *whistle blowing system*, yang pada tahun 2015, Peraturan Walikota dan Surat Edaran Walikota yang mengatur tentang pedoman penyusunan kontrak dan penyerahan UYHD dan sejenisnya dianggap sebagai kebijakan *whistle blowing system*, sedangkan berdasarkan verifikasi dari Kementrian PAN dan RB, hal tersebut bukan termasuk *whistle blowing system*, sehingga penilaian menjadi turun.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana tergambar pada tabel 2.50. Pada tahun 2014 Indeks Reformasi Birokrasi adalah 55,09 dan pada tahun 2017 menjadi 61,07. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada beberapa komponen antara lain komponen peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat meningkat disebabkan oleh telah dimulainya penataan pelayanan administrasi pada kecamatan dan kelurahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, adanya penataan kelembagaan pelayanan perizinan, yaitu dengan telah dibentuknya Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Untuk peningkatan pelayanan publik, telah disusun SOP perizinan, adanya pelimpahan kewenangan kepada PTSP

untuk menerbitkan perizinan. Hal ini menyebabkan adanya efisiensi waktu dan biaya dalam pengurusan perizinan.

Peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Solok telah mengembangkan Puskesmas Rawat Inap dan Klinik Tumbuh Kembang serta untuk membantu masyarakat dalam tanggap darurat, Pemerintahan Kota Solok telah *me-launching Smscare* melalui 119. Begitu pula pada peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah membuat inovasi-inovasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Seperti setiap awal tahun ajaran petugas Disdukcapil memberikan pelayanan pembuatan akte kelahiran di setiap sekolah-sekolah dan pelayanan Dukcapil dengan sistem jemput bola ke RT/RW, Rumah Sakit, Klinik dan lain-lain.

Capaian kinerja komponen hasil kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dari tahun 2014 sampai tahun 2017 menunjukkan *trend* peningkatan yang lebih baik. Pada tahun 2014, capaian kinerja komponen ini sebesar 37,28% meningkat menjadi 45,25%. Hal ini terlihat dari nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Solok yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 nilai evaluasi SAKIP Kota Solok adalah 53,25, meningkat menjadi 55,08 pada tahun 2015, dan 60,05 pada tahun 2016, serta 64,64 pada tahun 2017.

Komponen pemerintahan yang bersih dan bebas KKN terdiri dari dua indikator penyusun yaitu Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) dan Opini BPK. *Transparency International Indonesia* (TII) adalah organisasi Internasional yang melakukan pengukuran Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) di Indonesia. Akan tetapi pengukuran baru dilakukan untuk 12 kota besar saja, termasuk Kota Padang. Untuk Kota Solok, TII belum melakukan pengukuran. Jadi untuk Kota Solok, hanya indikator opini BPK yang dijadikan unsur penyusun komponen ini. Dari hasil laporan evaluasi dapat dilihat bahwa nilai komponen pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dari tahun 2015-2017 cenderung stagnan dengan skor 2 atau sebesar 20%. Hal ini disebabkan predikat WDP yang diperoleh Kota Solok sepanjang tahun itu. Dengan diraihnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Kota Solok pada tahun 2018, nilai komponen pemerintahan yang bersih dan bebas KKN meningkat menjadi 3 atau sebesar (30%).

## 17. Pengawasan

Pengawasan Internal pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat dengan melakukan pembinaan, pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Pengawasan di daerah juga dilaksanakan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah. Dan tidak kalah pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP), yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Solok dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP). Pada tahun 2017 berdasarkan hasil penilaian BPKP terhadap maturitas/kematangan pelaksanaan SPIP oleh Pemerintah Kota Solok berada pada level 3 yang berarti bahwa Pemerintah Kota Solok telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Hasil pelaksanaan pembinaan tentunya tidak terlepas dari aparatur-aparatur pengawas. Kedepan agar hasil pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah semakin baik harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari aparatur pengawas. Sebagai gambaran Kualifikasi Pengawas Intern yang ada di Inspektorat Kota Solok dapat dilihat dari tabel berikut 2.49 :

**Tabel 2.49**  
**Kualifikasi Pengawas Intern Kota Solok Tahun 2013 - 2017**

No	Kualifikasi	Jumlah (orang)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Auditor Ahli Madya	1	1	1	1	1
2	Auditor Ahli Muda	2	2	2	2	6
3	Auditor Ahli Pertama	9	8	9	9	5
4	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	2	1	2	2
5	Auditor Pelaksana	2	1	1	1	1
6	Auditor Penyelia	2	2	2	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

Sumber : Inspektorat Kota Solok

Dari tabel 2.49 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah auditor dari 18 orang menjadi 16 orang karena pensiun dan pindah tugas. Tahun 2015 s/d 2017 auditor di Kota Solok hanya bertambah 1 orang. Dari 17 orang auditor pada Inspektorat Kota Solok, baru satu orang yang mempunyai kualifikasi auditor ahli madya dan sebelas orang ahli muda dan pertama, sedangkan lima orang lagi masih auditor pelaksana. Sehingga kedepan masih perlu dilaksanakan program peningkatan profesionalisme pemeriksa dan aparatur pengawas.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah maka harus dilaksanakan pengawasan secara berkala dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan dan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

#### **2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH**

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi, yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah, untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kapasitas ekonomi daerah dapat dilihat dari pengeluaran per kapita atau konsumsi rata-rata perkapita (pangan dan non pangan) dan produktivitas total daerah.

Pada tahun 2017 rata-rata pengeluaran per kapita Kota Solok sebesar Rp1.196.221,- mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar Rp1.056.488,-. Kenaikan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita Kota Solok sebahagian besar masih didominasi oleh kelompok komoditas non makanan, yaitu sebesar 59.42% pada tahun 2014. Rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok komoditas di Kota Solok Tahun 2013-2017 seperti pada tabel 2.50 di bawah ini:

**Tabel 2.50**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas**  
**di Kota Solok Tahun 2013-2017**

Kelompok Komoditas	Tahun									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Makanan	439.414.	41.59	451.775	40.58	574.550	48.82	439.265	51.06	621.671	48.03
Bukan Makanan	617.073	58.41	661.444	59.42	602.290	51.18	421.041	48.94	574.550	51.97
Jumlah	1.056.488	100	1.113.220	100	1.176.840	100	860.306	100	1.196.221	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Solok

Dari tabel 2.50 terlihat bahwa selama kurun waktu 2013–2017 persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan makin menurun menjadi sekitar 40.58% dan non makanan meningkat menjadi sekitar 59.42% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan kecendrungan peningkatan untuk pengeluaran non makanan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek Daya Saing suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Aksesibilitas Daerah

Secara geografis, Kota Solok terletak pada posisi yang sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan yang mampu mengakses daerah sekitarnya melalui penyediaan prasarana dan sarana serta berbagai fasilitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Kota Solok tidak hanya strategis karena dikelilingi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Solok, tetapi menjadi lebih strategis lagi karena terletak di jalur jalan arah utara menuju Kota Bukittinggi dan Medan, arah barat menuju ibu kota Provinsi Sumatera Barat (Padang) dan arah timur menuju Jambi, Palembang, Bengkulu dan Pulau Jawa. Dengan demikian, Kota Solok merupakan penopang jalur distribusi bagi perekonomian Provinsi Sumatera Barat.

### 2. Ketersediaan Air Bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Solok pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan

dengan sistem perpipaan sudah meliputi seluruh kelurahan yang ada di Kota Solok. Sistem jaringan perpipaan di Kota Solok saat ini, pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan pada tahun 2010 sudah mencapai 94,47% dari jumlah penduduk. Pelayanan penyediaan air bersih ini akan semakin membaik dengan selesainya pembangunan jaringan distribusi dari sumber air baku baru yakni dari Guguak Rantau Kabupaten Solok. Dengan semakin baiknya tingkat layanan/ketersediaan air bersih ini, maka diharapkan Kota Solok semakin diminati oleh calon investor untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

**Tabel 2.51**  
**Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Solok**  
**Tahun 2013-2017**

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Rumah tangga pengguna air bersih	
			Jumlah	Persentase
1.	2013	13.587	9.150	67,34
2.	2014	12.914	9.827	76,10
3.	2015	13.301	10.719	82,56
4.	2016	13.633	12.752	93,54
5.	2017	13.792	13.167	95,47

*Sumber: PDAM Kota Solok*

Berdasarkan tabel 2.51 terlihat bahwa pada tahun 2015 baru sebesar 82,56 % rumah tangga yang terlayani air bersih oleh PDAM Kota Solok, sedangkan sisanya menggunakan air bersih dari berbagai sumber. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan air bersih masih merupakan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga target pemerintah pusat untuk layanan air bersih sebesar 100% dapat dicapai.

### 3. Iklim Berinvestasi

Kota Solok sebagai daerah yang sedang berkembang sangat membutuhkan investasi yang besar untuk melanjutkan pembangunan dan untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, dan lainnya yang akan dapat ditanggulangi melalui berbagai cara salah satunya adalah investasi. Sehingga dalam suatu perekonomian salah satu variabel yang memegang peranan penting adalah investasi atau penanaman modal, hal ini dapat dilihat dari :

- a. Pertama, investasi akan mendorong pertambahan pendapatan (pertumbuhan ekonomi) secara berganda melalui proses *multiplier effect*;
- b. Kedua, investasi akan mendorong penciptaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan akan mengurangi kemiskinan;
- c. Ketiga, investasi bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan baik untuk pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan. Sebagai alat pemerataan investasi tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri atau berjalan menuruti mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah seperti memberi insentif pembebasan pajak bagi investor yang bersedia berinvestasi di daerah tertinggal, mempermudah izin investasi, dan kebijakan lainnya.

Untuk memperbesar atau menarik investasi baik domestik ataupun asing perlu diketahui lebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya promosi Investasi dan pemberian insentif. Peran promosi dalam usaha meraih investasi memegang peranan yang sangat penting. Promosi investasi mencoba untuk mengenalkan peluang-peluang investasi di suatu daerah sekaligus juga menggambarkan keuntungan yang akan diperoleh oleh investor. Dalam mempromosikan peluang investasi di Kota Solok hal yang telah dilakukan adalah:

- a. Membuat profil dan leaflet peluang investasi di Kota Solok;
- b. Mengikuti event-event promosi baik tingkat propinsi maupun nasional;
- c. Menyusun Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Solok;

#### **4. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)**

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya Rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Solok tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.52:

**Tabel 2.52**  
**Rasio Ketergantungan Kota Solok Tahun 2013- 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	19.449	18.470	18.115	19.090	20.36
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	2.775	2.511	2.716	2.818	2.681
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	22.224	20.981	20.831	21.908	23.041
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	45.712	43.592	44.326	45.828	45.561
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	48,62	48,13	46,99	47,80	50,57

*Sumber: Dinas Dukcapil Kota Solok (data diolah)*

Rasio Ketergantungan Kota Solok mulai tahun 2013 berfluktuasi sampai tahun 2017. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan sebesar 48,62, dan tahun 2014 sampai 2015 rasio ketergantungan ini cenderung mengalami sedikit penurunan setiap tahunnya hingga menjadi 46. Namun kembali meningkat pada tahun 2016 dan 2017. Angka ketergantungan masih berfluktuasi namun relatif masih berkisar pada angka 50,57 berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Solok mempunyai tanggungan sekitar 50,57 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Analisa isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan berbagai kondisi yang ideal di masa depan sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan Kota Solok, baik sektoral maupun kewilayahan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. Analisa isu strategis merupakan bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisa ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Dalam rangka penyusunan RPJPD Kota Solok, perlu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah terlebih dahulu, agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan, maka berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan dimasa yang akan datang dapat diketahui.

#### **3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun kewilayahan. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk dipahami, sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dapat memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisa permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kota Solok adalah **“Masih rendahnya kualitas daya saing potensi unggulan daerah”**. Indikasi lebih

lanjut atas permasalahan pokok dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun adalah sebagai berikut:

1. Lambatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah;
2. Rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat Kota Solok;
3. Masih rendahnya pengamalan agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat
4. Belum Meratanya Pembangunan infrastruktur dan Aksesibilitas Kota dalam pembangunan yang berkelanjutan; dan
5. Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi.

Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan melalui evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya serta kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan Kota Solok:

**Gambar 3.1**  
**Mata Rantai Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Solok**



Berdasarkan gambar 3.1, selanjutnya permasalahan pokok pembangunan daerah akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

## 1. Lambatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Pengembangan sektor unggulan harus dilihat dari beberapa faktor seperti karakteristik daerah, potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia. Oleh sebab itu, faktor-faktor tersebut harus dieksplorasi dengan baik agar menjadi landasan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan. Jika prioritas pembangunan tidak sesuai dengan faktor-faktor tersebut maka hasil pembangunan, khususnya perkembangan perekonomian daerah akan menjadi relatif lambat dan tidak optimal.

Salah satu variabel yang dapat digunakan untuk melihat hasil pembangunan, melalui komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat dijadikan sebagai tolok ukur perkembangan perekonomian atau pembangunan suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan besaran nilai tambah yang diperoleh dari berbagai aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Percepatan capaian nilai tambah perekonomian yang optimal dipengaruhi oleh beberapa sektor unggulan yang ada dalam struktur PDRB. Oleh karena itu sektor unggulan merupakan bagian penting dalam perkembangan perekonomian suatu wilayah.

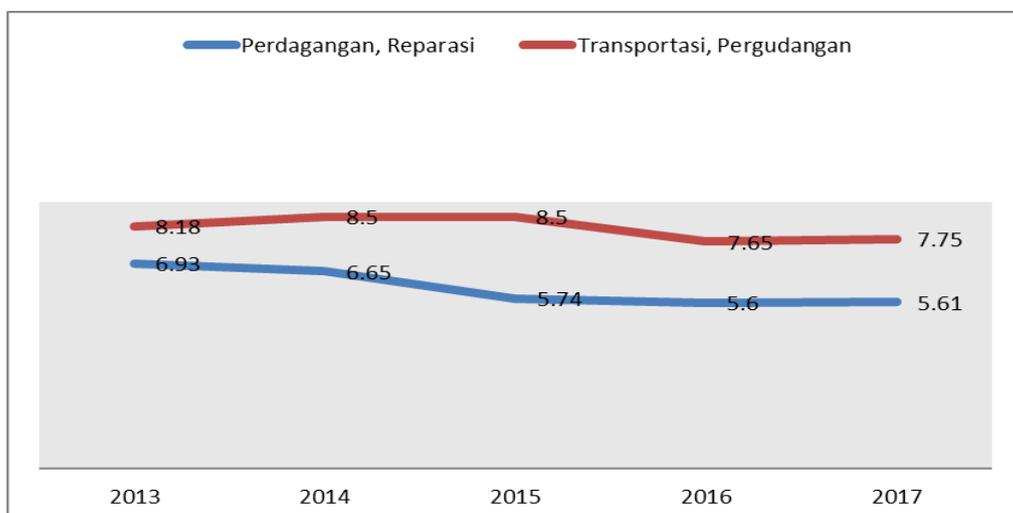
Sektor unggulan dan potensi perkembangan perekonomian wilayah memiliki keterkaitan yang saling menguatkan dengan melakukan pengelolaan sektor unggulan secara optimal dan konsisten. Bila dilihat perkembangan PDRB Kota Solok, sampai tahun 2017 ternyata perekonomian Kota Solok ditopang oleh 2 sektor unggulan, yaitu sektor perdagangan dan reparasi sebesar 25,03% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 16,43%. Beranjak dari data tersebut, kedua sektor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Solok. Tetapi jika dilihat dari pertumbuhan kedua sektor ini sampai tahun 2017, perdagangan hanya dapat tumbuh rata-rata sebesar 6,11%. Dengan demikian, sektor perdagangan sebagai sektor unggulan berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Solok, namun sektor ini belum dapat memperlihatkan pertumbuhan yang optimal karena sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 memperlihatkan *trend* yang menurun. Adapun permasalahan pokok dalam pertumbuhan sektor unggulan ini adalah:

**a. Belum optimalnya nilai tambah pembangunan perdagangan dan Jasa**

Dalam struktur perekonomian daerah Kota Solok, sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor unggulan yang diharapkan memberikan kontribusi yang relatif tinggi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pada tahun 2017 nilai PDRB Kota Solok ADHK sebesar 2,58 triliun meningkat sebesar 5,78% dari tahun 2016. Sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 25,03% terhadap total PDRB. Tingginya kontribusi sektor perdagangan ini tidak selaras dengan pertumbuhannya, karena pada tahun 2017 sektor perdagangan hanya mampu tumbuh sebesar 5,61% lebih rendah dari pertumbuhan total PDRB yaitu sebesar 5,78%.

Sektor lain yang berkontribusi cukup tinggi terhadap nilai PDRB adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor ini pada tahun 2017 memberikan sumbangan sebesar 16,43% terhadap total PDRB. Berbeda dengan sektor perdagangan sektor ini mampu tumbuh lebih besar dari pertumbuhan total PDRB. Pada tahun 2017 sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 7,75% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 7,65%. Tingginya pertumbuhan sektor ini dipandang masih belum optimal karena pada tahun 2014 dan 2015 sektor ini mampu tumbuh sebesar 8,5%. Perkembangan pertumbuhan sektor perdagangan dan reparasi, Sektor transportasi dan pergudangan tahun 2013-2017 dapat kita lihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.2**  
**Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Reparasi, Transportasi, dan Pergudangan**



Sumber : Kota Solok Dalam angka 2018 (data diolah)

Dari gambar 3.2 dapat dilihat pertumbuhan nilai tambah disumbangkan oleh 2 sektor utama pembentuk besaran komposisi PDRB dari tahun 2013-2017 terlihat stagnan dan cenderung melambat. Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan merupakan syarat utama untuk menumbuh kembangkan aktivitas perdagangan yang ada. Masih belum maksimalnya pengembangan prasarana perdagangan antara lain ketersediaan lahan parkir, ketersediaan jaringan air bersih, ketersediaan drainase, ketersediaan pelayanan listrik. Disamping itu untuk memberikan kemudahan akses konsumen dalam memperoleh produk sesuai dengan kebutuhannya perlu dilakukan melalui penataan pedagang berdasarkan kelompok dan jenis dagangannya.

Permasalahan lain yang masih nampak menonjol adalah pengelolaan perdagangan belum berjalan secara optimal, tercermin dari belum tertatanya pengelompokan pedagang, terbatasnya jangkauan pemasaran, kurangnya informasi pasar dan produk yang ditawarkan belum memenuhi selera pasar baik dalam diversifikasi maupun desainnya.

Untuk pengembangan sektor perdagangan peran transportasi, pergudangan dan jasa logistik sangat penting dalam pendistribusian produk. Berkaitan dengan fasilitas pergudangan yang tersedia di Kota Solok masih terbatas, sehingga banyak pelaku usaha yang memilih daerah di sekitar Kota Solok sebagai lokasi pergudangannya. Hal ini tentu saja berdampak terhadap nilai tambah jasa pergudangan yang seharusnya dapat dinikmati Kota Solok berpindah ke daerah lain.

#### **b. Belum optimalnya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)**

UMKM dan koperasi merupakan ujung tombak pergerakan ekonomi masyarakat di tingkat paling dasar. Selain itu UMKMK juga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Perkembangan UMKMK di Kota Solok dapat dilihat pada tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**UMKM Kota Solok Tahun 2013-2017**

NO	Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1	Mikro	1.184	1.297	1.438	1.612	3.233	unit
2	Kecil	111	111	111	170	170	unit
3	Menengah	2	2	2	8	8	unit
<b>Jumlah</b>		<b>763</b>	<b>839</b>	<b>1.008</b>	<b>1.297</b>	<b>3.411</b>	<b>unit</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan UKM Kota Solok

Dari tabel 3.1 diatas terlihat UMKMK di Kota Solok didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2013 tambahan jumlah UKM hanya terjadi pada usaha mikro, sedangkan pada usaha kecil terjadi peningkatan pada tahun 2016 menjadi 170 unit, bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 111 unit usaha. Permasalahan mendasar yang dihadapi UMKMK sehingga sulit untuk berkembang antara lain :

1. Akses pemasaran produk yang tidak memadai.
2. Standarisasi produk yang tidak terjaga.
3. Pemahaman dalam penghitungan keuangan yang rendah.
4. Permodalan yang rendah.
5. Kemampuan manajemen yang tidak memadai.
6. Orientasi target dan pengembangan produk yang rendah.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi UMKMK untuk berkembang mengisyaratkan bahwa, masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dari seluruh aspek yang berkaitan dengan penguatan usaha berorientasi pasar. Pembinaan dan pendampingan UMKMK dengan memakai pola inkubasi bisnis belum terimplementasi secara optimal. Hal ini masih terkendala karena belum adanya prasarana dan sarana pusat inovasi dan inkubasi bisnis daerah.

Teknologi informasi (TI) yang berkembang sangat cepat belum dapat mengatasi sebagian masalah UMKMK diatas. Meskipun peluang melalui TI sangat besar, namun adopsi TI oleh UKM dinilai masih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Kurangnya pemahaman UKM terhadap peran strategis TI tersebut, terkait dengan pendekatan baru pemasaran, interaksi dengan konsumen dan pengembangan produk menjadi hal yang menyebabkan rendahnya adopsi TI oleh UMKMK.

### c. Relatif rendahnya daya saing pariwisata daerah

Salah satu permasalahan daya saing pariwisata di Kota Solok adalah relative rendahnya pengembangan daya tarik wisata. Rendahnya daya saing menunjukkan masih banyaknya indikator yang masih menghambat pembangunan kepariwisataan di Kota Solok, hal ini disebabkan peningkatan daya tarik di destinasi pariwisata belum sesuai dengan kecenderungan minat pasar. Hal lain yang menjadi penyebab rendahnya daya saing pariwisata daerah adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia dan dukungan pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup potensial untuk menarik investor dan mempercepat pembangunan yang memberikan dampak yang cukup positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan pengembangan kepariwisataan diharapkan mampu menarik minat investor untuk menanamkan modal usahanya di Kota Solok, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat.

Perkembangan pariwisata di Kota Solok secara umum masih belum memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disebabkan minimnya fasilitas dan prasarana wisata yang ada, belum mampu mempengaruhi minat kunjungan wisata ke Kota Solok. Walaupun demikian, secara umum jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Solok sejak tahun 2013 mulai memperlihatkan peningkatan.

**Tabel 3.2**  
**Objek Wisata di Kota Solok dan Jarak dari Pusat Kota Tahun 2017**

No	Nama Objek Wisata	Jarak Dari Pusat Kota (km)	Keterangan
1	Taman Rekreasi Pulau Belibis	3	Telaga Habitat Burung Belibis
2	Sarasah batimpo Indah	5	Air Terjun
3	Puncak Payo	10	Panorama dengan latar Belakang Bukit Barisan dan Gunung Talang
4	Taman Bidadari	5	Taman Rekreasi
5	Taman Syech Kukut	0	Ruang terbuka hijau (taman Kota)
6	Laing Park	6	Wisata Alam, Arena Camping

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

Dari ke enam objek wisata diatas baru taman rekreasi Pulau Belibis yang sudah mulai dikembangkan secara optimal sejak tahun 2017 dan diharapkan pada tahun 2020 sudah selesai sesuai masterplan dan DED yang

sudah ada. Sedangkan untuk objek wisata lainnya akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

Selain objek wisata, sarana pendukung wisata lainnya yang masih perlu mendapat perhatian adalah sarana akomodasi yang masih terbatas di Kota Solok. Pada tahun 2017 tercatat hanya terdapat 6 sarana akomodasi kelas melati dengan kapasitas keseluruhan 125 kamar dengan 237 tempat tidur.

#### **d. Belum optimalnya pengembangan agribisnis**

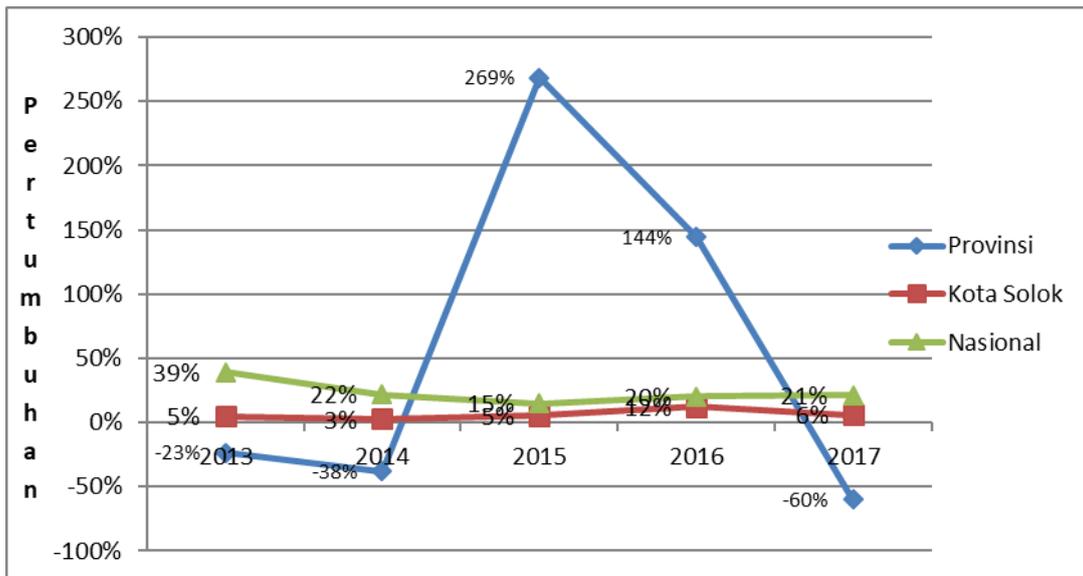
Pertumbuhan agribisnis belum berkembang secara optimal disebabkan masih rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Pengembangan bahan mentah menjadi barang jadi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal daerah. Agribisnis merupakan usaha berbasis pertanian atau bidang lain yang mendukungnya. Pengembangan agribisnis dilakukan untuk memberikan nilai tambah dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Rendahnya perkembangan agribisnis di Kota Solok disebabkan belum optimalnya penguatan kelembagaan, terbatasnya prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas SDM pelaku usaha.

#### **e. Rendahnya pertumbuhan nilai investasi**

Investasi merupakan salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Investasi akan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga mampu meningkatkan ketersediaan barang dan jasa. Melalui penciptaan iklim yang kondusif, diharapkan investasi akan meningkat yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Iklim investasi ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk berinvestasi, baik berupa investasi baru maupun perluasan investasi yang telah berjalan. Beberapa permasalahan dihadapi oleh Kota Solok, diantaranya belum adanya rencana umum investasi, rendahnya penyediaan faktor produksi (bahan baku, tanah, tenaga kerja) dan penyediaan infrastruktur, rendahnya daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, kurang tersedianya sumber daya alam dan belum optimalnya promosi peluang investasi.

Pertumbuhan investasi Kota Solok dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional dalam kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 3.3:

**Gambar 3.3**  
**Pertumbuhan Investasi Tahun 2013-2017**



Sumber : Dinas PMPTSP Kota Solok

Dari gambar 3.3 terlihat bahwa pertumbuhan investasi Kota Solok masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Jika pertumbuhan investasi di Kota Solok dibandingkan dengan pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat bahwa laju pertumbuhannya tidak sebanding. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan dan komitmen yang kuat untuk memberikan kekuatan menarik investor berinvestasi di Kota Solok.

Sehubungan dengan belum tersedianya Rencana Umum Investasi sebagai pedoman perencanaan investasi menjadi salah satu kendala penciptaan iklim investasi yang kondusif di Kota Solok. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya data dan informasi yang valid meliputi data potensi, infrastruktur dan regulasi, serta analisa tingkat pengembalian modal dan analisa resiko investasi.

Promosi investasi Kota Solok belum mampu menarik investor untuk berinvestasi karena belum memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan. Promosi investasi yang dilaksanakan saat ini belum memberikan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang optimal dan komprehensif untuk menyajikan informasi kepada investor terkait dengan nilai lebih berinvestasi di Kota Solok.

**f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengembangan ekonomi daerah (sarana pendukung)**

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah salah satu pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun, dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi pengembangan ekonomi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang selama ini dikenal sebagai asas “kebebasan arus informasi” diharapkan mampu memperkuat dan mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah.

**2. Relatif Rendahnya Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Solok**

Manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia berperan penting terhadap kualitas pembangunan daerah. Dari masalah utama rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, terdapat beberapa permasalahan antara lain:

**a. Relatif rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Solok sebesar 77,44 di tahun 2017. Capaian IPM Kota Solok jika dibandingkan dengan Kota Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh, masih relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan masih perlu ditingkatkan, terutama dengan memperhatikan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai perbandingan untuk IPM ini dapat dilihat pada tabel 3.3:

**Tabel 3.3**  
**IPM Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2017**

No	Kabupaten/Kota	IPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padang	79.23	79.83	80.36	81.06	81.58
2	Bukittinggi	77.67	78.02	78.72	79.11	79.80
3	Payakumbuh	76.34	76.49	77.42	77.56	77.91
4	Kota Solok	75.54	76.20	76.83	77.07	77.44

No	Kabupaten/Kota	IPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
5	Padang Panjang	74.54	75.05	75.98	76.50	77.01
6	Pariaman	74.51	74.66	74.98	75.44	75.71
7	Sawahlunto	69.07	69.61	69.87	70.67	71.13
8	Agam	68.73	69.32	69.84	70.36	71.10
9	Dharmasraya	68.71	69.27	69.84	70.25	70.40
10	Tanah Datar	68.12	68.51	69.49	70.11	70.37
11	Padang Pariaman	67.15	67.56	68.04	68.44	68.90
12	Pesisir Selatan	67.31	67.75	68.07	68.39	68.74
13	Lima Puluh Kota	66.30	66.78	67.65	68.37	68.69
14	Kab.Solok	66.15	66.44	67.12	67.67	67.86
15	Solok Selatan	65.86	66.29	67.09	67.47	67.81
16	Pasaman Barat	63.92	64.56	65.26	66.03	66.83
17	Sijunjung	64.48	64.95	65.30	66.01	66.60
18	Pasaman	62.91	63.33	64.01	64.57	64.94
19	Kepulauan Mentawai	56.33	56.73	57.41	58.27	59.25

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Indeks komposit sebagaimana tabel 3.3 didukung oleh beberapa indikator pendukung diantaranya adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita. Pada tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah Kota Solok 10,95 hal ini dapat diasumsikan rata-rata pendidikan di Kota Solok masih berada pada level kelas 1 SMA. Dilihat dari semua Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk **Rata-Rata Lama sekolah** Kota Solok berada pada urutan ke 4 di bawah Kota Padang Panjang, Kota Padang dan Kota Bukittinggi, sedangkan untuk angka **Harapan Lama Sekolah** masih berada pada urutan ke 5, di bawah Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel 3.4:

**Tabel 3.4**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2013 - 2017**

No	Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padang Panjang	10.53	10.79	11.09	11.42	11.43
2	Padang	10.89	10.93	10.97	11.24	11.32
3	Bukittinggi	10.66	10.71	10.79	10.98	11.30
4	Kota Solok	10.72	10.75	10.77	10.79	10.95
5	Payakumbuh	9.93	9.96	10.29	10.30	10.45
6	Pariaman	9.88	9.94	9.96	10.09	10.10
7	Sawahlunto	9.45	9.65	9.66	9.92	9.93
8	Agam	8.09	8.10	8.17	8.18	8.39
9	Dharmasraya	7.94	7.99	8.03	8.23	8.24
10	Tanah Datar	7.78	7.80	7.93	8.12	8.14
11	Pesisir Selatan	8.05	8.10	8.11	8.12	8.13
12	Solok Selatan	7.80	7.97	7.98	7.99	8,00
13	Lima Puluh Kota	7.58	7.59	7.91	7.92	7.96
14	Pasaman Barat	7.50	7.53	7.83	7.84	7.85
15	Sijunjung	7.30	7.32	7.33	7.50	7.72
16	Pasaman	7.60	7.62	7.63	7.64	7.65
17	Kab.Solok	7.53	7.56	7.57	7.58	7.60
18	Padang Pariaman	6.86	6.88	6.89	7	7.21
19	Kepulauan Mentawai	6.17	6.19	6.27	6.52	6.69

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

**Tabel 3.5**  
**Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2013 – 2017**

NO	Wilayah	Harapan Lama Sekolah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padang	14.65	15.20	15.60	15.87	16.15
2	Padang Panjang	14.56	14.73	15.01	15.02	15.03
3	Bukittinggi	14.47	14.65	14.92	14.93	14.94
4	Pariaman	14.43	14.48	14.49	14.50	14.51
5	Kota Solok	13.75	14.26	14.27	14.28	14.29
6	Payakumbuh	14.13	14.18	14.21	14.22	14.23
7	Agam	13.08	13.58	13.59	13.73	13.94
8	Tanah Datar	12.61	12.82	13.35	13.46	13.59
9	Padang Pariaman	13.23	13.54	13.54	13.55	13.56
10	Lima Puluh Kota	12.10	12.41	12.76	13.25	13.26
11	Sawahlunto	12.52	12.68	12.69	13.05	13.14
12	Pesisir Selatan	12.83	13.02	13.04	13.05	13.06
13	Pasaman Barat	11.83	12.29	12.30	12.67	13.06
14	Kab.Solok	12.41	12.53	12.88	13,00	13.01
15	Pasaman	12.45	12.69	12.70	12.71	12.72
16	Solok Selatan	12.03	12.15	12.37	12.51	12.68
17	Dharmasraya	11.79	12.19	12.36	12.39	12.40
18	Sijunjung	11.61	11.91	11.94	12.27	12.34
19	Kepulauan Mentawai	11.22	11.35	11.48	11.74	12.07

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Angka Harapan Hidup di Kota Solok pada tahun 2013 sebesar 72,33 tahun menjadi sebesar 72,92 tahun 2017. Angka Harapan Hidup ini berada pada urutan ke 4, dibawah Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Padang. Dengan angka ini menunjukkan bahwa pembangunan dibidang kesehatan perlu lebih dioptimalkan, sebagaimana terlihat pada tabel 3.6:

**Tabel 3.6**  
**Angka harapan Hidup Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2013 - 2017**

Wilayah	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru				
	Angka Harapan Hidup				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kepulauan Mentawai	63.53	63.55	64.05	64.36	64.37
Pesisir Selatan	69.43	69.46	69.96	70.11	70.23
Kab.Solok	66.90	66.95	67.35	67.50	67.65
Sijunjung	64.72	64.72	65.22	65.33	65.44
Tanah Datar	68.28	68.35	68.75	68.93	69.11
Padang Pariaman	67.18	67.24	67.64	67.80	67.96
Agam	70.78	70.80	71.30	71.44	71.57
Lima Puluh Kota	69.19	69.22	69.23	69.27	69.31
Pasaman	65.73	65.76	66.26	66.40	66.54
Solok Selatan	66.02	66.04	66.64	66.78	66.92
Dharmasraya	69.72	69.76	70.16	70.30	70.44
Pasaman Barat	66.90	66.93	67.03	67.09	67.15
Padang	73.18	73.18	73.19	73.19	73.20
Kota Solok	72.33	72.34	72.74	72.83	72.92
Sawahlunto	69.14	69.17	69.27	69.33	69.39
Padang Panjang	72.44	72.44	72.45	72.45	72.46
Bukittinggi	73.12	73.12	73.52	73.60	73.69
Payakumbuh	72.43	72.43	72.93	73.03	73.13
Pariaman	69.48	69.49	69.59	69.63	69.67
<b>SUMATERA BARAT (Provinsi)</b>	<b>68.21</b>	<b>68.32</b>	<b>68.66</b>	<b>68.73</b>	<b>68.78</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Peningkatan usia harapan hidup menandakan adanya perbaikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan posisi Kota Solok yang berada pada posisi perlintasan, dimana mobilisasi penduduk tinggi sehingga menjadi rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan seperti penyakit menular dan tidak menular, gizi masyarakat, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain.

Untuk mencapai pelayanan yang baik bagi masyarakat, pelayanan kesehatan diselenggarakan dari tingkat dasar atau primer oleh puskesmas dan jaringannya dan diikuti dengan pelayanan rujukan atau sekunder. Dalam hal

pelayanan primer, Pemerintah Kota Solok telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang ditandai dengan telah terakreditasinya ke empat puskesmas di Kota Solok tahun 2016 dan 2017. Tetapi masih pada tingkat empat (akreditasi dasar) dan tiga (akreditasi madya). Hal ini mengindikasikan kualitas pelayanan yang diberikan belum sesuai sebagaimana yang diharapkan karena belum mencapai tingkat 2 (akreditasi utama) atau bahkan tingkat 1 (akreditasi paripurna) untuk semua puskesmas. Terhadap pelayanan kesehatan milik swasta (praktek bidan mandiri, praktek dokter mandiri, Rumah Sakit Swasta), semua pelayanan kesehatan itu belum ada yang terakreditasi sementara sebagian masyarakat Kota Solok juga memanfaatkan pelayanan kesehatan ini.

Terhadap pelayanan kesehatan rujukan atau sekunder, sampai tahun 2017 masyarakat Kota Solok dilayani oleh Rumah Sakit Tipe D milik TNI-AD, Rumah Sakit Umum Daerah Solok (RSUD Solok) tipe B milik Pemerintah Provinsi yang menjadi rujukan untuk daerah Regional Sumatra Barat Bagian Tengah dan beberapa rumah sakit khusus ibu dan anak. Keberadaan rumah sakit ini belum dapat melayani kesehatan masyarakat secara maksimal, oleh sebab itu perlu adanya prasarana pelayanan kesehatan yang lebih spesifik dan modern.

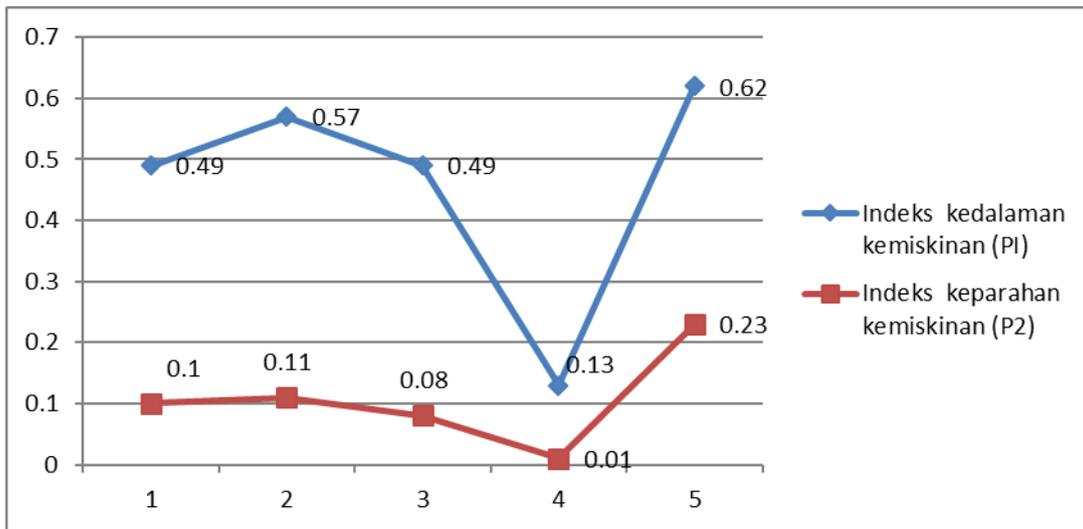
#### **b. Belum optimalnya penanganan masalah kemiskinan**

Sampai tahun 2017 kinerja penanganan kemiskinan di Kota Solok cukup baik yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan sampai 3,66%. Tetapi jika dilihat dari Indek kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan angka yang cukup signifikan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indek Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran ketimpangan pengeluaran penduduk miskin atau Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dalam gambar 3.4 disajikan tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan Kota Solok dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

**Gambar 3.4**  
**Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan**  
**Indek Keparahan Kemiskinan di Kota Solok Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Kota Solok (data diolah)

Berdasarkan gambar 3.4 dapat dijelaskan bahwa sampai tahun 2016 tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Kota Solok menunjukkan *trend* menurun. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan tingkat kedalaman kemiskinan dari 0.13 menjadi 0.62, sedangkan tingkat keparahan meningkat dari 0.01 menjadi 0.23. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat miskin Kota Solok pada tahun 2017 semakin jauh dari garis kemiskinan dan terjadi ketimpangan pendapatan antar sesama masyarakat miskin. Dengan semakin bertambahnya angka kedalaman dan keparahan, maka fokus penanggulangan kemiskinan akan diarahkan kepada pengurangan gap P1 dan P2.

**c. Belum Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Budaya dan Pelayanan Lembaga Sosial Keagamaan**

Penyelenggaraan kegiatan budaya pada saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan, dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat melalui kualitas penyelenggaraan kegiatan kebudayaan ditengah – tengah masyarakat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya prasarana dan sarana yang representatif yang mendukung terhadap pelestarian dan pengembangan pemanfaatan budaya serta derasnya arus budaya global sehingga pertumbuhan minat generasi untuk melestarikan budaya lokal berjalan stagnan.

Penyelenggaraan pelayanan lembaga sosial keagamaan belum berjalan secara optimal, dapat dilihat dari pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid melalui Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Hambatan yang dihadapi oleh Kota Solok terkait dengan pengembangan aktivitas simpan pinjam berbasis mesjid adalah masih kuatnya pengaruh ekonomi berbasis rentenir.

Berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, masih kurangnya peran lembaga pengelola Badan Amil Zakat (BAZ). Hal ini dapat dilihat dari kecilnya animo masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Sehingga zakat yang terkumpul dan dibagikan oleh BAZ baru dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok penerima, tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan penerima zakat itu sendiri.

### **3. Belum Optimalnya Penerapan Reformasi Birokrasi**

Sampai tahun 2017 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Solok masih 61,07, artinya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kota Solok masih perlu ditingkatkan agar mampu mencapai level yang lebih baik dan hasil yang optimal. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi, memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai langkah tertuang dalam *roadmap* reformasi birokrasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Penguatan tersebut di antaranya dengan memelihara dan memperkuat kondisi yang telah baik, melanjutkan upaya perubahan, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi serta memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua usaha dan kerja keras tersebut bertujuan untuk membawa birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta pelaku birokrasi yang memiliki kemampuan pelayanan publik yang berkualitas. Idealnya kondisi ini terdapat dalam birokrasi pemerintahan yang baik. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan reformasi birokrasi tersebut.

#### **a. Penataan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya diterapkan**

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. *Good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik di Kota Solok masih belum dapat diimplementasikan keseluruhannya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari penilaian kinerja pemerintah Kota Solok pada tahun 2017 berada pada level B dengan nilai 64,64. Belum semua Perangkat Daerah menggunakan *e-government* dan partisipasi masyarakat masih berada pada tatanan proses perencanaan, namun belum berperan dalam mekanisme pengawasan.

#### **b. Manajemen pelayanan publik yang belum maksimal**

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam pelayanan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah dikatakan baik jika pelayanan publik dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2017 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75,62 (Baik). Artinya bahwa pelayanan terhadap masyarakat telah dapat memuaskan, namun masih belum maksimal. Pelayanan publik belum maksimal diantaranya disebabkan oleh keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pelayanan publik dan komitmen pelaksanaan SOP pelayanan.

#### **c. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP, sehingga mempengaruhi capaian tujuan Pemerintah Daerah. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia APIP, tidak sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh APIP itu sendiri.

#### **4. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kota dalam Pembangunan yang Berkelanjutan**

Infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan aksesibilitas maka percepatan pembangunan akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi pembangunan infrastruktur Kota Solok masih perlu diperhatikan. Dengan hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi infrastruktur dari berbagai sektor pembangunan. Permasalahan ini dipicu oleh beberapa hal yang sebagai berikut:

##### **a. Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman**

Salah satu permasalahan pembangunan di perkotaan adalah munculnya arus urbanisasi yang semakin deras, akibat ketimpangan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan di desa. Dengan adanya urbanisasi menimbulkan dampak terhadap penyediaan perumahan dan permukiman, pelayanan air bersih dan penyediaan infrastruktur lainnya. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan perumahan dan permukiman seperti jalan lingkungan, saluran drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah dan air limbah.

##### **b. Masih Rendahnya Tingkat Pelayanan Infrastruktur Jalan**

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya agar dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Jalan merupakan faktor penunjang utama pembangunan, baik pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun infrastruktur lainnya. Pada tahun 2017 panjang jalan di Kota Solok adalah 236,38 km terdiri dari jalan negara 12,08 km, jalan provinsi 2,60 km dan jalan kota 221,7 km.

Berdasarkan data panjang jalan di atas, diketahui bahwa masih terdapat 22,25 % jalan dengan kondisi rusak (52,6 km) sehingga tingkat kemantapan jalan baru 77,8 % (184,2 km). Kondisi ini mempengaruhi aktivitas masyarakat pengguna jalan yang menuju pusat perekonomian, karena kapasitas pelayanan

jalan tidak memadai, hal ini terlihat dari rendahnya kecepatan rencana jalan dan terjadinya kemacetan pada jam tertentu.

### **c. Belum optimalnya sistem pengelolaan lingkungan hidup**

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kondisi lingkungan Kota Solok terlihat belum tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, sistem pengelolaan lingkungan hidup yang masih lemah dan belum tersistematis. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat mengenai pelestarian lingkungan juga masih perlu ditingkatkan. Pemerintah harus lebih menekankan agar masyarakat sadar dengan kondisi lingkungan hidup dan mau berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup demi masa depan anak cucu dimasa yang akan datang.

## **3.2 ISU STRATEGIS**

Isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang fokus dan prioritas penanganan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah. Hal ini memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada akhir tahun perencanaan. Isu strategis seharusnya menjadi prioritas untuk dilakukan antisipasi dan penanganannya, agar peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu strategis ini tidak ditangani dengan baik, maka sebaliknya yang akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan sulit dicapai.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditanggulangi dalam periode yang akan datang.

### **3.2.1 Isu Internasional**

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia, dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara, dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup, hingga ancaman menipisnya sumber daya alam yang tak terbaharui menjadi semakin langka.

Isu strategis pada tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang untuk Kota Solok antara lain: capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), ancaman krisis ekonomi global, globalisasi ekonomi dunia, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, demokratisasi, serta Hak Asasi Manusia (HAM).

**a. *Sustainable Development Goals (SDGs)***

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan *MDGs* mencerminkan upaya untuk mensejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *MDGs* memiliki konsep jelas dengan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian *MDGs* tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Program *MDGs* yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September 2015 di New York, USA. *SDGs* tidak terpisah dari *MDGs* dan merupakan penyempurnaan dari *MDGs*. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (*SDGs*). Rumusan *SDGs* terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dengan capaian lebih jelas dan terukur, untuk menciptakan masyarakat dunia tahun 2030 yang jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan *SDGs* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;

4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam *SDGs* membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi

juga negara maju, rumusan *SDGs* merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kota Solok, rumusan *SDGs* dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

**b. Ancaman Krisis Ekonomi Global**

Ketidakpastian ekonomi global juga terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia. Begitu juga dengan Kota Solok, akibat pengaruh krisis ekonomi global secara tidak langsung memperlambat pertumbuhan ekonomi.

**c. Globalisasi Ekonomi Dunia**

Globalisasi perekonomian merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Salah satu pelaku globalisasi ekonomi dunia itu adalah kelompok Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA merupakan aliansi ekonomi antara negara-negara ASEAN dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri negara-negara yang menjadi anggota aliansi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada arah kebijakan ditingkat nasional dan pada gilirannya akan beresonansi ketingkat daerah termasuk di Kota Solok. Oleh karena itu ketika merumuskan isu strategis Kota Solok, patut memperhatikan dan memperhitungkannya sehingga masyarakat kedepannya akan siap beradaptasi.

**d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)**

Kualitas lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Sehingga terjadinya *Global warming* yang menjadi efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Untuk itu perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam

menyikapi *global warming*. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari.

**e. Kemajuan *Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)* yang Semakin Pesat**

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin membaik, dan mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai strata kehidupan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada. Sehingga Indonesia dapat memanfaatkan peluang dengan adanya kemajuan teknologi tersebut. Kota Solok harus mampu memanfaatkan peluang yang ada ini dengan mempersiapkan sumber daya manusianya, prasarana dan sarana pendukung dan kebijakan serta regulasi.

### **3.2.2 Isu Atau Kebijakan Nasional**

**a. Telaahan RPJPN 2005-2025**

Pembangunan nasional merupakan fokus utama pemerintah daerah dalam merumuskan setiap perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi perhatian khusus karena dalam pencapaian tujuan nasional memerlukan sinkronisasi, integrasi, serta keselarasan pada setiap tahapan pembangunan. Pembangunan daerah sebagai pendukung utama tercapainya target pembangunan nasional harus memastikan dokumen perencanaannya bersinergi dengan pembangunan nasional. Tela'ahan terhadap RPJPN bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan sasaran pembangunan pada setiap tahapan lima tahunan. Pemahaman terhadap arah dan sasaran pembangunan jangka panjang memandu RPJPD Kota Solok agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Adapun tahapan dan skala prioritas pada RPJPN 2005-2025 ditampilkan pada tabel 3.7:

**Tabel 3.7**  
**Tahap dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025**

<p align="center"><b>RPJM I</b> <b>(2005-2009)</b></p>	<p><b>Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik</li> </ul>
<p align="center"><b>RPJM II</b> <b>(2010-2014)</b></p>	<p><b>Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah</li> </ul>
<p align="center"><b>RPJM III</b> <b>(2014-2019)</b></p>	<p><b>Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK</li> </ul>
<p align="center"><b>RPJM IV</b> <b>(2020-2024)</b></p>	<p><b>Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</li> </ul>

*Sumber : RPJPN 2005-2025*

**b. Pemilihan Umum Tahun 2019**

Dalam paradigma pemerintahan sekarang ini tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik yang cukup panas. Pemilihan Kepala Daerah yang telah dilakukan pada tahun 2018 mampu menumbuhkan semangat demokrasi yang cukup tinggi dalam masyarakat Indonesia. Dengan tahun politik yang cukup panas ini perlu menjadi isu yang krusial yang harus dicermati oleh setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Terlebih pada tahun 2019 akan diadakan pemilihan presiden dan legislatif, secara tidak langsung dimungkinkan akan terjadi kebijakan pusat yang berimbas terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dengan ini Pemerintah Kota Solok perlu

mewaspadaikan dan mempertimbangkan segala aspek dan kemungkinan yang akan terjadi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

### **c. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024**

Dengan adanya undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 201 menyatakan bahwa akan diadakannya pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diseluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, terutama bagi Pemerintah Daerah Kota Solok bahwa dimungkinkan akan terjadi gejolak politik yang cukup luar biasa dampaknya, karena seluruh wilayah Indonesia mengadakan pemungutan suara serentak.

## **3.2.3 Isu Atau Kebijakan Daerah**

### **a. Telaahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025**

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan kebijakan Provinsi yang selaras dan bisa dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kota Solok, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat. Perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat memiliki visi pembangunan “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamis Pada Tahun 2025”. Untuk mewujudkan visi daerah Sumatera Barat, dibutuhkan berbagai upaya yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik ;
3. Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi;

4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia Global;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

#### **b. Telaahan RTRW Kota Solok**

Penataan ruang wilayah Kota Solok perlu dikelola pemanfaatannya secara optimal, agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Sebagai salah satu bentuk sumberdaya alam, ruang tidak mengenal batas wilayah. Namun jika dikaitkan dengan pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan sistemnya. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar dapat menurunkan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan. Berikut diuraikan program pembangunan wilayah strategis dalam RTRW Kota Solok.

Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Fungsi kawasan strategis adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
- b) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
- c) Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
- d) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota;
- e) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

Kawasan strategis Kota Solok meliputi:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- 2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dan merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
  - a. Kawasan Pasar Kota Solok berlokasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Koto Panjang, dan Kelurahan Kampung Jawa;
  - b. Kawasan Wisata Pulau Belibis berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa;
  - c. Kawasan Strategis Terminal Barih Solok di Kelurahan Simpang Rumbio; dan
  - d. Kawasan Agribisnis di Kelurahan Tanah Garam.
- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam dengan kawasan penyangganya yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam.

#### 3.2.4 Isu Strategis Kota Solok

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka **isu strategis Kota Solok** adalah sebagai berikut:

##### 1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah terlihat dari Rata - rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 10,75 tahun artinya rata - rata pendidikan masyarakat Kota Solok baru level 1 SMA. Permasalahan lebih banyak terletak pada aspek kualitas layanan pendidikan dari segi pemerataan distribusi siswa

per sekolah, meskipun capaian APK pendidikan dasar dan menengah relatif tinggi. Khusus untuk pendidikan kejuruan, disamping belum adanya keselarasan antara persepsi dunia kerja dan kualitas lulusan SMK yang dihasilkan, juga belum mampu mendorong penciptaan wirausahawan muda. Kenyataan ini merupakan tantangan yang cukup berat untuk menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Disamping itu, jika dimanfaatkan posisi Kota Solok yang terletak di persimpangan jalan utama beberapa daerah di dalam Provinsi Sumatera Barat akan sangat berpotensi untuk dikembangkannya perguruan tinggi yang menjadi alternatif bagi masyarakat daerah *hinterland*.

Kemudian di bidang kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat dan pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan yang lebih profesional. Peningkatan layanan di bidang kesehatan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian adalah angka kematian bayi yang meskipun di bawah rata-rata nasional, tetapi untuk wilayah kota yang kecil seperti Kota Solok, angka ini masih cukup tinggi, sehingga perlu ditekan melalui berbagai upaya program kesehatan. Kemudian prevalensi balita pendek masih belum dapat dikendalikan secara maksimal. Di samping itu posisi Kota Solok yang berada dipersimpangan dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan pola hidup masyarakat yang sudah mulai bergeser pada sifat individual, menjadikan masyarakat rawan terhadap perkembangan penyakit menular seperti HIV/AIDS. Untuk Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta akses pelayanan kesehatan daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata. Hal yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah ketersediaan dokter. Dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Kota Solok ketersediaan dokter sampai tahun 2017 adalah 1 : 2.982. Dibandingkan dengan standar Nasional, satu orang dokter melayani 2.500 penduduk atau dalam 100.000 penduduk dilayani oleh 40 dokter. Dapat disimpulkan bahwa jumlah dokter di Kota Solok belum memenuhi standar nasional.

## **2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah**

Sumber daya daerah yang dimiliki oleh Kota Solok belum maksimal pengelolaannya, sehingga belum dapat menjadi potensi daerah yang berdaya saing. Dengan meningkatkan daya saing sumberdaya daerah, maka mampu meningkatkan potensi-potensi yang belum berkembang menjadi potensi unggulan daerah. Pengelolaan potensi yang berdaya saing diharapkan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan daya saing UKM, industri dan agribisnis menjadi isu pembangunan daerah, karena merupakan sektor dominan yang menggerakkan ekonomi Kota Solok. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan yang mendorong perkembangan UMKMK, industri dan agribisnis dalam membenahan manajemen dan kelembagaan, penguasaan teknologi, inovasi dan diversifikasi produk, peningkatan akses produk dan perluasan pasar, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja perlu menjadi prioritas kedepannya. Hal ini dikuatkan dengan perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peluang dan kesempatan kerja. Akibat kesenjangan ini banyak terjadi pengangguran, sehingga menambah jumlah angka kemiskinan. Salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja diiringi dengan meningkatnya kompetensi pencari kerja.

## **3. Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan**

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata, menjadi salah satu kendala utama pembangunan daerah. Kesenjangan ketersediaan infrastruktur akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok saat ini, perlu perhatian untuk menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungannya. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang berkelanjutan.

Belum optimalnya sistem pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan regulasi, SDM aparatur, prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan hidup mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Disamping

itu pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih rendah dalam mendukung upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu ditingkatkan ketersediaan regulasi, kompetensi aparatur, ketersediaan prasarana dan sarana dengan pengelolaan lingkungan hidup yang memadai. Kondisi saat ini masih terbatasnya regulasi baik peraturan daerah maupun peraturan walikota, yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan pengelolaan persampahan maupun pengelolaan air limbah.

#### **4. Implementasi Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan kata lain reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

#### **5. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah**

Posisi Kota Solok yang terletak di persimpangan jalan utama beberapa daerah di dalam Provinsi Sumatera Barat berpotensi terhadap masuknya pengaruh- pengaruh negatif terhadap nilai - nilai adat dan budaya lokal yang berlandaskan ABS-SBK "Syara' mangato adaik mamakai". Disamping itu juga, sulit membendung dampak lintas informasi melalui berbagai media yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Akibatnya terjadi gejala pergeseran nilai-nilai agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat, sehingga menjauhkan masyarakat dari sikap mental yang mencerminkan kehidupan madani, ditandai dengan kehidupan yang aman, damai, tentram, harmonis,

beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat belum seperti yang diharapkan. Masih rentannya karakter masyarakat, terutama generasi muda dapat dengan mudah dipengaruhi oleh budaya asing serta pergaulan yang bebas, rentan terhadap peredaran gelap narkoba, menyebabkan pendidikan karakter perlu menjadi penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, agar gejala pergeseran nilai-nilai dan budaya ke arah yang kurang baik ini tidak berkembang lebih cepat dan merugikan generasi muda, maka perlu diantisipasi atau dicegah melalui penguatan nilai-nilai agama, adat dan budaya.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI DAERAH**

Visi dan misi RPJPD merupakan gambaran mengenai apa yang ingin dicapai oleh Kota Solok pada akhir tahun 2025. Visi dan misi mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai dan dengan kebijakan apa cita-cita masyarakat tersebut akan diwujudkan dalam pembangunan. Pernyataan visi dan misi yang baik, dapat mengarahkan perumusan kebijakan pembangunan lebih fokus dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dan misi menjadi panduan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan dilakukan secara bertahap dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini ditetapkan berdasarkan cita-cita, aspirasi, dan keinginan masyarakat Kota Solok secara keseluruhan, dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah *eksisting* dan isu strategis daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah, dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang sama.

#### **4.1 VISI RPJPD KOTA SOLOK 2005-2025**

Visi pembangunan Kota Solok diformulasikan dalam bentuk yang ringkas, singkat, padat, namun penuh makna dan menggambarkan keinginan bersama seluruh lapisan masyarakat Kota Solok. Visi tersebut akan menjadi pedoman dan arah dalam melaksanakan pembangunan daerah hingga tahun 2025. Oleh sebab itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan dan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan, sehingga terwujud keterpaduan dan keserasian antara peran pemerintah daerah, peran masyarakat dan dunia usaha dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok 2005-2025 ditetapkan Visi “*SOLOK MENJADI KOTA SENTRA PERDAGANGAN, JASA DAN PENDIDIKAN DI SUMATERA BAGIAN TENGAH TAHUN 2025*”. Selanjutnya Visi Kota Solok sebagaimana tersebut di atas dilakukan perubahan dan penyesuaian menjadi :

***SOLOK MENJADI KOTA SENTRA PERDAGANGAN, JASA DAN  
PENDIDIKAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2025***

Perubahan Visi yang dikemukakan diatas, pada prinsipnya adalah dalam rangka penyesuaian keinginan masyarakat dengan capaian pelaksanaan pembangunan sesuai karakteristik kearifan daerah yang terintegrasi. Visi Kota Solok dalam periode 2005-2025 Kota Solok akan menjadi kota yang berbasis perdagangan dan jasa, dengan kemandirian SDM yang mempunyai tingkat pendidikan yang berkualitas. Kota Solok sebagai sentra perdagangan dan jasa ditetapkan berdasarkan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pembentuk PDRB. Dengan mengedepankan perdagangan sebagai sentra, diharapkan mampu membentuk tujuan akhir pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) elemen utama yaitu:

**Sentra Perdagangan Dan Jasa** : Kota Solok dalam kurun waktu hingga 2025 menjadikan perdagangan dan jasa sebagai sektor utama, juga secara bertahap berperan penting sebagai penggerak sentra perdagangan dan jasa di Sumatera Barat.

**Sentra Pendidikan** : Mutu pelayanan pendidikan di Kota Solok akan terus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga Kota Solok menjadi rujukan pelayanan pendidikan.

## 4.2 MISI RPJPD KOTA SOLOK 2005-2025

Misi pembangunan, pada dasarnya merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah. Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Solok sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan sektor perdagangan dan jasa yang berdaya saing**
- 2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas**
- 3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih**
- 4. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamais dan berbudaya**
- 5. Meningkatkan Daya Dukung Kota yang berwawasan Lingkungan**

Penjelasan dari masing-masing misi di atas adalah sebagai berikut:

### 1. Mewujudkan Sektor Perdagangan Dan Jasa Yang Berdaya Saing

Misi untuk mewujudkan sektor perdagangan dan jasa yang berdaya saing merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi dapat diwujudkan dengan menciptakan kondisi persaingan yang sehat dalam dunia usaha, pengembangan kewirausahaan, peningkatan prasarana dan sarana ekonomi. Disamping itu juga perlu mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Untuk periode yang akan datang, sektor unggulan primer, sekunder maupun tersier akan dikembangkan dengan memperkuat daya saingnya di provinsi Sumatera Barat.

### 2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mendukung kondisi tersebut diatas, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar

utama, yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi di semua strata, tenaga kerja yang berkualitas serta derajat kesehatan yang tinggi dan merata ke seluruh lapisan masyarakat dan terdapatnya kesetaraan gender dalam berbagai dimensi pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya komitmen dan kebijakan Pemerintah Daerah.

### **3. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**

Tata pemerintahan yang baik dan bersih dapat mendorong proses pembangunan Solok menjadi kota sentra perdagangan, jasa dan pendidikan. Tata pemerintahan yang baik dan bersih diwujudkan melalui reformasi birokrasi dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu memberikan pelayanan publik yang baik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

### **4. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamais dan Berbudaya**

Kehidupan masyarakat yang harmonis perlu diwujudkan untuk pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan nilai kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Masyarakat yang agamais dan berbudaya merupakan landasan utama masyarakat Minangkabau. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama oleh masyarakat Kota Solok. Pemerintah Kota Solok dalam mewujudkan landasan filosofis tersebut berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan dan mengimplementasikannya dalam tata pemerintahan dan masyarakat.

### **5. Meningkatkan Daya Dukung Kota yang Berwawasan Lingkungan**

Daya dukung kota yang berwawasan lingkungan harus selalu ditingkatkan sebagai upaya untuk melakukan penguatan terhadap sistim penggunaan fungsi ruang kota dalam menunjang kegiatan perekonomian dan sosial budaya. Ketersediaan prasarana dan sarana, utilitas dan lingkungan yang sehat akan mewujudkan Kota Solok menjadi kota sentra perdagangan, jasa dan pendidikan.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Visi dan Misi RPJPD menjadi komitmen daerah dan akan dilaksanakan dalam pembangunan 20 tahunan. Target kinerja dalam kurun waktu 20 tahun tersebut dicapai melalui target 5 (lima) tahunan, sesuai dengan sasaran pokok masing-masing misi. Arah kebijakan pembangunan menunjukkan agenda dan tema yang merupakan fokus utama pembangunan lima tahunan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam empat periode lima tahunan pembangunan melalui arah kebijakan pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, kurun waktu RPJP Daerah mengikuti atau sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sehubungan dengan perubahan RPJPD ini maka perencanaan pembangunan lima tahunan tahap I atau RPJMD 2006-2010 dan RPJPD tahap II atau RPJMD 2010-2015 merupakan kebijakan pembangunan yang telah terealisasi, sedangkan RPJPD Tahap III atau RPJMD 2016-2021 merupakan kebijakan yang sedang berjalan dan RPJPD Tahap IV merupakan tahap akhir yang akan menjadi fokus penyelesaian target-target yang belum tercapai dalam RPJPD ini.

#### **5.1. ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 20 tahun diterjemahkan masing-masing prioritasnya pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan arah kebijakan dan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan untuk mencapai sasaran pokok.

Arah kebijakan dalam setiap tahapan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ingin diwujudkan, saling terkait dan memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tahap I dan II RPJPD atau RPJMD (2006-2010) dan RPJMD (2010-2015) merupakan kebijakan pembangunan yang telah terealisasi, sedangkan RPJPD tahap III atau RPJMD (2016-2021) merupakan kebijakan yang sedang berjalan dan RPJPD Tahap

IV merupakan tahap akhir yang akan menjadi fokus penyelesaian target-target yang belum tercapai dalam RPJPD ini.

#### **A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHAP I**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahap I dilaksanakan melalui RPJMD tahun 2005-2010 dengan Visi "*Terciptanya tata pemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance), meningkatnya ekonomi rakyat, meningkatnya kualitas pendidikan dan tersedianya Infrastruktur kota yang memadai, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat*". Tema ini mengarahkan pada pemanfaatan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik '*good local governance*', dengan memicu pertumbuhan ekonomi, pemerataan kualitas pendidikan dan meningkatkan pengendalian faktor kesehatan dan penyediaan infrastruktur.

Visi pembangunan tahap I tersebut, dituangkan ke dalam misi dan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

##### **1. Misi I : Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa Berdaya Saing**

Untuk mencapai pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa pada tahap ini dalam rangka mewujudkan perdagangan dan jasa yang berdaya saing, arah kebijakan yang telah dilakukan adalah :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan.

Hal ini telah dilakukan melalui penataan dan pengembangan fasilitas pasar dan pertokoan yang ada. Pada tahap ini juga dilakukan perencanaan dan pembangunan pasar eks kantor pos.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK.

Untuk peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK pada tahap ini, telah dilaksanakan peningkatan pembinaan UMKMK, meningkatkan produktifitas UMKM dan meningkatkan fasilitasi UMKMK untuk mengakses pasar dan permodalan. Untuk penyediaan *Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis* di Kota Solok, pada tahap ini masih dilakukan dalam bentuk kajian pembangunan Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis. Hasil kajian ini nantinya akan dilakukan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang telah ada dan mencari kemungkinan untuk dapat mengembangkan produk-produk baru (inovasi) dengan bahan baku lokal dan menggunakan teknologi tepat guna.

c. Pengembangan agribisnis yang berdaya saing.

Dalam rangka mengupayakan agribisnis yang berdaya saing, pada tahap ini telah dilakukan kajian kawasan untuk kegiatan agribisnis yang meliputi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui pengembangan agribisnis. Disamping itu juga telah dilaksanakan penguatan sistem dan kelembagaan sarana produksi dan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang efisien.

d. Pengembangan destinasi wisata.

Untuk pengembangan pariwisata, pada tahap ini telah dilakukan pembenahan objek wisata yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, pembenahan manajemen usaha pariwisata juga telah mulai dilakukan, khususnya dalam meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan objek wisata.

e. Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi dan promosi investasi.

Untuk peningkatan pertumbuhan nilai investasi telah dilakukan penataan pola kerjasama investasi yang produktif dan pengembangan sistem promosi yang efektif. Disamping itu juga dikembangkan pola investasi berbasis kemitraan yang melibatkan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, masyarakat dan swasta.

**2. Misi II : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.**

Untuk mewujudkan misi II, arah kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahap I adalah :

a. Pelayanan dan pemerataan kualitas pendidikan.

Pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas didukung dengan sarana dan prasarana. Disamping itu juga telah dilakukan pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Kota Solok, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah umum dan kejuruan.

b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, rehabilitasi puskesmas dan sarana kesehatan lainnya, penyediaan tenaga medis dan peralatan

medis, obat-obatan yang memadai diikuti oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

c. Pembangunan kepemudaan dan prasarana dan sarana olahraga.

Pembangunan kepemudaan dan prasarana dan sarana olahraga dilakukan melalui pemetaan keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan pemuda yang profesional, melakukan pemberdayaan organisasi pemuda, peningkatan wawasan, keterampilan dan kewirausahaan generasi muda. Disamping itu juga dilakukan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan pembekalan instruktur olahraga.

d. Pemberdayaan keluarga miskin.

Pemberdayaan keluarga miskin dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui integrasi program kemiskinan.

**3. Misi III : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.**

Untuk mewujudkan misi III pada tahap I, arah kebijakan yang telah dilaksanakan adalah:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Prinsip tata pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*) dilakukan melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif. Seiring dengan itu juga dilakukan peningkatan efektifitas, efisiensi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan. Untuk penyelenggaraan dan pengendalian pemerintahan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Etika Pemerintahan Daerah.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan sumber daya aparatur.

Dilakukan melalui penataan kelembagaan pelayanan publik dan penyediaan sarana dan prasarana serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal dan non formal.

c. Penguatan fungsi pengawasan internal.

Dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan dan penataan kelembagaan dan tatalaksana dibidang pengawasan.

#### **4. Misi IV : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamais dan Berbudaya.**

Untuk mewujudkan misi IV, pada tahap I arah kebijakan yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat.  
Dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi *stakeholders* keagamaan, meningkatkan pendidikan akhlak untuk generasi muda, baik melalui sekolah, masjid maupun organisasi sosial keagamaan lainnya. Disamping itu juga diupayakan untuk menekan angka kejahatan dan penyakit masyarakat.
- b. Meningkatkan fungsi rumah ibadah.  
Dilakukan melalui peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana rumah ibadah yang representatif.
- c. Meningkatkan wadah kreatifitas pelestarian adat dan budaya.  
Dilakukan dengan mengaktifkan panggung pidato adat, sasaran silek dan kesenian tradisional lainnya. Untuk menunjang kreatifitas adat dan budaya masyarakat, juga dilakukan peningkatan sarana, peningkatan peran institusi dan pemangku adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

#### **5. Misi V : Meningkatkan Daya Dukung Kota yang Berwawasan Lingkungan.**

Untuk mewujudkan misi V, pada tahap I arah kebijakan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan prasarana dan sarana untuk percepatan pembangunan, diarahkan kepada peningkatan fasilitas perkotaan, melakukan upaya pengendalian kualitas lingkungan dan permukiman, penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penataan kota yang bersih, hijau, dan nyaman dan tata kelola lingkungan hidup yang baik serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan.

### **B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHAP II**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahap II dilaksanakan melalui RPJMD tahun 2010-2015 dengan Visi pada *“Terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa, sehat, edukatif dan sejahtera dengan pemerintahan yang baik dan bersih menuju kota perdagangan dan jasa yang maju*

*dan modern*". Visi ini mengarahkan bahwa Kota Solok fokus dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan mengerahkan dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih juga diarahkan untuk menuju kota perdagangan dan jasa yang maju dan modern.

Visi pembangunan tahap II tersebut, dituangkan ke dalam misi dan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

### **1. Misi I : Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa Berdaya Saing.**

Untuk mencapai pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa pada tahap ini dalam rangka mewujudkan perdagangan dan jasa yang berdaya saing, arah kebijakan yang telah dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan.  
Pada tahap ini telah dilakukan penataan dan pengembangan fasilitas pasar dalam rangka menciptakan pasar yang aman dan nyaman untuk pengunjung. Pada tahap ini juga telah dilaksanakan lanjutan pembangunan pasar eks kantor pos.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK.  
Pada tahap ini telah dilaksanakan peningkatan kapasitas pelaku UMKMK dan peningkatan sistem manajemen pembinaan lembaga serta pengelola UMKMK. Pada tahap ini telah mulai dilakukan inisiasi pusat inovasi dan inkubasi bisnis, melalui kajian dan pendampingan UMKMK dalam bentuk inkubasi bisnis.
- c. Pengembangan agribisnis berdaya saing.  
Dalam rangka mengupayakan agribisnis berdaya saing, pada tahap ini telah dilakukan peningkatan penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan.
- d. Pengembangan destinasi wisata.  
Untuk pengembangan pariwisata, pada tahap ini pembenahan terhadap objek wisata tetap dilanjutkan. Disamping itu, upaya peningkatan kunjungan wisatawan dilaksanakan melalui promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar daerah.

- e. Pengembangan teknologi dan sarana komunikasi pendukung pengembangan ekonomi daerah.

Pada tahap ini, pengembangan teknologi dan sarana komunikasi untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah telah dilakukan melalui peningkatan sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku usaha.

- f. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan promosi investasi.

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif pada tahap ini telah dilakukan penyederhanaan proses untuk memulai usaha, kerjasama investasi, promosi terpadu investasi, perdagangan dan pariwisata.

## **2. Misi II : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.**

Untuk mewujudkan misi II, pada tahap II arah kebijakan yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Optimalisasi pemerataan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.  
Dilakukan melalui peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan peran pendidikan ekstra kurikuler, meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.  
Diarahkan melalui peningkatan pelayanan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan penyediaan pelayanan tumbuh kembang anak. Disamping itu juga dilakukan penyediaan tenaga dan peralatan medis, obat-obatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat.
- c. Melanjutkan penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif dan melakukan pembinaan terhadap kelembagaan cabang olahraga.
- d. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial. Penanggulangan kemiskinan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial diarahkan kepada kelompok yang beresiko tinggi, ibu dan anak, kelompok usia manula, anak terlantar, dan anak yatim.

### **3. Misi III : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.**

Untuk mewujudkan misi III, pada tahap II arah kebijakan yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.  
Dilaksanakan melalui penataan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui *e-government*. Demikian juga dalam rangka menjaga stabilitas daerah telah dilakukan penegakan peraturan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kompetensi aparatur.  
Dilakukan melalui pendelegasian wewenang perizinan dari Walikota kepada perangkat daerah yang ditunjuk, pemantapan SOP pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dan kompetensi serta kesejahteraan aparatur.
- c. Penguatan fungsi pengawasan internal.  
Dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan dan meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah serta kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan institusi pengawasan.

### **4. Misi IV : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis dan Berbudaya.**

Untuk mewujudkan misi IV, pada tahap II arah kebijakan yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat.  
Dalam tahap II ini adalah masih melanjutkan upaya yang telah dilakukan pada tahap I melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi *stakeholders* keagamaan, meningkatkan pendidikan akhlak untuk generasi muda, baik melalui sekolah, masjid maupun organisasi sosial keagamaan lainnya. Disamping itu juga diupayakan untuk menekan angka kejahatan dan penyakit masyarakat.
- b. Meningkatkan fungsi rumah ibadah melalui pemerataan pembangunan prasarana dan sarana rumah ibadah yang representatif.

- c. Meningkatkan pelestarian adat dan budaya.

Dengan melakukan legitimasi terhadap cagar budaya Solok, peningkatan peran institusi dan pemangku adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

## **5. Misi V : Meningkatkan Daya Dukung Kota yang Berwawasan Lingkungan**

Untuk mewujudkan misi V, pada tahap II arah kebijakan yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kota.

Dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat melalui pembangunan jalan dan jembatan serta fasilitas sarana lainnya.

- b. Penataan dan pengendalian ruang.

Dilakukan sesuai dengan peruntukannya melalui penyusunan regulasi penataan ruang dan melaksanakan regulasi secara konsisten.

- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dengan semakin tingginya intensitas pembangunan di Kota Solok, mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

### **C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHAP III**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap III dilaksanakan melalui RPJMD tahun 2016-2021, dengan Visi pembangunan pada *“Terwujudnya masyarakat Kota Solok yang beriman, bertaqwa dan sejahtera, menuju kota perdagangan, jasa serta pendidikan yang maju dan modern”*. Visi ini mempunyai ciri pokok masyarakat yang beriman dan bertaqwa, masyarakat yang sejahtera, menuju kota perdagangan, jasa dan pendidikan dengan membentuk masyarakat yang cerdas, maju dan modern.

Visi pembangunan tahap III tersebut, dituangkan ke dalam misi dan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

#### **1. Misi I : Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa Berdaya Saing.**

Untuk mencapai pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa pada tahap ini dalam rangka mewujudkan perdagangan dan jasa yang berdaya saing, arah kebijakan yang telah dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan.  
Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan, revitaliasi pasar yang ada, dan pembangunan sentra pasar di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK.  
Pada tahap ini peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK dilakukan melalui penguatan fasilitas dan SDM pelaku UMKMK untuk meningkatkan daya saing produk. Untuk meningkatkan kemampuan bisnis UMKMK dilakukan melalui penyediaan sentra inovasi dan inkubasi bisnis yang pada tahap ini dilakukan proses pembangunan sentra inovasi dan inkubasi bisnis.
- c. Pengembangan agribisnis yang berdaya saing.  
Dalam rangka mengupayakan agribisnis yang berdaya saing, pada tahap ini dilakukan peningkatan penerapan teknologi pertanian yang modern. Disamping itu pada tahap ini juga akan dilakukan inisiasi pembangunan kawasan agribisnis.
- d. Pengembangan destinasi wisata.  
Untuk pengembangan pariwisata, pada tahap ini dilakukan peningkatan kawasan dan destinasi wisata yang ada dan mengembangkan agrowisata.
- e. Pengembangan teknologi dan sarana komunikasi pendukung pengembangan ekonomi daerah.  
Pada tahap ini, untuk pengembangan teknologi dan sarana komunikasi pendukung pengembangan ekonomi daerah akan dilakukan peningkatan jaringan kerjasama perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*) dengan meningkatkan *coverage area* jaringan internet di Kota Solok dan penyiapan SDM pelaku usaha.
- f. Pengembangan usaha ekonomi kreatif.  
Pada tahap ini dilakukan peningkatan keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dalam mempercepat pengembangan ekonomi daerah.
- g. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan promosi investasi.  
Untuk meningkatkan pertumbuhan nilai investasi di Kota Solok, pada tahap ini dilakukan peningkatan pelayanan perizinan investasi dan pemberian insentif terhadap para investor.

## **2. Misi II : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.**

Untuk mewujudkan misi II, pada tahap III arah kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- a. Optimalisasi pemerataan kualitas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. Dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mempermudah akses terhadap pendidikan formal dan non formal, peningkatan mutu profesionalisme tenaga kependidikan dan peningkatan tatakelola pendidikan serta penerapan materi pembelajaran berbasis muatan lokal, budaya daerah.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana kesehatan, penyediaan peralatan medis, peningkatan mutu pelayanan dan ketersediaan SDM kesehatan.
- c. Pembangunan kepemudaan dan prasarana olahraga yang representatif. Dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pemuda dalam berwirausaha dan melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang representatif.
- d. Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya. Dilakukan dengan pendataan dan identifikasi permasalahan keluarga miskin secara elektronik, untuk mendapatkan kondisi *riil* keluarga miskin sehingga program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan menjadi efektif untuk mengurangi angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## **3. Misi III : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.**

Untuk mewujudkan misi III, pada tahap III arah kebijakan yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih Tetap dilanjutkan pada pembangunan tahap III dengan penerapan teknologi informasi secara bertahap dalam pengelolaan pemerintahan dengan penggunaan *e-planning*, *e-budgeting* dan aplikasi elektronik lainnya untuk

peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pada tahap ini juga dilaksanakan implementasi beberapa konsep *smart city*.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan SDM aparatur.  
Diarahkan kepada pengembangan kompetensi aparatur dan inovasi daerah, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
- c. Penguatan fungsi pengawasan internal.  
Diarahkan kepada penguatan kelembagaan dan kapabilitas APIP, sistem pengendalian intern serta peneguhan komitmen implementasi rekomendasi dan kualitas hasil pengawasan.

#### **4. Misi IV : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamais dan Berbudaya.**

Untuk mewujudkan misi IV, pada tahap III arah kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat.  
Dilakukan melalui peningkatan kesadaran beragama, peningkatan iman dan taqwa bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu jumlah dan kualitas sarana peribadatan ditingkatkan seperti masjid, musholla dan tempat pendidikan agama.
- b. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana peribadatan.  
Fungsi prasarana dan sarana peribadatan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan ekonomi syariah berbasis masjid.
- c. Melestarikan adat istiadat dan budaya.  
Dengan memperkuat peran pemangku adat, serta meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana adat dan budaya.

#### **5. Misi V : Meningkatkan Daya Dukung Kota yang Berwawasan Lingkungan.**

Untuk mewujudkan misi V ini, pada tahap III arah kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas.  
Peningkatan prasarana dan sarana kota yang berkualitas tetap dilanjutkan, dengan mengarahkan kepada pembangunan prasarana perkantoran dan prasarana publik yang representatif.

- b. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan berdasarkan daya tampung lingkungan.
- c. Pengendalian dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.  
Pengendalian dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahap ini mulai dilaksanakan dan diharapkan dapat dituntaskan pada tahun akhir tahapan ini. Disamping itu upaya pencegahan juga dilaksanakan terhadap kawasan yang tidak termasuk dalam kawasan kumuh.

#### **D. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHAP IV**

Tema Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada Tahap IV adalah *"Kota Solok Sejahtera melalui sektor Perdagangan, Jasa dan Pendidikan"*. Tema ini mempunyai ciri pokok masyarakat sejahtera, menuju kota perdagangan, jasa dan pendidikan sehingga terbentuk tatanan kehidupan masyarakat madani yang cerdas, maju dan modern.

Tema pembangunan tahap IV tersebut, dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

##### **1. Misi I : Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa Berdaya Saing**

Untuk mencapai pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa pada tahap ini dalam rangka mewujudkan perdagangan dan jasa yang berdaya saing, arah kebijakan yang akan dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan.  
Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan yang ada dan mengoptimalkan pengembangan pasar di setiap kawasan sesuai dengan peruntukannya.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK.  
Pada tahap ini peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM akan dilakukan melalui peningkatan fasilitas dan SDM pelaku UMKMK untuk meningkatkan daya saing produk. Dalam upaya meningkatkan kemampuan bisnis UMKMK akan dilakukan melalui penyediaan sentra inovasi dan inkubasi bisnis yang pada tahap ini dilakukan proses pembangunan sentra inovasi dan inkubasi bisnis.

- c. Agribisnis yang berdaya saing.  
Dalam rangka mengupayakan agribisnis yang berdaya saing, pada tahap ini tetap dilakukan melalui peningkatan penerapan teknologi pertanian. Disamping itu pada tahap ini juga akan dilakukan pembangunan kawasan agribisnis.
- d. Pengembangan destinasi pariwisata.  
Untuk pengembangan pariwisata, pada tahap ini diarahkan untuk mendorong destinasi wisata yang ada di Kota Solok menjadi kontributor penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk itu peningkatan mutu destinasi wisata, penyelenggaraan event pariwisata dan optimalisasi promosi pariwisata sangat diperlukan.
- e. Pemanfaatan teknologi dan sarana komunikasi pendukung pengembangan ekonomi daerah.  
Pada tahap ini diharapkan pengembangan ekonomi di Kota Solok sudah berbasis *e-commerce* untuk memasuki pasar global.
- f. Pengembangan usaha ekonomi kreatif.  
Pada tahap ini keterlibatan pelaku ekonomi kreatif diharapkan sudah menjadi penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- g. Peningkatan nilai investasi swasta.  
Pada tahap ini diharapkan nilai investasi swasta meningkat secara signifikan melalui optimalisasi pelayanan perizinan investasi berbasis elektronik dan pemberian insentif investasi.

## **2. Misi II : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.**

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan tahap IV diarahkan kepada:

- a. Pemantapan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan unggul.  
Dilaksanakan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang modern, meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan pemerataan nilai kelulusan di atas rata-rata nilai nasional.
- b. Pemantapan pelayanan kesehatan.  
Pemantapan pelayanan kesehatan tetap dilanjutkan pada pembangunan tahap IV yang dilaksanakan dengan optimalisasi operasional rumah sakit umum daerah dengan spesifikasi khusus. Penyediaan tenaga medis yang

- memadai dan penyediaan sarana prasarana pendukung operasional rumah sakit serta merevitalisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar.
- c. Pembinaan dan peningkatan lembaga kepemudaan dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah.  
Pemantapan kemampuan pemuda dalam berwirausaha dan melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang representatif.
- d. Penanganan permasalahan kemiskinan.  
Penanganan permasalahan kemiskinan pada tahap ini diarahkan pada intervensi kepada kelompok atau masyarakat yang miskin absolut, guna mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan. Di samping itu tetap melakukan pemantauan terhadap kerawanan sosial yang berpotensi muncul di tengah masyarakat.

### **3. Misi III : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih pada tahap IV ini diarahkan pada :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.  
Peningkatan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, ditingkatkan dengan mengoptimalkan penerapan teknologi informasi secara terpadu.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan SDM aparatur.  
Diarahkan kepada pengembangan inovasi daerah, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat menuju kota cerdas (*smart city*).
- c. Penguatan fungsi pengawasan internal.  
Diarahkan kepada penguatan kelembagaan dan kapabilitas APIP, sistem pengendalian intern serta peneguhan komitmen implementasi rekomendasi dan kualitas hasil pengawasan.

### **4. Misi IV : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamais dan Berbudaya.**

Untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamais dan berbudaya pada tahap IV ini diarahkan pada :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat.  
Untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat pada tahap ini akan diarahkan kepada peningkatan mutu pendidikan agama pada tingkat pendidikan dasar serta pelibatan aktif lembaga keagamaan dan peningkatan kapasitas lembaga adat dan budaya
- b. Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah.  
Dalam rangka mencapai rumah ibadah paripurna, rumah ibadah tidak hanya untuk kegiatan peribadatan, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan ekonomi syariah berbasis masjid, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mengembangkan kolaborasi pemangku adat dan budaya, dengan upaya melestarikan nilai-nilai warisan adat dan budaya melalui penyediaan prasarana dan sarana yang representatif.

#### **5. Misi V : Meningkatkan Daya Dukung Kota yang Berwawasan Lingkungan.**

Untuk meningkatkan daya dukung kota yang berwawasan lingkungan pada tahap IV ini dilakukan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kota.  
Terintegrasinya pembangunan Infrastruktur kota menuju kota persimpangan yang maju. Untuk mewujudkannya perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ke pusat pertumbuhan ekonomi, permukiman, pendidikan, kesehatan dan pariwisata serta peningkatan prasarana dan sarana irigasi, perumahan dan permukiman.
- b. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.  
Dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang ini dilakukan tidak hanya oleh Pemerintah tapi juga dengan melibatkan peran masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.  
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dilaksanakan melalui upaya meningkatkan kualitas udara, air dan lahan. Perkembangan kota baik dari segi penambahan penduduk dan aktifitas pembangunan akan mengubah keseimbangan alam yang berdampak terhadap keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kelestarian lingkungan antara lain dengan melakukan kajian

seksama melalui dokumen lingkungan hidup, pengembangan kebijakan panen air hujan, pengembangan IPAL Komunal, meminimalkan pemanfaatan ruang pada daerah dengan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) pangan dan air yang tinggi. pengaturan ulang lokasi pengembangan sarana seperti gudang, pengembangan terminal, jalan dan fasilitas kesehatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan efektifitas pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Solok 2005-2025 dapat dilihat pada tabel 5.1

**Tabel 5. 1**  
**Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Kota Solok**

SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	RPJMD TAHAP I 2006-2010	RPJMD TAHAP II 2010-2015	RPJMD TAHAP III 2016-2021	RPJMD TAHAP IV 2021-2025
<b>Misi I : Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing</b>				
1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK	Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK	Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK	Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK
	Pengembangan agribisnis yang berdaya saing	Pengembangan agribisnis berdaya saing	Pengembangan agribisnis yang berdaya saing	Agribisnis yang berdaya saing
	Pengembangan destinasi wisata	Pengembangan destinasi wisata	Pengembangan destinasi wisata	Pengembangan destinasi pariwisata
		Pengembangan teknologi dan sarana komunikasi pendukung pengembangan ekonomi daerah	Pengembangan teknologi dan sarana komunikasi pendukung pengembangan ekonomi daerah	Pemanfaatan teknologi dan sarana komunikasi pendukung pengembangan ekonomi daerah
			Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Pengembangan usaha ekonomi kreatif
2. Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi	Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi dan promosi investasi	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan promosi investasi	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan promosi investasi	Peningkatan nilai investasi swasta

SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	RPJMD TAHAP I 2006-2010	RPJMD TAHAP II 2010-2015	RPJMD TAHAP III 2016-2021	RPJMD TAHAP IV 2021-2025
<b>Misi II : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b>				
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Pelayanan dan pemerataan kualitas pendidikan	Optimalisasi pemerataan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Optimalisasi pemerataan kualitas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar	Pemantapan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan unggul
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Pemantapan pelayanan kesehatan
	Pembangunan kepemudaan dan prasarana dan sarana olahraga	Melanjutkan penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang representative dan melakukan pembinaan terhadap kelembagaan cabang olahraga	pembangunan kepemudaan dan prasarana olahraga yang representative	Pembinaan dan peningkatan lembaga kepemudaan dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah
Menurunkan Angka Kemiskinan	Pemberdayaan keluarga miskin	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya	Penanganan permasalahan kemiskinan
<b>MISI III : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>				
Mewujudkan reformasi birokrasi	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik ( <i>good local governance</i> )	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan sumberdaya aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kompetensi aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan SDM aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan SDM aparatur
	Penguatan fungsi pengawasan internal	Penguatan fungsi pengawasan internal	Penguatan fungsi pengawasan internal	Penguatan fungsi pengawasan internal

SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	RPJMD TAHAP I 2006-2010	RPJMD TAHAP II 2010-2015	RPJMD TAHAP III 2016-2021	RPJMD TAHAP IV 2021-2025
<b>MISI IV : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamais dan Berbudaya</b>				
Meningkatkan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat
	Meningkatkan fungsi rumah ibadah	Meningkatkan fungsi rumah ibadah	Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana peribadatan	Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah
Meningkatkan ketahanan budaya	Meningkatkan wadah kreatifitas pelestarian adat dan budaya	Meningkatkan pelestarian adat dan budaya	Melestarikan adat istiadat dan budaya	Mengembangkan kolaborasi pemangku adat dan budaya, dengan upaya melestarikan nilai-nilai warisan adat dan budaya melalui penyediaan prasarana dan sarana yang representatif
<b>MISI V : Meningkatkan Daya Dukung Kota yang Berwawasan Lingkungan</b>				
Meningkatkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas	Penyediaan prasarana dan sarana untuk percepatan pembangunan	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kota	Meningkatkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kota
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang		Penataan dan pengendalian ruang	Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan berdasarkan daya tampung lingkungan	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
			Pengendalian dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

## 5.2. SASARAN POKOK RPJP DAERAH

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran pokok menjelaskan target capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Sasaran pokok dapat diprioritaskan sesuai urutan waktu yang menggambarkan makna strategis dan urgensi prioritas pembangunan. Perumusan sasaran pokok ditentukan dengan indikator sebagai tolok ukur pada masing-masing sasaran pokok.

Merujuk rumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang, maka dirumuskan sasaran pokok RPJPD Kota Solok sebagai berikut:

1. Misi pertama, “mewujudkan sektor perdagangan dan jasa yang berdaya saing” dengan sasaran pokok sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, dengan indikator:
    - 1) Pertumbuhan Ekonomi
    - 2) Pertumbuhan sektor perdagangan
    - 3) Tingkat Pengangguran
  - b. Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi, dengan indikator rata-rata pertumbuhan nilai investasi.
2. Misi kedua, “mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas”, dengan sasaran pokok sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  - b. Menurunkan angka kemiskinan, dengan indikator angka kemiskinan.
3. Misi ketiga, “mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih” dengan sasaran pokok adalah “mewujudkan reformasi birokrasi”, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.
4. Misi Keempat, “meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamais dan berbudaya” dengan sasaran pokok sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat”, dengan indikator pertumbuhan zakat.

- b. Meningkatkan ketahanan budaya, dengan indikator kekayaan budaya yang dilegalisasi.
5. Misi Kelima “meningkatkan daya dukung kota yang berwawasan lingkungan” dengan sasaran pokok sebagai berikut :
- a. Meningkatkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dengan indikator luasan permukiman kumuh dan jalan dalam kondisi mantap.
  - b. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan indikator kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
  - c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berdasarkan Arah kebijakan pembangunan Tahap I, II dan III yang telah dilaksanakan dalam RPJMD, maka pada perubahan RPJPD ini lebih difokuskan pada arah kebijakan tahap IV yang dijabarkan melalui sasaran pokok. Arah kebijakan dan sasaran pokok menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD tahap berikutnya. Keterkaitan visi, misi, arah kebijakan tahap IV dan sasaran pokok jangka panjang Kota Solok terlihat pada tabel 5.2.



**Tabel 5. 2**  
**Visi, Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025**

VISI: Solok Menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa Dan Pendidikan Di Sumatera Barat Tahun 2025								
Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Realisasi		Data Dasar Perubahan	Target		
			Tahap I	Tahap II	2017	Tahap III	Tahap IV	
1	Mewujudkan sektor perdagangan dan Jasa yang berdaya saing	1. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,96	5,97	5,78	6,00	6,50
			Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	5,86	5,74	5,61	6,91	8,00
			Tingkat Pengangguran (%)	9,6	4,72	5,88	3,46	3,00
		2. Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi	Rata-rata pertumbuhan Nilai Investasi (%)	19,27	40,81	6,26	6,50	7,50
2	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,38	76,83	77,44	79,27	81,17
		2. Menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan (%)	7,92	4,12	3,66	2,69	2,00
3	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih	1. Mewujudkan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	55	61	68	75
4	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamais dan berbudaya	1. Meningkatkan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Pertumbuhan zakat (%)	NA	NA	35	60	75
		2. Meningkatkan ketahanan budaya	Kekayaan budaya yang dilegalisasi (%)	NA	NA	NA	40	60



**VISI: Solok Menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa Dan Pendidikan Di Sumatera Barat Tahun 2025**

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Realisasi		Data Dasar Perubahan	Target		
			Tahap I	Tahap II	2017	Tahap III	Tahap IV	
5	Meningkatkan daya dukung kota yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas	Luasan Permukiman Kumuh (%)	NA	2,92	2,38	1,53	0
			Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	70,42	87,99	77,80	96	96
		2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	NA	NA	70,25	85	95
			3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	NA	49,52	58



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

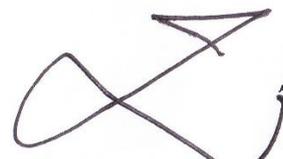
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan permasalahan dan potensi daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025. RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 merupakan revisi dokumen RPJPD sebelumnya. Revisi RPJPD dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Revisi juga dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika perkembangan Kota Solok dan perubahan berbagai kebijakan Pemerintah dan Provinsi dalam kurun waktu berjalan, sehingga mengubah isu-isu strategis pembangunan Kota Solok di masa yang akan datang. Atas dasar itu berbagai kebijakan yang ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyempurnaan. Berbagai target pencapaian perlu dirumuskan kembali untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya keberhasilan pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan *stakeholders* dalam melaksanakan pembangunan di Kota Solok, terutama untuk :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya serta penyelenggaraan pemerintahan di Kota Solok.
2. Menjamin terwujudnya sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 bergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintah dengan pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.

**WALIKOTA SOLOK**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Z' shape with a loop at the bottom right and a horizontal line at the top right.

**ZUL ELFIAN**